DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SUMATERA BARAT

PROFIL
PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2018

PADANG, TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat limpahan rahmat dan perkenannya, Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 dapat diselesaikan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan, pada pasal 4 mengamanatkan bahwa pemerintah provinsi menyusun Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi. Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 ini diterbitkan untuk memenuhi amanat tersebut sekaligus memberikan gambaran kondisi dan perkembangan kependudukan di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2018.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 ini adalah data kependudukan hasil konsolidasi dan pembersihan data yang dilakukan oleh Tim Teknis Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia per 31 Desember 2018, data perkembangan kependudukan Kabupaten/Kota, dan data pendukung dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Instansi teknis terkait, yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, serta Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat.

Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan dalam perumusan kebijakan, penyusunan perencanaan dan strategi pembangunan di berbagai bidang agar tepat sasaran, serta untuk evaluasi kebijakan pembangunan yang berwawasan kependudukan yaitu pembangunan yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi penduduk yang ada, dan penduduk harus dijadikan titik sentral dalam proses pembangunan serta penduduk harus dijadikan subjek dan

objek dalam pembangunan. Dengan kata lain pembangunan adalah oleh penduduk dan untuk penduduk. Disisi lain, pembangunan juga harus semakin menekankan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia disamping pembangunan infrastruktur.

Disadari bahwa penyajian data dalam Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, tanggapan dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan, guna penyempurnaan penyajian Profil Perkembangan Kependudukan dimasa yang akan datang.

Kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 ini diucapkan terima kasih. Semoga Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 ini dapat bermanfaat untuk semua pihak, khususnya dalam rangka menunjang perencanaan pembangunan di Provinsi Sumatera Barat.

Padang, 28 Juni 2019
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,
KB, Dukcapil Provinsi Sumatera Barat

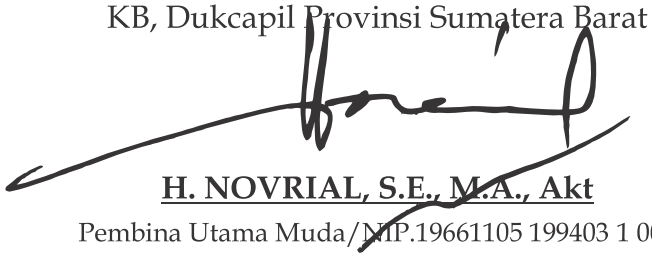

H. NOVRIAL, S.E., M.A., Akt
Pembina Utama Muda/NIP.19661105 199403 1 005

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR		……..	i
DAFTAR ISI		……..	iii
DAFTAR TABEL		……..	vii
DAFTAR GAMBAR		……..	xi
BAB I	PENDAHULUAN		
	A. Latar Belakang Penyusunan	……..	1
	B. Tujuan	……..	2
	C. Ruang Lingkup	……..	3
	D. Pengertian	……..	3
BAB II	GAMBARAN UMUM DAERAH		
	A. Letak Geografis Daerah	……..	11
	B. Kondisi Demografis Daerah	……..	13
	C. Gambaran Ekonomi Daerah	……..	18
	D. Potensi Daerah	……..	21
BAB III	SUMBER DATA DAN KOMPONEN KEPENDUDUKAN		
	A. Sumber Data	……..	38
	B. Komponen Kependudukan	……..	39
	1. Kuantitas Penduduk	……..	39
	a. Komposisi Penduduk Menurut Karakteristik Demografi	……..	40
	1) Jumlah Penduduk	……..	42
	2) Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin	……..	44
	a) Umur Median (*Median Age*)	……..	46
	b) Rasio Jenis Kelamin (*Sex Ratio*)	……..	48
	c) Piramida Penduduk	……..	51
	d) Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*)	……..……	54

3) Rasio Kepadatan Penduduk (*Population Density Ratio*) …….. 56
4) Angka Pertumbuhan Penduduk …….. 58
b. Komposisi Penduduk Menurut Karakteristik Sosial …….. 60
1) Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan …….. 60
2) Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Kepercayaan …….. 64
3) Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kecacatan …….. 67
4) Penduduk Menurut Status Kawin …….. 70
a) Angka Perkawinan Kasar …….. 73
b) Angka Perkawinan Umum …….. 74
c) Angka Perceraian Kasar (*Divorce*) …….. 76
d) Angka Perceraian Umum …….. 77
c. Keluarga …….. 79
1) Jumlah Keluarga dan Rata-rata Jumlah Anggota Keluarga …….. 80
2) Status Hubungan Dengan Kepala Keluarga (SHDK) …….. 82
3) Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Umur …….. 83
4) Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin …….. 84
5) Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Status Kawin …….. 86
6) Karakteristik Kepala Keluarga Menurut Pendidikan …….. 89
7) Karakteristik Kepala Keluarga Menurut Status Bekerja …….. 91
d. Kelahiran (Fertilitas) …….. 93
1) Jumlah Kelahiran …….. 94
2) Angka Kelahiran Kasar (*Crude Birth Rate/CBR*) …….. 95
3) Angka Kematian Kasar (*Crude Death Rate/CDR)* …….. 96
2. Kualitas Penduduk ……..… 98
a. Kesehatan …….. 98

1) Rasio Anak dan Perempuan (*Child women Ratio/CWR*) …….. 98
2) Kematian (Mortalitas) …….. 99
a) Angka Kematian Bayi (*Infant Mortality Rate/ IMR/AKB*) …….. 100
b) Angka Kematian Neonatal (*Neo-Natal Death Rate/NNDR*) …….. 102
c) Angka Kematian Post Neo-Natal (*Post Neo-Natal Death Rate/PNNDR*) …….. 103
d) Angka Kematian Anak …….. 104
e) Angka Kematian Balita ……..... 106
f) Angka Kematian Ibu (*Maternity Mortality Rate*/AKI) …….. 107
b. Pendidikan …….. 109
1) Angka Partisipasi Kasar (APK) …….. 109
2) Angka Partisipasi Murni (APM) …….. 111
3) Angka Putus Sekolah (APS) …….. 112
c. Ekonomi …….. 114
1) Jumlah Tenaga Kerja dan Angkatan Kerja (Bekerja dan Menganggur/Pencari Kerja …….. 114
a) Jumlah dan Proporsi Tenaga Kerja …….. 114
b) Jumlah dan Proporsi Angkatan Kerja (Bekerja dan Menganggur/Pencari Kerja) …….. 116
2) Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK) …….. 117
3) Jumlah dan Proporsi Penduduk yang Bekerja menurut Jenis Pekerjaan …….. 118
4) Pengangguran Terbuka …….. 122
d. Sosial …….. 123
1) Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial …….. 123
2) Proporsi Penduduk Penyandang Cacat …….. 125

3. Mobilitas Penduduk …….. 127
a. Angka Migrasi Masuk (*in-migration/Mi*) …….. 127
b. Angka Migrasi Keluar (*out-migration/Mo*) …….. 129
c. Angka Migrasi Neto (*nett-migration/Mn*) …….. 131
d. Transmigrasi …….. 132
4. Kepemilikan Dokumen Kependudukan …….. 136
a. Kepemilikan Kartu Keluarga …….. 136
b. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) …….. 137
c. Kepemilikan Akta …….. 139
1) Kepemilikan Akta Kelahiran …….. 139
2) Kepemilikan Akta Perkawinan …….. 141
3) Kepemilikan Akta Perceraian …….. 143
4) Kepemilikan Akta Kematian …….. 144

BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan …….. 146
B. Saran …….. 147

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Jumlah Penduduk per Kabupaten/Kota Menurut Jenis Kelamin Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2018 …….. 14
Tabel 2. Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2018 …….. 16
Tabel 3. Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Barat Menurut Wilayah dan Jenis Kelamin Per 31 Desember 2018 …….. 43
Tabel 4. Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Barat Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Per 31 Desember 2018 …….. 45
Tabel 5. Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2018 …….. 47
Tabel 6. Rasio Jenis Kelamin Menurut Wilayah Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2018 …….. 50
Tabel 7. Rasio Jenis Kelamin Menurut Kelompok Umur Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2018 …….. 51
Tabel 8. Rasio Ketergantungan Menurut Kelompok Umur Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2018 …….. 55
Tabel 9. Rasio Kepadatan Penduduk Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2018 …….. 57
Tabel 10. Pertumbuhan Penduduk Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 …….. 59
Tabel 11. Distribusi Penduduk Menurut Pendidikan Yang Ditamatkan Dan Jenis Kelamin Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2018 …….. 62
Tabel 12. Distribusi Penduduk Menurut Agama dan Jenis Kelamin Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2018 …….. 65
Tabel 13. Distribusi Penduduk Menurut Agama dan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2018 …….. 66
Tabel 14. Distribusi Penduduk Menurut Jenis Kecacatan dan Jenis Kelamin Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2018 …….. 67

Tabel 15. Distribusi Penduduk Menurut Jenis Kecacatan dan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2018 …….. 69
Tabel 16. Distribusi Penduduk Menurut Status Kawin dan Jenis Kelamin Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2018 …….. 70
Tabel 17. Distribusi Penduduk Menurut Status Kawin dan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2018 …….. 71
Tabel 18. Angka Perkawinan Kasar Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 …….. 74
Tabel 19. Angka Perkawinan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 …….. 75
Tabel 20. Angka Perceraian Kasar Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 …….. 77
Tabel 21. Angka Perceraian Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 …….. 78
Tabel 22. Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2018 …….. 81
Tabel 23. Distribusi Anggota Keluarga Berdasarkan Status Hubungan Dengan Kepala Keluarga Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2018 …….. 82
Tabel 24. Kepala Keluarga Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2018 …….. 84
Tabel 25. Kepala Keluarga Menurut Jenis Kelamin dan Wilayah Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2018 …….. 85
Tabel 26. Kepala Keluarga Menurut Status Kawin dan Jenis Kelamin Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2018 …….. 87
Tabel 27. Kepala Keluarga Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2018 …….. 90
Tabel 28. Distribusi Kepala Keluarga Menurut Status Bekerja dan Jenis Kelamin Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2018 …….. 91
Tabel 29. Jumlah Kelahiran Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 …….. 94
Tabel 30. Angka Kelahiran Kasar (*Crude Birth Rate/CBR*) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 …….. 96
Tabel 31. Angka Kematian Kasar (*Crude Death Rate/CDR*) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 …….. 97

Tabel 32. Rasio Anak dan Perempuan (*Child Women Ratio/CWR*) Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2018 …….. 98
Tabel 33. Angka Kematian Bayi (*Infant Mortality Rate*) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 …….. 101
Tabel 34. Angka Kematian Neonatal (*Neo-Natal Death Rate/NNDR*) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 …….. 102
Tabel 35. Angka Kematian Post Neo-Natal (*Post Neo-Natal Death Rate/PNNDR*) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 …….. 104
Tabel 36. Angka Kematian Anak Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 …….. 105
Tabel 37. Angka Kematian Balita Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 …….. 106
Tabel 38. Angka Kematian Ibu (*Maternity Mortality Rate/MMR*) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 …….. 108
Tabel 39. Jumlah Penduduk Menurut Usia Sekolah Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2018 …….. 109
Tabel 40. Angka Partisipasi Kasar (APK)/*Gross Enrollment Ratio (GER)* Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 …….. 110
Tabel 41. Angka Partisipasi Murni (APM)/*Net Enrollment Ratio (NER)* Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 …….. 112
Tabel 42. Angka Putus Sekolah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 …….. 113
Tabel 43. Jumlah dan Proporsi Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2018 …….. 115
Tabel 44. Jumlah dan Proporsi Angkatan Kerja Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2018 …….. 116
Tabel 45. Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK) Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2018 …….. 118
Tabel 46. Jumlah dan Proporsi Penduduk yang Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2018 …….. 121
Tabel 47. Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2018 …….. 122
Tabel 48. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2018 …….. 124

Tabel 49. Jumlah Penduduk Penyandang Cacat Menurut Jenis Kelamin Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2018 …….. 125
Tabel 50. Angka Penyandang Cacat Menurut Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2018 …….. 126
Tabel 51. Angka Migrasi Masuk Per Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 …….. 128
Tabel 52. Angka Migrasi Keluar Per Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 …….. 130
Tabel 53. Angka Migrasi Neto Per Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 …….. 131
Tabel 54. Data Transmigran Masuk dan Keluar Berdasarkan Penempatan Transmigrasi Per Kabupaten/Kota Tahun 2018 …….. 133
Tabel 55. Data Transmigran Masuk dan Keluar Per Kabupaten Kota Tahun 2018 …….. 134
Tabel 56. Transmigran Berdasarkan Jenis Tranmigrasi Per Kabupaten/Kota Tahun 2018 …….. 135
Tabel 57. Transmigran Berdasarkan Pola Transmigrasi Per Kabupaten/Kota Tahun 2018 …….. 136
Tabel 58. Kepemilikan Kartu Keluarga Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2018 …….. 137
Tabel 59. Kepemilikan KTP-el Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2018 …….. 138
Tabel 60. Kepemilikan Akta Kelahiran Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2018 …….. 140
Tabel 61. Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2018 …….. 141
Tabel 62. Kepemilikan Akta Perkawinan Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2018 …….. 142
Tabel 63. Kepemilikan Akta Perceraian Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2018 …….. 143
Tabel 64. Kepemilikan Akta Kematian Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 …….. 145

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.	Grafik Kepadatan Penduduk Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018	……..	17
Gambar 2.	Piramida Penduduk Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018	……..	52

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN

Penyusunan Profil Kependudukan Provinsi merupakan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Jumlah penduduk yang semakin bertambah dari tahun ke tahun akan berimplikasi terhadap meningkatnya kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, energi, meningkatnya kebutuhan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, meningkatnya persaingan lapangan kerja, semakin sempitnya lapangan dan peluang kerja, meningkatnya pengangguran khususnya bagi mereka yang tidak mampu bersaing.

Untuk mengatasi masalah kependudukan tersebut sudah barang tentu diperlukan data kependudukan yang benar, valid, dan akurat. Data penduduk yang dihasilkan dari Sistem Informasi Adminitrasi Kependudukan (SIAK) merupakan salah satu alternatif yang dapat dimanfaatkan untuk mengetahui informasi kependudukan seperti jumlah penduduk, struktur dan komposisi penduduk serta persebarannya.

Tersedianya data kependudukan yang baik, dalam arti mampu mengobservasikan peristiwa-peristiwa vital, kelahiran, kematian, dan perpindahan dirasakan semakin penting dalam rangka menunjang keberhasilan pembangunan di Provinsi Sumatera Barat.

Data dan informasi mengenai kependudukan yang sudah cukup lama dan tersebar di berbagai instansi atau lembaga pemerintahan sudah banyak dikembangkan untuk berbagai kebutuhan. Apabila data dan informasi yang ada tersebut berhasil diintegrasikan secara menyeluruh, niscaya akan

menjadi aset sekaligus informasi yang berarti untuk perencanaan pembangunan di Provinsi Sumatera Barat.

Komposisi data penduduk yang senantiasa berubah, wajib dimutakhirkan dan divalidasi secara berkelanjutan melalui mekanisme pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota, dimana saat ini telah terbangun dalam suatu SIAK dan telah terintegrasi dengan database e-KTP yang telah menjamin ketunggalan data dengan merekam data biometric penduduk seperti iris mata dan sidik jari sehingga keakuratan dan kevalidan data semakin tinggi.

Dengan demikian, upaya pengembangan sebuah sistem administrasi kependudukan memang merupakan suatu keharusan karena akan mendorong terwujudnya tertib administrasi kependudukan dan tersedianya database kependudukan, khususnya yang bersumber pada SIAK.

Sejalan dengan itu guna memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa data kependudukan harus digunakan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan, maka dengan disusunnya Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Sumatera Barat ini akan memberikan data dan informasi yang berguna untuk proses lebih lanjut dalam perencanaan, alokasi anggaran, pelayanan publik, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal bagi pihak-pihak terkait dan yang berkepentingan di Sumatera Barat.

B. TUJUAN

Adapun tujuan dari penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan ini adalah :

1. Memberikan informasi dan gambaran tentang kondisi, perkembangan dan prospek kependudukan di Provinsi Sumatera Barat.

2. Sebagai alat publikasi dan meningkatkan pelayanan publik guna membangun komitmen semua pihak untuk lebih meningkatkan peran dan partisipasi penduduk dalam pembangunan di Provinsi Sumatera Barat.
3. Sebagai acuan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan di Provinsi Sumatera Barat.

C. RUANG LINGKUP

1. Kuantitas penduduk, meliputi komposisi dan persebaran penduduk.
2. Kualitas penduduk, yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan sosial.
3. Mobilitas penduduk
4. Kepemilikan dokumen kependudukan.

D. PENGERTIAN

1. **Penduduk** adalah Warga Negara Indonesia yang termasuk secara sah serta bertempat tinggal di wilayah Indonesia sesuai dengan peraturan.
2. **Kependudukan** adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat.
3. **Administrasi kependudukan** adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan sektor lain.
4. **Data** adalah fakta yang sudah ditulis dalam bentuk catatan, gambar atau direkam kedalam berbagai bentuk media.

5. **Database** kependudukan adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematik, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
6. **Data kependudukan** adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
7. **Perkembangan kependudukan** adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan.
8. **Profil perkembangan kependudukan** adalah gambaran kondisi, perkembangan dan prospek kependudukan.
9. **Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)** adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan ditingkat penyelenggaraan dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.
10. **Kuantitas penduduk** adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati dan pindah tempat tinggal.
11. **Kualitas penduduk** adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik serta ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang berbudaya, berkepribadian dan layak.
12. **Mobilitas penduduk** adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas administrasi daerah Kabupaten/Kota.
13. **Persebaran penduduk** adalah kondisi sebaran penduduk secara keruangan.
14. **Struktur penduduk** adalah pengelompokan penduduk menurut karakteristik tertentu misalnya umur, jenis kelamin, pendidikan, agama,

status hubungan dalam keluarga, status perkawinan dan lapangan pekerjaan.

15. **Proporsi penduduk** adalah jumlah dan informasi penduduk menurut pengelompokan tertentu, seperti umur dan jenis kelamin.
16. **Umur median** adalah umur yang membagi penduduk menjadi dua bagian dengan jumlah yang sama, yaitu bagian yang pertama lebih muda dan bagian yang kedua lebih tua dari umur median.
17. **Rasio Jenis Kelamin (RJK)** adalah suatu angka yang menunjukkan perbandingan banyaknya jumlah penduduk laki-laki dan banyaknya jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu yang dinyatakan dengan banyaknya penduduk laki-laki per seratus penduduk perempuan.
18. **Piramida penduduk** adalah gambar yang menunjukkan komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin yang disajikan secara grafik.
19. **Rasio ketergantungan atau rasio beban tanggungan (*dependency ratio*)** adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk usia dibawah 15 tahun dan penduduk usia 65 tahun atau lebih) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15-64 tahun). Rasio ketergantungan menunjukkan beban yang harus ditanggung oleh penduduk produktif terhadap penduduk tidak produktif.
20. **Rasio kepadatan penduduk** adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk terhadap luas wilayah atau berapa banyaknya penduduk per kilometer persegi pada periode tahun tertentu.
21. **Pertumbuhan penduduk** adalah suatu perubahan populasi sewaktu-waktu, dan bisa dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi memakai "per waktu unit" untuk pengukuran.

22. **Angka pertumbuhan penduduk** adalah angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk pertahun dalam jangka waktu tertentu yang dinyatakan dengan persentase (%).
23. **Angka perkawinan kasar** menunjukkan persentase penduduk yang berstatus kawin terhadap jumlah penduduk keseluruhan pada pertengahan tahun pada suatu tahun tertentu.
24. **Angka perkawinan umum (AKU)** menunjukkan proporsi penduduk yang berstatus kawin terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun keatas pada suatu tahun tertentu.
25. **Angka perceraian kasar (*divorce*)** menunjukkan jumlah perceraian per 1.000 penduduk terhadap jumlah penduduk keseluruhan pada pertengahan tahun untuk suatu tahun tertentu.
26. **Angka perceraian umum** menunjukkan penduduk yang berstatus cerai hidup terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun keatas (penduduk yang terkena resiko perceraian) pada suatu tahun tertentu.
27. **Keluarga** adalah sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang masih mempunyai hubungan kekerabatan/hubungan darah karena perkawinan, kelahiran, adopsi dan lain sebagainya.
28. **Kelahiran (*fertilitas*)** merupakan kemampuan berproduksi yang sebenarnya dari penduduk (*actual reproduction performance*) atau jumlah kelahiran hidup yang dimiliki oleh seorang atau sekelompok perempuan.
29. **Jumlah kelahiran** didefinisikan sebagai banyaknya kelahiran hidup yang terjadi pada waktu tertentu pada wilayah tertentu.
30. **Angka kelahiran kasar (*Crude Birth Rate/CBR*)** menunjukkan banyaknya kelahiran di suatu wilayah pada tahun tertentu per 1.000 penduduk pada pertengahan tahun yang sama.
31. **Lahir hidup** adalah suatu kelahiran bayi tanpa memperhitungkan lamanya didalam kandungan, dimana si bayi menunjukan tanda-tanda

kehidupan pada saat dilahirkan, misalnya ada nafas, ada denyut jantung atau denyut tali pusar atau gerakan otot.

32. **Lahir mati** adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 minggu tanpa menunjukan tanda-tanda kehidupan pada saat dilahirkan.
33. **Kematian (mortalitas)** adalah ukuran jumlah kematian (umumnya, atau karena akibat yang spesifik) pada suatu populasi, skala besar suatu populasi, per dikali satuan.
34. **Angka kematian kasar (*Crude Death Rate/CDR*)** merupakan angka yang menunjukkan besarnya kematian yang terjadi pada tahun tertentu per 1.000 penduduk.
35. **Rasio anak dan perempuan (*Child Women Ratio/CWR*)** adalah rasio antara jumlah anak dibawah 5 tahun disuatu tempat pada suatu waktu dengan penduduk perempuan usia 15-49 tahun.
36. **Kematian bayi (*infant mortality*)** adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat 1 tahun.
37. **Angka kematian bayi (*Infant Mortality Rate/IMR/AKB*)** adalah jumlah kematian bayi berusia dibawah 1 tahun pada 1.000 kelahiran hidup dalam tahun tertentu.
38. **Kematian bayi endogen atau kematian neonatal** adalah kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama setelah dilahirkan, dan umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir, yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan.
39. **Angka kematian neonatal (*Neo-Natal Death Rate/NNDR*)** adalah jumlah kematian neo-natal per 1.000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu.

40. **Kematian bayi eksogen atau kematian post neo-natal** adalah kematian bayi yang terjadi setelah usia 1 bulan sampai menjelang usia 1 tahun yang disebabkan oleh faktor-faktor yang terkait dengan pengaruh lingkungan luar.
41. **Angka kematian post neo-natal (*Post Neo-Natal Death Rate/PNNDR*)** adalah jumlah kematian post neo-natal per 1.000 kelahiran hidup selama 1 tahun.
42. **Kematian anak** adalah kematian yang terjadi pada penduduk yang berusia 1 sampai menjelang 5 tahun atau tepatnya 1 tahun sampai dengan 4 tahun 11 bulan 29 hari yang dipengaruhi oleh tingkat kecukupan gizi, tingginya prevalensi penyakit menular pada anak, atau kecelakaan yang terjadi di dalam atau di sekitar rumah.
43. **Angka kematian anak** adalah jumlah kematian anak selama 1 tahun tertentu per 1.000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu.
44. **Kematian balita** adalah kematian yang terjadi pada semua anak termasuk bayi yang baru lahir yang berumur 0 tahun sampai dengan menjelang 5 tahun, umumnya ditulis dengan notasi 0-4 tahun.
45. **Angka kematian balita** adalah jumlah kematian balita selama satu tahun tertentu per 1.000 balita umur yang sama pada pertengahan tahun itu.
46. **Kematian ibu** adalah kematian yang terjadi pada perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan dan tempat persalinan yang disebabkan karena factor kehamilan atau komplikasi kehamilan dan kelahiran atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain.
47. **Angka kematian ibu** adalah banyaknya kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup.
48. **Sekolah** adalah kegiatan seseorang untuk bersekolah di sekolah formal, mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tertinggi, selama

seminggu yang lalu sebelum pencacahan. Termasuk pula kegiatan dari mereka yang sedang libur sekolah.

49. **Pendidikan tertinggi yang ditamatkan** adalah tingkat pendidikan yang dicapai seseorang setelah mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi suatu tingkatan sekolah dengan mendapatkan tanda tamat (ijazah).
50. **Angka partisipasi kasar (APK)** adalah rasio jumlah murid, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.
51. **Angka partisipasi murni (APM)** adalah persentase siswa dengan umur yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama.
52. **Angka putus sekolah (APS)** adalah persentase murid yang putus sekolah menurut jenjang pendidikan.
53. **Penduduk usia kerja** adalah penduduk yang berusia 15 tahun dan lebih.
54. **Angkatan kerja** adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.
55. **Bekerja** adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam terus-menerus dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.
56. **Status pekerjaan** adalah kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan**.**
57. **Angka partisipasi angkatan kerja (APAK)** adalah proporsi angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja.

58. **Pengangguran** adalah orang yang termasuk angkatan kerja, namun pada saat pendataan/survey atau sensus tidak bekerja dan sedang mencari kerja.
59. **Angka pengangguran** adalah proporsi jumlah pengangguran terhadap angkatan kerja.
60. **Pengangguran terbuka** merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan suatu usaha.
61. **Migrasi penduduk** adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah administratrif lainnya yang merefleksikan perbedaan pertumbuhan ekonomi dan ketidakmerataan fasilitas pembangunan antara satu daerah dengan daerah lain.
62. **Angka migrasi masuk (*in-migration*)** adalah angka yang menunjukkan banyaknya yang masuk per 1.000 penduduk di suatu Kabupaten/Kota tujuan dalam waktu satu tahun.
63. **Angka migrasi keluar (*out-migration*)** adalah angka yang menunjukkan banyaknya migran keluar dari suatu Kabupaten/Kota per 1.000 penduduk daerah asal dengan waktu satu tahun.
64. **Angka migrasi neto (*net-migration*)** adalah selisih antara migrasi masuk dan migrasi keluar.
65. **Migrasi neto positif** adalah apabila migrasi masuk lebih besar daripada migrasi keluar.
66. **Migrasi neto negatif** adalah apabila migrasi keluar lebih besar daripada migrasi masuk.

BAB II
GAMBARAN UMUM DAERAH

A. LETAK GEOGRAFIS DAERAH

Secara geografis, Provinsi Sumatera Barat terletak pada 1° 54′ Lintang Utara dan 3° 30′ Lintang Selatan serta 98° 36′ dan – 101° 53′ Bujur Timur dan memiliki batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Provinsi Sumatera Utara.
- Sebelah Selatan dengan Provinsi Bengkulu dan Provinsi Jambi.
- Sebelah Timur dengan Provinsi Riau.
- Sebelah Barat dengan Samudera Hindia.

Provinsi Sumatera Barat terletak di pesisir barat bagian tengah pulau Sumatera yang terdiri dari dataran rendah di pantai barat dan dataran tinggi vulkanik yang dibentuk oleh Bukit Barisan. Provinsi ini memiliki daratan seluas 42.125 kilometer persegi. Dari luas tersebut, lebih dari 45,17 persen merupakan kawasan yang masih ditutupi hutan lindung. Garis pantai provinsi ini seluruhnya bersentuhan dengan Samudera Hindia sepanjang 2.420.357 kilometer dengan luas perairan laut 186.580 kilometer persegi. Kepulauan Mentawai yang terletak di Samudera Hindia termasuk dalam provinsi ini.

Seperti daerah lainnya di Indonesia, iklim Sumatera Barat secara umum bersifat tropis dengan suhu udara yang cukup tinggi, yaitu antara 22,6°C sampai 31,5°C. Provinsi ini juga dilalui oleh garis khatulistiwa, tepatnya di Bonjol, Pasaman. Gunung tertinggi di Provinsi Sumatera Barat adalah Gunung Talamau dengan ketinggian 2.913 meter dari permukaan laut.

Sumatera Barat merupakan salah satu daerah rawan gempa di Indonesia. Hal ini disebabkan karena letaknya yang berada pada

jalur patahan Semangko, tepat di antara pertemuan dua lempeng benua besar, yaitu Eurasia dan Indo-Australia. Oleh karenanya, wilayah ini sering mengalami gempa bumi. Beberapa gempa bumi besar terakhir yang terjadi di Sumatera Barat diantaranya adalah gempa bumi 30 September 2009 dan gempa bumi Kepulauan Mentawai Tahun 2010.

Provinsi Sumatera Barat berdiri pada tanggal 31 Juli 1958 berdasarkan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958. Ibukota Provinsi Sumatera Barat adalah Kota Padang. Secara administratif, Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 12 Kabupaten, 7 Kota, 179 Kecamatan, 928 Desa, dan 230 Kelurahan. Kesembilan belas Kabupaten/Kota itu adalah :

1) Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari 15 Kecamatan dan 182 Desa.
2) Kabupaten Solok terdiri dari 14 Kecamatan dan 74 Desa.
3) Kabupaten Sijunjung terdiri dari 8 Kecamatan dan 61 Desa.
4) Kabupaten Tanah Datar terdiri dari 14 Kecamatan dan 75 Desa.
5) Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari 17 Kecamatan dan 103 Desa.
6) Kabupaten Agam terdiri dari 16 Kecamatan dan 82 Desa.
7) Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari 13 Kecamatan dan 79 Desa.
8) Kabupaten Pasaman terdiri dari 12 Kecamatan dan 37 Desa.
9) Kabupaten Kepulauan Mentawai terdiri dari 10 Kecamatan dan 43 Desa.
10) Kabupaten Dharmasraya terdiri dari 11 Kecamatan dan 52 Desa.
11) Kabupaten Solok Selatan terdiri dari 7 Kecamatan dan 39 Desa.
12) Kabupaten Pasaman Barat terdiri dari 11 Kecamatan dan 19 Desa.
13) Kota Padang terdiri dari 11 Kecamatan dan 104 Kelurahan.
14) Kota Solok terdiri dari 2 Kecamatan dan 13 Kelurahan.

15) Kota Sawahlunto terdiri dari 4 Kecamatan, 27 Desa, dan 10 Kelurahan.
16) Kota Padang Panjang terdiri dari 2 Kecamatan dan 16 Kelurahan.
17) Kota Bukittinggi terdiri dari 3 Kecamatan dan 24 Kelurahan.
18) Kota Payakumbuh terdiri dari 5 Kecamatan dan 47 Kelurahan.
19) Kota Pariaman terdiri dari 4 Kecamatan, 55 Desa, dan 16 Kelurahan.

Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan Kabupaten/Kota terbesar dengan luas wilayah 5.998 kilometer persegi atau 14,24 persen dari luas Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Kota Padang Panjang merupakan Kabupaten/Kota terkecil dengan luas wilayah 21 kilometer persegi atau 0,05 persen dari luas Provinsi Sumatera Barat.

B. KONDISI DEMOGRAFIS DAERAH

Jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2018 adalah sebanyak 5.519.245 jiwa dengan komposisi laki-laki sebanyak 2.782.576 jiwa (50,42 persen) dan perempuan sebanyak 2.736.669 jiwa (49,58 persen). Penyebaran penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 1.

Jika diperhatikan menurut jenis kelamin, nampak bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Gambaran ini terlihat di hampir semua Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat, hanya 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Lima Puluh Kota yang memiliki jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan.

Tabel 1.
Jumlah Penduduk per Kabupaten/Kota Menurut Jenis Kelamin
Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2018

No	Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin (Jiwa)		Total (Jiwa)
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Kabupaten Pesisir Selatan	257.040	251.651	508.691
2	Kabupaten Solok	193.310	190.781	384.091
3	Kabupaten Sijunjung	120.283	116.627	236.910
4	Kabupaten Tanah Datar	186.052	184.941	370.993
5	Kabupaten Padang Pariaman	213.647	214.272	427.919
6	Kabupaten Agam	266.512	262.107	528.619
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	189.915	190.258	380.173
8	Kabupaten Pasaman	161.047	157.332	318.379
9	Kabupaten Kep. Mentawai	45.563	41.954	87.517
10	Kabupaten Dharmasraya	107.968	104.685	212.653
11	Kabupaten Solok Selatan	92.343	88.562	180.905
12	Kabupaten Pasaman Barat	219.221	212.354	431.575
13	Kota Padang	452.674	448.248	900.922
14	Kota Solok	37.072	36.542	73.614
15	Kota Sawahlunto	33.362	33.015	66.377
16	Kota Padang Panjang	29.124	28.643	57.767
17	Kota Bukittinggi	60.975	60.615	121.590
18	Kota Payakumbuh	69.539	68.253	137.792
19	Kota Pariaman	46.929	45.829	92.758
	Sumatera Barat	**2.782.576**	**2.736.669**	**5.519.245**

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2018 (diolah)

Tingkat pertumbuhan penduduk Provinsi Sumatera Barat untuk periode Semester I – Semester II Tahun 2018 adalah sebesar -0,25 persen. Tingkat pertumbuhan yang minus ini disebabkan karena Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2018 melakukan pemutakhiran data dengan cara menyisihkan data penduduk yang tidak pernah mengalami pergerakan disebabkan penduduk tidak pernah datang ke pusat pelayanan sehingga tidak terjadi proses update data dan tidak ditemukan pada saat pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman

melalui petugas Pantarlih. Data tersebut diasumsikan sebagai data yang tidak valid yang terjadi pada saat pendataan korban gempa 2009, dimana masyarakat mendapatkan bantuan gempa berdasarkan daftar hasil pendataan dari petugas pendataan korban gempa yang tidak berdasarkan NIK, yang menyebabkan terjadinya data ganda serta data yang penduduknya tidak menetap di Kabupaten Padang Pariaman (pemilik rumah berada dirantau), sehingga dipandang perlu untuk menyisihkan data dimaksud guna meningkatkan kualitas data kependudukan Kabupaten Padang Pariaman.

Penyebaran penduduk yang tidak merata dan luas wilayah Kabupaten/Kota yang berbeda-beda menyebabkan jumlah penduduk disetiap Kabupaten/Kota sangatlah bervariasi dengan tingkat kepadatan penduduk Provinsi Sumatera Barat adalah 131,02 jiwa per kilometer persegi.

Tingkat kepadatan penduduk tertinggi berada di Kota Bukittinggi yaitu 5.066,25 jiwa per kilometer persegi dengan luas wilayah yang hanya 24 kilometer persegi dan merupakan wilayah dengan luas terkecil kedua setelah Kota Padang Panjang. Hal ini disebabkan karena perkembangan penduduk Kota Bukittinggi yang tidak terlepas dari keberadaan dan peran kota ini sesuai dengan potensi dibidang pendidikan, kesehatan, pariwisata, serta perdagangan dan jasa yang mengakibatkan meningkatnya arus urbanisasi yaitu perpindahan penduduk yang datang ke Kota Bukittinggi.

Sementara itu, wilayah dengan kepadatan penduduk terendah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu hanya 14,59 jiwa per kilometer persegi dengan luas wilayah terbesar yaitu 5.998 kilometer persegi. Ini disebabkan karena Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan Kabupaten yang bentuk wilayah geografisnya adalah kepulauan, dimana terdiri dari 4 (empat) pulau besar yang berpenghuni yaitu Pulau Siberut, Sipora, Pagai Utara, dan Pagai Selatan yang dihuni oleh mayoritas suku Mentawai dan 95

(sembilan puluh lima) pulau-pulau kecil lainnya yang menyebar disekeliling Kabupaten Kepulauan Mentawai. Namun, sebagian besar pulau yang lain hanya ditanami dengan pohon kelapa dan jarak rumah penduduk yang jauh antara satu sama lainnya.

Gambaran jumlah penduduk, luas wilayah, dan kepadatan penduduk secara keseluruhan di Provinsi Sumatera Barat per Kabupaten/Kota dapat dilihat pada Tabel 2 dan Gambar 1.

Tabel 2.
Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk
Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2018

No	Kabupaten/Kota	Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (km^2)	Kepadatan (Jiwa/km^2)
1	Kabupaten Pesisir Selatan	508.691	6.106	83,31
2	Kabupaten Solok	384.091	3.247	118,29
3	Kabupaten Sijunjung	236.910	3.068	77,22
4	Kabupaten Tanah Datar	370.993	1.315	282,12
5	Kabupaten Padang Pariaman	427.919	1.354	316,04
6	Kabupaten Agam	528.619	2.238	236,20
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	380.173	3.324	114,37
8	Kabupaten Pasaman	318.379	3.936	80,89
9	Kabupaten Kepulauan Mentawai	87.517	5.998	14,59
10	Kabupaten Dharmasraya	212.653	3.018	70,46
11	Kabupaten Solok Selatan	180.905	3.612	50,08
12	Kabupaten Pasaman Barat	431.575	3.738	115,46
13	Kota Padang	900.922	686	1.313,30
14	Kota Solok	73.614	61	1.206,79
15	Kota Sawahlunto	66.377	239	277,73
16	Kota Padang Panjang	57.767	21	2.750,81
17	Kota Bukittinggi	121.590	24	5.066,25
18	Kota Payakumbuh	137.792	75	1.837,23
19	Kota Pariaman	92.758	65	1.427,05
	Sumatera Barat	**5.519.245**	**42.125**	**131,02**

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2018 (diolah)

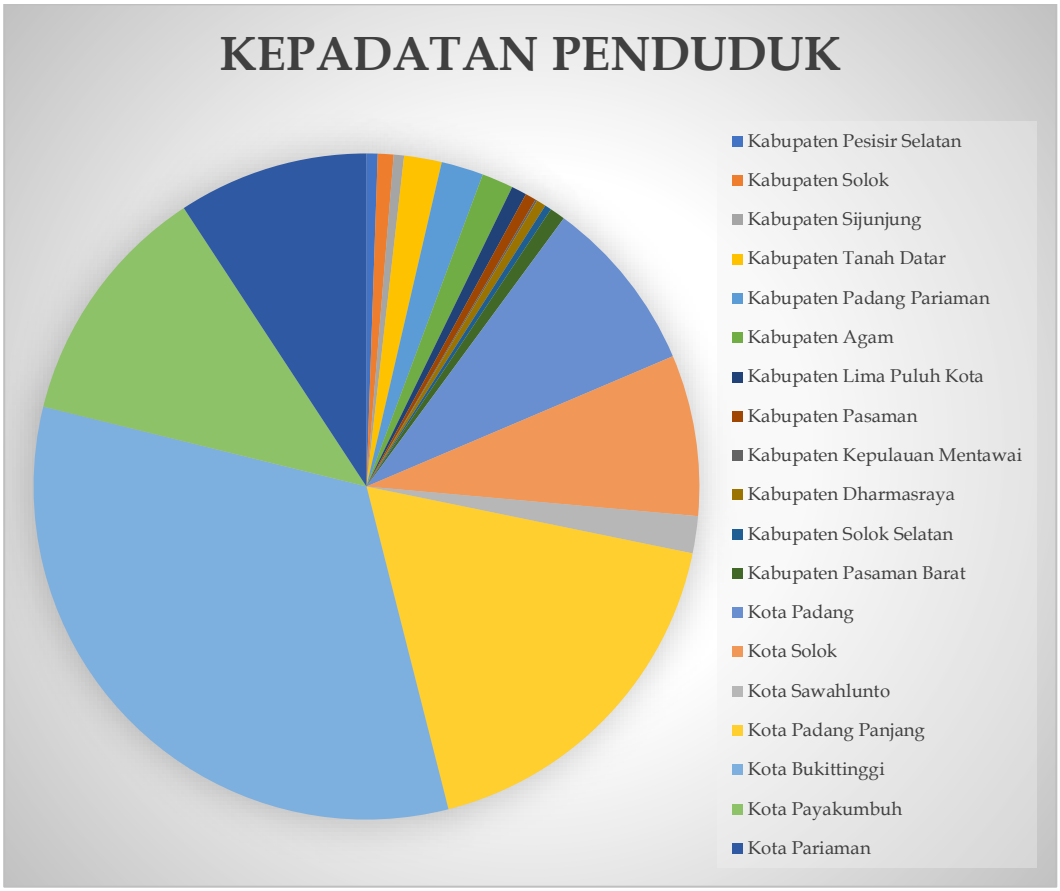

Gambar 1. Grafik Kepadatan Penduduk Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018

Sedangkan berdasarkan agama, penduduk Provinsi Sumatera Barat didominasi oleh pemeluk agama Islam yaitu sebanyak 5.389.314 jiwa atau 97,65 persen dan pemeluk agama lainnya adalah Kristen sebanyak 79.838 jiwa atau 1,45 persen, Katholik sebanyak 46.059 jiwa atau 0,83 persen Hindu sebanyak 95 jiwa atau 0 persen, Budha sebanyak 3.659 jiwa atau 0,07 persen, Konghucu sebanyak 8 jiwa atau 0 persen, dan Kepercayaan sebanyak 272 jiwa atau 0 persen.

C. GAMBARAN EKONOMI DAERAH

Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat meningkat cukup signifikan di triwulan terakhir tahun 2018. Berdasarkan rilis BPS, laju pertumbuhan PDRB Sumbar tumbuh pada level 5,50% (yoy) di triwulan IV 2018 atau terakselerasi dari triwulan sebelumnya yang sebesar 5,24% (yoy). Dari sisi pengeluaran, tingginya aktivitas konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah menjadi penggerak utama laju pertumbuhan ekonomi di triwulan IV 2018. Selain itu, masifnya pencairan anggaran infrastruktur dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat menjadi penopang pertumbuhan PMTB di akhir tahun. Dari sisi sektoral, siklus akhir tahun menggerakkan hampir seluruh lapangan usaha utama, seperti LU perdagangan, LU penyediaan akomodasi mamin dan LU transportasi pergudangan.

Perbaikan kinerja perekonomian Sumatera Barat berdampak pada relatif membaiknya kesejahteraan masyarakat hingga September 2018. Kondisi ini tercermin dari menurunnya jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin. Penurunan penduduk miskin tersebut, terutama terjadi pada masyarakat pedesaan, sementara penduduk miskin masyarakat perkotaan cenderung naik. Hal ini disebabkan antara lain karena efektifnya realisasi dana desa padat karya pada tahun 2018. Sementara itu, kualitas hidup masyarakat Sumatera Barat juga meningkat sebagaimana tercermin dari membaiknya IPM sebesar 71,24 pada September 2018, meningkat bila dibandingkan September tahun sebelumnya 70,73.

Dari sisi anggaran pemerintah, pencapaian realisasi belanja pemerintah Provinsi Sumatera Barat tidak sebaik pencapaian pendapatan daerah. Realisasi pendapatan pada triwulan IV 2018 adalah 97,34%, lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi triwulan IV 2017 sebesar 94,38%.

Sedangkan realisasi belanja mencapai 91,12%, relatif menurun dibandingkan dengan realisasi belanja pada triwulan IV 2017 sebesar 92,45%.

Sampai dengan akhir tahun 2018, laju inflasi Sumatera Barat terjaga pada level yang rendah, yakni 2,60% (yoy). Angka realisasi inflasi di triwulan IV 2018 tersebut lebih rendah dari realisasi pada triwulan sebelumnya yang mencapai 2,69% (yoy). Faktor utama pendorong penurunan laju inflasi di triwulan akhir 2018 ialah meredanya gejolak harga kelompok bahan makanan, terutama komoditas cabai merah. Terkendalinya laju inflasi selama tahun 2018 juga merupakan bentuk semakin eratnya koordinasi TPID dengan seluruh program unggulannya, baik pada level Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Dengan tingkat inflasi tersebut menempatkan Sumbar berada pada posisi ketujuh provinsi dengan capaian inflasi terendah nasional dan posisi kelima di wilayah Sumatera selama tahun 2018.

Stabilitas keuangan daerah di Sumatera Barat masih relatif terjaga di tengah melambatnya intermediasi perbankan. Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan pada triwulan IV 2018 tumbuh melambat sebesar 6,26% (yoy) dibandingkan triwulan III 2018 sebesar 8,54% (yoy), yang mayoritas berupa instrumen tabungan. Sementara itu, Kredit/pembiayaan yang didominasi oleh kredit konsumsi juga melanjutkan tren melambat, yakni hanya tumbuh 1,54% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan III 2018 sebesar 2,87% (yoy). Rasio Non-Performing Loan (NPL) Sumatera Barat tercatat rendah pada angka 2,7%, menurun dibandingkan triwulan III 2018 sebesar 3,1%. Sementara itu, arus kas masuk (cash inflow) masih membanjiri sistem perbankan di Sumatera Barat pada triwulan IV 2018. Menjelang akhir tahun, inflow masih dominan di Sumbar meskipun mengalami penurunan.

Sementara itu, outflow pada triwulan laporan cukup tinggi dibandingkan sebelumnya. Kebutuhan masyarakat terhadap uang kartal

yang cukup tinggi di akhir tahun menjadi penyebab utama turunnya inflow dan kenaikan outflow yang cukup signifikan.

Di sisi lain, terjadi kenaikan pada transaksi non tunai melalui instrumen uang elektronik dan melalui kanal pembayaran Layanan Keuangan Digital (LKD). Kenaikan transaksi tersebut berhubungan dengan semakin gencarnya program dan sosialisasi transaksi non tunai. Peningkatan tersebut juga akibat adanya beberapa program pemerintah yang mendorong penggunaan transaksi non tunai di masyarakat.

Sedangkan pemusnahan Uang Tidak Layak Edar (UTLE) mengalami penurunan. Dari segi nominal maupun lembaran, pemusnahan UTLE di Sumbar turun sebesar 10,58% (yoy) dan 0,72% (yoy). Turunnya pemusnahan ini akibat turunnya jumlah arus kas masuk di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumbar karena perbankan cenderung menahan, bahkan menambah permintaan uang kartal untuk menjamin kebutuhan masyarakat selama periode libur panjang akhir tahun dan kebutuhan tahun ajaran baru 2019.

Laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada triwulan I 2019 diproyeksikan melambat pada rentang 4,8 – 5,2% (yoy). Perlambatan ekonomi disebabkan oleh pola aktivitas ekonomi awal tahun yang masih terbatas. Siklus ini diyakini berdampak pada hampir seluruh komponen sisi pengeluaran. Namun demikian, masifnya kebijakan pemerintah yang mendorong peningkatan konsumsi akan menjaga daya beli masyarakat di level yang tinggi. Prediksi yang sama akan terjadi pada sisi penawaran. Masih berlangsungnya masa tanam tanaman pangan dan hortikultura serta masuknya masa trek kelapa sawit mendorong menahan LU pertanian dan perkebunan. Sementara LU perdagangan dan LU transportasi pergudangan juga diprakirakan tumbuh melambat setelah usainya masa libur akhir tahun.

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, laju inflasi di triwulan I 2019 diprakirakan juga melambat dibandingkan prakiraan triwulan sebelumnya, dengan rentang inflasi 2,2% - 2,6% (yoy). Mulai lancarnya pasokan, kondusifnya cuaca dan normalisasi permintaan setelah libur akhir tahun diyakini akan menjadi penyebab utama meredanya tekanan inflasi kelompok bahan pangan. Sementara itu, keputusan pemerintah untuk menurunkan harga BBM non subsidi sebanyak 2 kali sampai dengan bulan kedua di triwulan I 2019 dan penurunan harga avtur untuk industri penerbangan dipercaya akan memengaruhi laju inflasi kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan ke bawah.

D. POTENSI DAERAH

Sumatera Barat, salah satu provinsi di Indonesia di wilayah Pulau Sumatera, dilengkapi dengan keanekaragaman hayati. Dengan kondisi wilayah yang dikelilingi oleh laut dan juga barisan pegunungan, maka mengakibatkan daerah Sumatera Barat dikelilingi oleh hutan hujan tropis, dengan kondisi curah hujan dan kelembaban yang mendukung bagi berbagai jenis tanaman tropis. Oleh karena itu, hampir 70 persen wilayah hutan di Sumatera Barat dijadikan hutan konservasi (32 persen) dan hutan lindung (35 persen). Dukungan Geografi tersebut membuat sektor pertanian menjadi unggulan di Sumatera Barat dari sembilan jenis sektor usaha lainnya.

Tidak hanya hutan, Sumatera Barat juga terkenal dengan bentangan pegunungan Bukit Barisan. Pegunungan Bukit Barisan terbentang dari utara Pulau Sumatera yaitu Nangroe Aceh Darusalam sampai ujung selatan yaitu Lampung, dengan puncak tertinggi Gunung Kerinci yang terbentang di Jambi. Rangkaian Pegunungan Bukit Barisan merupakan rangkaian pergunungan pertemuan dari pelat tektonik Euroasia dan Australia. Pelat

Tektonik tersebut mengandung banyak mineral dan bebatuan. Kondisi geografis alam tersebut memberikan implikasi adanya keanekaragaman batuan yang mungkin mendukung kapasitas produksi daerah. Terkhusus di Sumatera Barat, yang terkenal adalah Pasaman Area, masih dalam eksplorasi diperkirakan memiliki potensi tambang emas.

Sumatera Barat juga dapat dikategorikan sebagai daerah Hinterland untuk beberapa sektor yang dikuasai oleh Sumatera Barat. Hinterland merupakan istilah untuk daerah atau kota yang memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan di daerah lainnya, dengan spesifikasi komoditi tertentu. Kategori Hinterland tersebut dimaksudkan untuk daerah yang memiliki LQ atau *Location Quotient*. LQ menggambarkan seberapa besar porsi kapasitas produksi suatu sektor dapat memenuhi kebutuhan nasional di sektor tersebut. Jika LQ lebih dari 1, maka menandakan bahwa daerah tersebut menjadi Hinterland bagi daerah lain pada sektor tersebut, jika LQ kurang dari satu, maka daerah tersebut masih harus dibantu untuk memenuhi kebutuhan domestik daerah tersebut.

Iklim Sumatera Barat yang sangat mendukung untuk berbagai jenis tanaman dan kekayaan akan hutan hujan tropis, maka dapat diperkirakan bahwa sektor pertanian di Sumatera Barat mampu mendukung kondisi kebutuhan pertanian di daerah lain. Hal ini terbukti dari perkembangan LQ Sumatera Barat dalam sektor pertanian bahan pangan yang meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2005, LQ produksi pertanian bahan pangan menunjukkan angka 0,92, sedangkan pada tahun 2006, LQ melonjak mencapai 2,17, dan diperkirakan terus menguat sampai akhir 2008. Oleh karena itu potensi pertanian dan berbagai keanekaragaman hayati sangat besar dan masih layak untuk dikembangkan, melalui investasi teknologi dan ilmu pengetahuan holtikultura.

Sesuai paparan di atas, kondisi iklim dan cuaca di Sumatera Barat mendukung untuk memiliki kondisi dan kekayaan hutan. Namun, kekayaan keanekaragaman jenis tanaman hutan hujan tropis Sumatera Barat membuat lebih dari 50 persen hutan dijadikan hutan lindung dan konservasi, namun angka LQ masih menunjukkan bahwa Sumatera Barat masih mampu mendukung kebutuhan hasil produksi hutan daerah lain. Pada tahun 2005 LQ produksi pertanian-kehutanan sebesar 2,47, yang artinya Sumatera Barat masih mampu memenuhi kebutuhan hasil produksi hutan oleh daerah lain.

Namun, terjadi penurunan pada tahun 2006, LQ menunjukkan posisi 1,6, sedangkan pertumbuhan hasil hutan mencapai 19,6 persen, sedangkan pada tahun sebelumnya hanya tumbuh 3,7 persen. Kondisi yang kontradiktif ini menunjukkan adanya implikasi perkembangan produksi di sektor lain melampaui perkembangan sektor kehutanan di Sumatera Barat. Walaupun begitu, Sumatera Barat masih mampu menjadi *Hinterland* bagi daerah lain pada sektor hasil sumber daya hayati.

Sumatera Barat memiliki potensi bahan tambang golongan A, B dan C. Bahan tambang golongan A, yaitu batu bara terdapat di Kabupaten Sijunjung dan Kota Sawahlunto.

Sedangkan Bahan tambang golongan B yang terdiri dari air raksa, belerang, pasir besi, tembaga, timah hitam dan perak menyebar di wilayah kabupaten Sijunjung, Solok, Lima Puluh Kota, Pasaman, dan Tanah Datar.

Bahan tambang golongan C menyebar di seluruh kabupaten kota di Sumatera Barat, sebagian besar terdiri dari pasir, batu dan kerikil sedangkan di Padang Pariaman terdapat obsidian dan batu andesit.

Salah satu yang telah banyak memberi manfaat bagi Sumatera Barat adalah batuan kapur sebagai bahan dasar industri semen. PT Semen Padang di Padang telah memanfaatkan kekayaan alam Sumatera Barat ini selama puluhan tahun. Batu kapur banyak terdapat di sekitar Padang, daerah

sekitar Danau Singkarak dan Padang Panjang. Di Padang Panjang saja, deposit batu kapur yang dapat dieksploitasi mencapai 43 juta ton.

Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi pertambangan yang relatif banyak. Barang tambang potensial meliputi :

(a) Barang tambang yang diperoleh dari dalam bumi antara lain : batu bara, pasir besi, bijih timah, bijih nikel, bijih tembaga, bijih bauksit, bijih mangan, bijih emas dan perak, minyak bumi, gas bumi, yodium, belerang dan posfor;

(b) Barang-barang galian antara lain : batu, pasir, kapur, tanah liat, kaolin dan garam (BPS, Sumatera Barat, 2008).

Berikut beberapa komoditi di sektor pertambangan yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Barat yang memiliki potensi untuk dikembangkan, di antaranya adalah :

1. Batu Bara

Potensi Pengembangan Pertambangan Batu Bara yang terdapat di :

1) Daerah Ombilin Kota Sawahlunto dengan cadangan ± 887.449.125 ton, terukur 132.872.875 ton dan tereka 1.076.250 ton. Cadangan batu bara tersebut termasuk cadangan yang layak tambang (*mineable reserve*) di wilayah kuasa pertambangan PT. Tambang Batu Bara Bukit Asam (PTBA) – Unit Pertambangan Ombilin (UPO) sebesar ± 106.875.000 ton (cadangan terbuka ± 4.177.000 ton dan cadangan tambang dalam ± 102.608.000).

2) Daerah Kiliranjao, Kabupaten Sijunjung dengan cadangan ± 8.676.373 ton.

3) Sawah, Kabupaten Sijunjung dengan cadangan 1.702.355 ton.

4) Lubuk Tarab, Kabupaten Sijunjung dengan cadangan hipotetik 121.500 ton.

5) Jujuhan, Sinamar di Kabupaten Sijunjung dengan cadangan terindikasi 65.750.000 ton.
6) Lumpo IV Jurai (Kabupaten Pesisir Selatan) dengan cadangan hipotetik 926.525 ton.
7) Penadah Pacung Soal (Kabupaten Pesisir Selatan) dengan cadangan terukur 2.319.188 ton.
8) Tapan di Kabupaten Pesisir Selatan dengan cadangan 850.000 ton.
9) Daerah Sulit Air, Air Luo, Timbulun, Alahan Panjang, dan Sungai Abu di Kabupaten Solok dengan cadangan belum diketahui.

2. Emas

Potensi Pengembangan Pertambangan Emas yang terdapat di daerah :

1) Kinadam (Pasaman) dengan cadangan ± 537 kg (kadar konsetrat)
2) Balimbing, Bonjol, Silaping, Muaro Tambangan, Tamping, dan Rao Mapat Tunggul di Kabupaten Pasaman cadangan belum diketahui.
3) Manggani dan Pagadis di Kabupaten Lima Puluh Kota cadangan belum diketahui.
4) Lubuk Selasih, talang Babungo, Sungai Abu, Sungai Sapek, Sungai Batang Hari, Supayang, Blangsi di Kabupaten Solok dengan cadangan belum diketahui.
5) Sawah Tembangan, Sungai Dareh, Sungai Batang Hari Kabupaten Dharmasraya.
6) Mundam Sakti/Pelangki, Kabupaten Sijunjung.
7) Salido dan Gunung Harun, Kabupaten Pesisir Selatan cadangan belum diketahui.

3. Biji Besi

Potensi Pengembangan Pertambangan Bijih Besi, antara lain terdapat di daerah :

1) Paninggahan, Lubuk Selasih, Gunung Talang, Air Dingin Lembah Gumanti dan Surian Kabupaten Solok.
2) Bukit Batu Besi Kabupaten Tanah Datar,
3) Palembayan Kabupaten Agam,
4) Batu Manjulur Kabupaten Sijunjung,
5) Bonjol Kabupaten Pasaman.

4. Pasir Besi

Potensi Pengembangan Pertambangan Pasir Besi, antara lain terdapat di daerah :

1) Pantai Sunur di Padang Pariaman dengan kadar besi 2 – 5% dan ketebalan bervariasi antara 2 mm – 10 cm.
2) Pasir Ganting Kec. Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan dengan kadar besi 2 – 5% dan ketebalan 2 mm – 5 cm.
3) Muara Batang Masang Gadang Kabupaten Pasaman Barat dengan kadar besi 3 – 7% dan ketebalan 2 mm – 10 cm.
4) Katiangan Pasaman dengan kadar besi 3 – 5% dan ketebalan 2 mm – 10 cm.

5. Tembaga

Potensi Pengembangan Pertambangan Tembaga, antara lain terdapat di daerah :

1) Timbulun (Kabupaten Solok) dengan kadar Cu = 12%,
2) Lubuk Selasih (Kabupaten Solok) dengan kadar Cu = 0,9 – 1,3%,
3) Paninggahan X Kota Singkarak (Kabupaten Solok) dengan cadangan belum diketahui,
4) Sei. Pagu Kabupaten Solok Selatan dengan cadangan 5.000 ton (hipotetik) dan kadar Cu = 0,20 – 0%.

6. **Mangan**

   Potensi Pengembangan Pertambangan Mangan, antara lain terdapat didaerah Kabupaten Solok (Bukit Sileh, Gunung Talang, Bali Bawah, Batu Bajanjang) dengan cadangan belum diketahui. Terdapat pula di daerah Gunung Marapi (Kabupaten Agam dan Tanah Datar).dengan cadangan hipotetik ± 100 ton.

7. **Timah Hitam**

   Potensi Pengembangan Pertambangan Timah Hitam yang antara lain terdapat di daerah :

   1) Tanjung Balit di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan cadangan terukur ± 322.575 ton dan tereka ± 287.250 ton.
   2) Lubuk Gadang (Kabupaten Solok) cadangan hipotetik ± 280.000 ton.
   3) Lubuk Selasih, Talang Kabupaten Solok cadangan belum diketahui.
   4) Sungai Pagu, Sangir Kabupaten Solok Selatan,
   5) Sumpu, Pamanongan, Sungai Alai Kabupaten Pasaman cadangan belum diketahui.

8. **Belerang**

   Potensi Pengembangan Pertambangan Belerang, antara lain terdapat di daerah Kabupaten Solok (Bukit Sileh, Gunung Talang, Bali Bawah, Batu Bajanjang) cadangan belum diketahui, dan Gunung Marapi (Agam dan Tanah Datar) cadangan hipotetik ± 100 ton.

9. **Air Raksa**

   Potensi Pengembangan Pengolahan Air Raksa, antara lain terdapat di daerah Gade Talang, Sungai Tapir dan Sibalabu, Kabupaten Sijunjung cadangan belum diketahui. Dan terdapat Bahan Galian Industri.

10. Batu Gamping/Batu Kapur

Potensi Pengembangan Pertambangan Batu Gamping/Batu Kapur antara lain terdapat di daerah :

1) Kamang (Kabupaten Agam) tersebar pada area 2.660 ha, Simarasap tersebar pada area 2.660 ha dan daerah Baso Kabupaten Agam tersebar pada area 120 ha.
2) Indarung Kota Padang dengan cadangan tereka 500.000.000 ton, terukur 400.461.775 ton, terindikasi 13.000.000 ton.
3) Silungkang Kota Sawahlunto tersebar pada area 1.155,69 ha. Di Tanjung Lolo tersebar pada area 8.926,43 ha.
4) Gadang, Kabupaten Sijunjung tersebar pada area 596,29 ha.
5) Muaro, Kecamatan Sijunjung tersebar pada area 2.977,09 ha.
6) Sumpur Kudus (Kab. Sijunjung) tersebar pada area 8.618,99 ha.
7) Tungkar (Kabupaten Lima Puluh Kota) tersebar pada area 585,38 ha.
8) Halaban (Kabupaten Lima Puluh Kota) tersebar pada area 1.312,42 ha.
9) Sitanang (Kabupaten Lima Puluh Kota) tersebar pada area 27,37 ha.
10) Batuhampar (Kabupaten Lima Puluh Kota) tersebar pada area 143,56 ha.
11) Siguntur (Kabupaten Pesisir Selatan) tersebar pada area 5 ha.
12) Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok tersebar pada area seluas 2.435,29 ha.
13) Kecamatan X Koto Singkarak tersebar pada area seluas 691,30 ha.
14) Kecamatan IX Koto Sungai Lasi tersebar pada area seluas 332,62 ha.
15) Muara Kiawai (Kabupaten Pasaman Barat) tersebar pada area 2.500 ha.
16) Kajai (Kabupaten Pasaman) pada area 100 ha.

11. Dolomit

Potensi Pengembangn Dolomit yang antara lain terdapat di daerah :

1) Tanjung Lolo (Kabupaten Sijunjung) dengan cadangan belum diketahui.
2) Mudik Palupuh (Kabupaten Agam) dengan cadangan belum diketahui.
3) Lembah Gumati (Kabupaten Solok) dengan cadangan belum diketahui.
4) Taraktak di Kabupaten Sijunjung dengan cadangan belum diketahui.

12. Batu Marmer

Potensi Pengembangan Batu Marmer terdapat di daerah :

1) Sibiluru (Kabupaten Sijunjung) dengan cadangan hipotetik 62.500.000 ton.
2) Tanjung Lolo dengan cadangan belum diketahui.
3) Takung di Kabupaten Sijunjung dengan cadangan belum diketahui.
4) Silungkang di Sawahlunto dengan cadangan belum diketahui.
5) Palupuh dan Matur di Kabupaten Agam dengan cadangan hipotetik 62.500.000 ton.
6) Sitanang dengan cadangan hipotetik 1.249.792 ton.
7) Daerah Tungkur di Kabupaten 50 Kota dengan cadangan 37.500.000 ton.
8) Daerah Muara Kiawai di Kabupaten Pasaman Barat dengan cadangan hipotetik 187.500.000 ton.

13. Batu Granit

Program Pengembangan Pertambangan Batu Granit di daerah :

1) Air Bangis di Kabupaten Pasaman Barat dengan cadangan hipotetik 6.000.000.000 ton.
2) Panti Kabupaten Pasaman dengan cadangan hipotetik 300.000.000.000 ton.
3) Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung dengan cadangan hipotetik 250.000.000.000 ton.
4) Padang Ganting di Kabupaten Tanah Datar dengan cadangan hipotetik 25.000.000.000 ton.
5) Ombilin dengan cadangan hipotetik 800.000.000 ton.
6) Salibutan di Kabupaten Padang Pariaman dengan cadangan hipotetik 1.300.000.000 ton.
7) Lembah Anai di Kabupaten Tanah Datar dengan cadangan hipotetik 22.500.000.000 ton.
8) Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya dengan cadangan hipotetik 937.000.000.000 ton.

14. Andesit dan Basalt

Potensi Pengembangan Pertambangan Andesit dan Basalt di daerah Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota dengan cadangan belum diketahui dan mutu baik, dan Sungai Sirah Kabupaten Pesisir Selatan.

15. Feldspar

Potensi Pengembangan Feldspar di daerah Lundar di Kabupaten Pasaman dengan cadangan dan mutu belum diketahui, dan di daerah Sulit Air di Kabupaten Solok juga dengan cadangan dan mutu belum diketahui.

16. Batu Apung

Potensi Pengembangan Pertambangan Batu Apung (Purnice) terdapat di beberapa daerah, seperti :

1) Sicincin (Kabupaten Padang Pariaman) dengan cadangan dan mutu belum diketahui.
2) Sungai Limau di Kabupaten Padang Pariaman dan di daerah Ngarai Sianok di Kabupaten Agam dengan cadangan dan mutu belum diketahui.

17. Batu Tulis

Potensi Pengembangan Pertambangan Batu Tulis (Slate) terdapat di daerah :

1) Talang Babungo dan Tanjung Balit di Lembah Gumanti di Solok dengan cadangan hipotetik masing-masing 1.750.000 ton dan 6.250.000 ton.
2) Taratak Kabupaten Sijunjung dengan cadangan hipotetik 1.875.000 ton.

18. Obisidian

Potensi Pengembangan Pertambangan Obisidian antara lain terdapat di daerah :

1) Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman jumlah cadangan belum diketahui.
2) Singkarak di Solok jumlah cadangan 3.537.500 ton, dan tereka 3.125.000 ton, dengan minimum ekspansi 8,5%.
3) Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman jumlah cadangan belum diketahui.
4) Simabur Kabupaten Tanah Datar jumlah cadangan belum diketahui.

19. Perlit

Potensi Pengembangan Pertambangan Perlit terdapat di daerah :

1) Bukit Rasam Kabupaten Pasaman dengan ekspansi minimum 50% dan ekspansi maksimum 251,51%.

2) Bukit Batu Kambing di Solok dengan ekspansi minimum 50% dan ekspansi maksimum 63,15%.
3) Sungai Geringging di Kabupaten Padang Pariaman jumlah cadangan belum diketahui.

20. Trass

Potensi Pengembangan Pertambangan Trass terdapat di daerah :

1) Matur di Kabupaten Agam dengan cadangan hipotetik sebesar 4.375 ton.
2) Sicincin di Kabupaten Padang Pariaman cadangan hipotetik sebesar 81.250.000 ton.
3) Batipuh Kabupaten Tanah Datar cadangan hipotetik sebesar 1.250.000 ton.
4) Piladang di Kabupaten Payakumbuh cadangan hipotetik sebesar 11.013.750 ton.

21. Kaolin

Potensi Pengembangan Pertambangan Kaolin antara lain terdapat di daerah :

1) Bonjol di Kabupaten Pasaman dengan cadangan terindikasi 20.265.000 ton tersebar pada areal seluas 140 ha dengan kemurnian 30%.
2) Mudik Palupuh di Kabupaten Agam dengan cadangan belum diketahui.
3) Lembah Gumanti di Solok dengan cadangan belum diketahui.
4) Taratak di Kabupaten Sijunjung dengan cadangan belum diketahui.

22. Lempung/Tanah Liat (clay)

Sedang Potensi Pengembangan Lempung/Tanah Liat (clay) terdapat di daerah :

1) Kabupaten Pesisir Selatan dengan cadangan hipotetik 4.625.000 ton.
2) Kabupaten Solok dengan cadangan hipotetik 750.000 ton.
3) Kabupaten Sijunjung dengan cadangan hipotetik 4.250.000 ton.
4) Kabupaten Tanah Datar dengan cadangan hipotetik 1.250.000 ton.
5) Kabupaten Lima Puluh Kota dengan cadangan hipotetik 5.375.000 ton.
6) Kabupaten Agam dengan cadangan hipotetik 1.875.000 ton.
7) Kabupaten Padang Pariaman dengan cadangan hipotetik 375.000 ton.
8) Kabupaten Pasaman dengan cadangan hipotetik 1.500.000 ton.
9) Indarung (Kota Padang) dengan cadangan terukur 10.319.272 ton.
10) Kota Solok dengan cadangan hipotetik 125.000 ton.
11) Kota Padang Panjang dengan cadangan hipotetik 62.500 ton.
12) Kota Sawahlunto dengan cadangan hipotetik 2.125.000 ton.

23. Rijang

Potensi Pengembangan Rijang di daerah Indarung Lubuk Kilangan Kota Padang hipotetik sebesar 3.720.753 ton.

24. Oker

Potensi Pengembangan Oker di daerah Muaro Labuh Solok Selatan jumlah cadangan belum diketahui, dan Tanjung Gadang di Kabupaten Sijunjung jumlah cadangan belum diketahui.

25. Pasir Kuarsa

Potensi Pasir Kuarsa terdapat di daerah :

1) Saruaso Kec. Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar dengan cadangan hipotetik 3.000.000 ton.
2) Sungai Nyalo Kec XI Terusan Kabupaten Pesisir Selatan dengan cadangan hipotetik 93.750 ton.

3) Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung dengan cadangan hipotetik 62.500.000 ton.

26. Fosfat

Potensi Pengembangan Fosfat terdapat di daerah :

1) Ngalau Sirangkiang, Ulu Air, Guo Pintu di Kabupaten Tanah Datar dengan mutu belum diketahui.
2) Ngalau Bunian, Biaro di Kabupaten Agam dengan cadangan dan mutu belum diketahui.
3) Indarung Lubuk Kilangan Kota Padang jumlah cadangan dan mutu belum diketahui pula.

27. Tawas

Potensi Pengembangan Tawas terdapat di daerah Bonjol Kabupaten Pasaman dengan cadangan hipotetik 20.875 ton dan Bayang di Kabupaten Pesisir Selatan dengan cadangan hipotetik sebesar 9.375 ton.

Sumatera Barat masih membutuhkan investasi di pertambangan, 70 persen dari seluruh daerah di Sumatera Barat didominasi oleh bagian bentangan pegunungan Bukit Barisan. Mengingat Bukit Barisan merupakan jenis lempengan tektonik, maka sudah dapat diperkirakan bumi Sumatera Barat kaya akan sumber mineral batuan. Salah satu indikasinya adalah adanya pabrik Semen Padang di Sumatera Barat, yang menunjukkan bahwa adanya sumber batuan kapur.

Beberapa daerah yang terkenal dengan hasil pertambangan tembaga, timah dan peraknya adalah area Sawahlunto dan Kabupaten Tanah Datar. Tanah Datar pada tahun 2005 berhasil membukukan nilai produksi batuan kapur sebesar Rp. 123 juta hanya untuk satu kabupaten.

Sawahlunto pernah menjadi tulang punggung perekonomian Sumatera Barat dengan spesifikasi batu bara. Kondisi topografi Sawahlunto

yang terdiri dari perbukitan yang terjal mendukung untuk dikembangkannya areal pertambangan batu bara.

Dari seluruh penggunaan tanah di Sawahlunto, sebenarnya areal pertambangan hanya memanfaatkan sebesar 3,25 persen, dan terluas adalah penggunaan untuk pertanian. Namun, dengan areal yang sedikit tersebut mampu memiliki cadangan yang siap diproduksi sebesar 53.176 juta ton batu bara, yang dihasilkan dari empat blok pertambangan, telah melampaui kebutuhan domestik Sumatera Barat sendiri yang berkisar pada angka 1,3 juta ton/tahun. Kondisi ini memberikan implikasi masih kurangnya investasi di bidang pertambangan di Sawahlunto untuk meningkatkan hasil produksi batu baranya.

Data BPS menunjukkan rata-rata nilai produksi batu bara Sumatera Barat mencapai nilai 212 milyar rupiah, dengan kondisi masih jauh dibawah potensial daerah. Oleh karena itu, masih besar potensi pertambangan yang harus dieksplorasi di Sumatera Barat.

Keindahan alam dan budaya Minangkabau di Provinsi Sumatera Barat sudah terkenal dan mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai objek pariwisata. Umumnya tiap Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat mempunyai obyek pariwisata minimal satu kategori yang potensi untuk dijadikan daerah tujuan wisata alam dan budaya.

Kategori dari obyek pariwisata ini dapat berupa obyek pemandangan alam dari pantai seperti Teluk Bayur, wilayah pegunungan yang sangat mempesona, danau, ngarai dan lembah atau obyek kebudayaan.

Tujuan wisata budaya di Sumatera Barat mempunyai prospek yang tinggi untuk dikembangkan, dimana kekayaan budaya Minangkabau seperti rumah gadang maupun kebudayaan suku Mentawai termasuk salah satu yang unik di nusantara dan dapat menjadi salah satu daerah tujuan wisata yang menarik untuk dikunjungi.

Provinsi Sumatera Barat memiliki berbagai jenis daerah dan tempat wisata antara lain : Danau Singkarak (terbesar di Sumatera Barat), Danau Maninjau, Danau Kembar, Ngarai Sianok, Lembah Anai, Lembah Harau maupun pulau Cubadak.

Di sektor pariwisata, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, di Sumatera Barat telah ditetapkan 2 Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) yaitu DPN Mentawai Mentawai-Siberut dan Sekitarnya dan DPN Padang-Bukittinggi dan Sekitarnya. Dari 2 DPN tersebut telah ditetapkan 10 Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) yaitu :

1. KPPN Siberut dan sekitarnya.
2. KPPN Sipora dan sekitarnya.
3. KPPN Pagai Utara dan sekitarnya.
4. KPPN Padang dan sekitarnya.
5. KPPN Bukittinggi dan sekitarnya.
6. KPPN Singkarak dan sekitarnya.
7. KPPN Batusangkar dan sekitarnya.
8. KPPN Maninjau dan sekitarnya.
9. KPPN Sawahlunto dan sekitarnya.
10. KPPN Pesisir Selatan dan sekitarnya.

Dengan telah ditetapkannya secara normatif potensi yang dimiliki Sumatera Barat di bidang kepariwisataan oleh Pemerintah Pusat, maka kedepan arah pengembangan kepariwisataan oleh Pemerintah Daerah akan semakin jelas. Kekhasan wilayah geografi dan bentuk topografi, mulai dari daerah pesisir pantai, pulau-pulau, sampai dengan daerah dataran tinggi,

pegunungan, danau dan sungai menjadi potensi pengembangan pariwisata Sumatera Barat.

Keunikan wilayah Sumatera Barat didukung pula oleh iklim tropis sebagai daerah perlintasan garis khatulistiwa. Keindahan alami hutan tropis dan keelokan pemandangan jajaran perbukitan, sawah dan ladang di sepanjang jalan yang menghubungkan antar daerah dan wilayah Sumatera Barat telah didukung dengan sarana prasarana jalan dan transportasi yang memadai, menjadi bagian dari potensi pengembangan pariwisata.

Penduduk Sumatera Barat yang ramah, religius dan terbuka menganut nilai-nilai matriakat yang berbeda dengan masyarakat daerah lainnya di Indonesia yang menganut sistim patriakat. Keunikan lokal seperti ini dan hal lainnya yang terkait budaya, kesenian, kearifan lokal, kuliner dan peran sejarah dalam kemerdekaan RI telah memperkaya potensi wisata Sumatera Barat. Dengan beragamnya objek dan tujuan wisata yang dapat dikunjungi serta dinikmati di Sumatera Barat, maka pariwisata berpotensi sebagai lokomotif dalam percepatan pembangunan daerah.

Berdasarkan Data BPS, Jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang datang ke Sumatera Barat melalui Bandara Internasional Minangkabau (BIM) bulan Desember 2018 mencapai 4.801 orang, mengalami penurunan 6,19 persen dibanding wisman November 2018 yang tercatat sebanyak 5.118 orang.

Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang di Sumatera Barat bulan Desember 2018 mencapai rata-rata 58,59 persen; mengalami penurunan 6,76 poin dibanding TPK bulan November 2018 sebesar 65,35 persen.

Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Akomodasi Lainnya di Sumatera Barat bulan Desember 2018 mencapai rata-rata 34,39 persen; mengalami peningkatan 2,15 poin dibanding bulan November 2018 sebesar 32,24 persen.

BAB III
SUMBER DATA DAN KOMPONEN KEPENDUDUKAN

A. SUMBER DATA

Hasil dari pemanfaatan database kependudukan pada dasarnya mencakup struktur umur, komposisi dan persebaran penduduk. Dari struktur umur dapat diturunkan (dihitung) berbagai indikator seperti umur median (*median age*), rasio jenis kelamin (*sex ratio*), piramida penduduk, rasio ketergantungan (*dependency ratio*), dan indikator lainnya. Dari komposisi penduduk, database kependudukan dapat memberikan informasi dari aspek sosial seperti pendidikan, status perkawinan, agama dan status hubungan dalam rumah tangga. Sedangkan dari aspek penyebaran penduduk memperlihatkan bagaimana distribusi penduduk menurut Kabupaten/Kota.

Adapun database kependudukan yang telah diolah ini bersumber dari database Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang terintegrasi dengan database e-KTP dan telah dibersihkan (dikonsolidasikan) secara nasional oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri untuk posisi per 31 Desember 2018 dan data yang berasal dari OPD dan Instansi teknis (lintas sektor) terkait yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Sosial, dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat.

Publikasi informasi perkembangan kependudukan berupa jumlah penduduk, struktur dan komposisi penduduk, distribusi dan kepadatan penduduk. Komposisi penduduk dapat berupa data kuantitas penduduk mencakup bidang kependudukan, pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan,

sosial dan administrasi kependudukan dilakukan secara periodik untuk memberikan informasi pada stakeholder disetiap level pemerintahan.

B. KOMPONEN KEPENDUDUKAN

1. Kuantitas Penduduk

Komposisi dan Persebaran Penduduk

Bagian ini menjelaskan mengenai komposisi dan persebaran (distribusi) penduduk dilihat dari berbagai aspek atau karakteristik.

Penduduk dapat dikelompokkan menurut karakteristik tertentu, seperti kelompok umur, karakteristik sosial ekonomi, dan persebaran atau distribusi tempat tinggalnya.

Pengelompokan ini sangat berguna untuk :

- Mengetahui jumlah sumber daya manusia yang ada menurut umur, jenis kelamin maupun karakteristik lainnya.
- Mengembangkan suatu kebijakan yang berhubungan dengan pembangunan berwawasan kependudukan.
- Menyediakan sarana dan prasarana serta fasilitas yang diperlukan.
- Membandingkan keadaan suatu penduduk dengan keadaan penduduk lainnya.
- Mengetahui "proses demografi" yang telah terjadi pada penduduk melalui piramida penduduk.

Komposisi penduduk berdasarkan ciri-ciri atau karakteristik tertentu dapat diklasifikasikan menurut :

- Karakteristik demografi, seperti umur, jenis kelamin, jumlah wanita usia subur, dan jumlah anak.
- Karakteristik sosial, antara lain tingkat pendidikan dan status perkawinan.

- Karakteristik ekonomi, antara lain kegiatan penduduk yang aktif secara ekonomi, lapangan usaha, status dan jenis pekerjaan, serta tingkat pendapatan.
- Karakteristik geografis atau persebaran, antara lain berdasarkan tempat tinggal, daerah perkotaan-pedesaan, kecamatan, provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Sedangkan persebaran (distribusi) penduduk adalah kondisi sebaran penduduk menurut keruangan. Sementara itu, penyebaran adalah upaya mengubah persebaran penduduk agar serasi, selaras, dan seimbang dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Persebaran penduduk (distribusi penduduk) dibedakan menjadi dua, yaitu :

- Persebaran penduduk secara geografis.
- Persebaran penduduk berdasarkan administrasi pemerintahan.

a. Komposisi Penduduk Menurut Karakteristik Demografi

Karakteristik penduduk sangat berpengaruh terhadap proses demografi dan tingkah laku sosial ekonomi. Karakteristik penduduk yang paling penting adalah umur dan jenis kelamin. Distribusi penduduk menurut umur dikelompokan menurut umur satu tahunan atau umur tunggal (*single age*) dan lima tahunan, namun dapat juga dikelompokkan menurut distribusi umur tertentu sesuai dengan kebutuhan, seperti pengelompokan penduduk menurut usia sekolah (SD = 7-12 tahun; SLTP = 13-15 tahun; SLTA = 16-18 tahun; dan Perguruan Tinggi = 19-24 tahun).

Selain pengelompokan berdasarkan distribusi umur penduduk, terdapat juga pengelompokan penduduk berdasarkan struktur

umur penduduk yang dikelompokan menjadi 3 (tiga) kelompok besar, yaitu :

- Penduduk usia muda, yaitu penduduk usia dibawah 15 tahun atau kelompok umur 0-14 tahun.
- Penduduk usia produktif, yaitu penduduk umur 15-64 tahun.
- Penduduk usia lanjut, yaitu penduduk umur 65 tahun keatas (mengikuti ketetapan WHO).

Struktur penduduk menurut umur dapat digunakan untuk mengetahui apakah penduduk di suatu wilayah termasuk kelompok umur muda atau tua. Penduduk suatu wilayah dianggap penduduk muda apabila jumlah penduduk yang berumur dibawah 15 tahun mencapai sebesar 40 persen atau lebih.

Suatu daerah yang mempunyai karakteristik penduduk muda membutuhkan investasi sosial ekonomi yang berbeda dengan investasi untuk kelompok penduduk tua. Kelompok penduduk muda membutuhkan fasilitas pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sandang dan lain sebagainya. Sementara kelompok penduduk tua tidak membutuhkan fasilitas pendidikan, tetapi fasilitas untuk ketenagakerjaan, kesehatan, kebutuhan sosial lainnya dan lain sebagainya.

Indikator yang menunjukan komposisi penduduk menurut karakteristik demografi adalah :

- Umur median (*median age*)
- Rasio jenis kelamin (*sex ratio*)
- Rasio ketergantungan atau rasio beban tanggungan (*dependency ratio*)

1) Jumlah Penduduk

Pertumbuhan penduduk merupakan keseimbangan dinamis antara kekuatan-kekuatan yang menambah dan mengurangi jumlah penduduk di suatu wilayah, dimana pertumbuhan penduduk tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan alamiah dan migrasi neto. Secara terus menerus jumlah penduduk akan dipengaruhi oleh banyaknya bayi yang lahir (menambah jumlah penduduk), tetapi disisi lain akan dikurangi oleh jumlah kematian yang terjadi pada semua kelompok umur. Sementara itu migrasi juga berperan dalam mempengaruhi jumlah dimana penduduk imigran (pendatang) akan menambah dan emigran (penduduk yang keluar) akan mengurangi jumlah penduduk. Jadi, pertumbuhan penduduk diakibatkan oleh tiga komponen demografi, yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi (masuk/*inmigration* dan keluar/*outmigration*). Selisih antara fertilitas dan mortalitas disebut perubahan reproduktif (*reproductive change*) atau pertumbuhan alamiah (*natural growth*), sedangkan selisih antara migrasi masuk dan migrasi keluar disebut migrasi neto (*net migration*).

Namun, dengan telah berjalannya sistem registrasi penduduk melalui pelayanan pendaftaran penduduk, maka data jumlah penduduk dapat diketahui secara langsung dari database kependudukan pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan telah dibersihkan (dikonsolidasikan) oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri setiap 6 (enam) bulan sekali dan menjadi Data Konsolidasi Bersih (DKB).

Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Barat menurut Wilayah dan Jenis Kelamin per 31 Desember 2018 dapat dilihat pada Tabel 3 dibawah ini :

Tabel 3.
Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Barat menurut Wilayah
Dan Jenis Kelamin per 31 Desember 2018

Kode Wilayah	Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin					
		Laki-Laki	%	Perempuan	%	Total	%
1301	Kabupaten Pesisir Selatan	257.040	9,24	251.651	9,20	508.691	9,22
1302	Kabupaten Solok	193.310	6,95	190.781	6,97	384.091	6,96
1303	Kabupaten Sijunjung	120.283	4,32	116.627	4,26	236.910	4,29
1304	Kabupaten Tanah Datar	186.052	6,69	184.941	6,76	370.993	6,72
1305	Kabupaten Padang Pariaman	213.647	7,68	214.272	7,83	427.919	7,75
1306	Kabupaten Agam	266.512	9,58	262.107	9,58	528.619	9,58
1307	Kabupaten Lima Puluh Kota	189.915	6,83	190.258	6,95	380.173	6,89
1308	Kabupaten Pasaman	161.047	5,79	157.332	5,75	318.379	5,77
1309	Kabupaten Kepulauan Mentawai	45.563	1,64	41.954	1,53	87.517	1,59
1310	Kabupaten Dharmasraya	107.968	3,88	104.685	3,83	212.653	3,85
1311	Kabupaten Solok Selatan	92.343	3,32	88.562	3,24	180.905	3,28
1312	Kabupaten Pasaman Barat	219.221	7,88	212.354	7,76	431.575	7,82
1371	Kota Padang	452.674	16,27	448.248	16,38	900.922	16,32
1372	Kota Solok	37.072	1,33	36.542	1,34	73.614	1,33
1373	Kota Sawahlunto	33.362	1,20	33.015	1,21	66.377	1,20
1374	Kota Padang Panjang	29.124	1,05	28.643	1,05	57.767	1,05
1375	Kota Bukittinggi	60.975	2,19	60.615	2,21	121.590	2,20
1376	Kota Payakumbuh	69.539	2,50	68.253	2,49	137.792	2,50
1377	Kota Pariaman	46.929	1,69	45.829	1,67	92.758	1,68
	Sumatera Barat	**2.782.576**	**100,00**	**2.736.669**	**100,00**	**5.519.245**	**100,00**

Sumber : Data Kependudukan Bersih (DKB) Semester II Tahun 2018 (diolah)

Jika diperhatikan menurut jenis kelamin, nampak bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan dan gambaran ini terlihat pada hampir semua Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat, hanya Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Lima Puluh Kota yang memiliki jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit dibandingkan jumlah penduduk perempuan.

2) ***Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin***

Informasi tentang jumlah penduduk menurut jenis kelamin, penting diketahui terutama untuk mengetahui banyaknya orang yang tinggal di suatu wilayah pada waktu tertentu. Selain itu, jumlah dan proporsi penduduk menurut umur dan jenis kelamin dapat digunakan untuk merencanakan pelayanan sosial ekonomi seperti pendidikan, kesehatan, sandang, pangan dan papan serta kebutuhan sosial dasar lainnya sesuai kelompok umur penduduk. Informasi jumlah dan proporsi umur penduduk dapat disajikan dalam bentuk tabel, grafik atau piramida penduduk, sehingga memudahkan untuk menginterpretasikan informasi tersebut.

Distribusi penduduk menurut umur dan jenis kelamin dapat disajikan dalam bentuk tabel menurut umur tunggal, kelompok umur lima tahunan atau kelompok umur yang sesuai dengan kebutuhan seperti pengelompokan umur usia sekolah.

Jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat menurut kelompok umur dan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 4, yang menunjukan bahwa penduduk Provinsi Sumatera Barat kondisi per 31 Desember 2018 sebagian besar merupakan penduduk usia produktif yaitu pada kelompok umur antara 15-64 tahun dengan komposisi terbesar berada pada penduduk berumur 15-19 tahun. Demikian pula dengan komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin, nampak bahwa baik penduduk laki-laki maupun penduduk perempuan yang terbesar berada pada kelompok umur 10-14 tahun. Kondisi ini sangat menguntungkan karena sebagian besar (diatas 50 persen) yaitu sebesar 67,49 persen

merupakan penduduk usia kerja (usia produktif), dan sisanya sebanyak 25,90 persen merupakan penduduk usia muda (berusia dibawah 15 tahun) dan 6,61 persen merupakan penduduk lanjut usia (65 tahun ke atas).

Tabel 4.
Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Barat menurut Kelompok Umur
Dan Jenis Kelamin Per 31 Desember 2018

Kelompok Umur	Jenis Kelamin (Jiwa)				Total (Jiwa)	
	Laki-Laki		Perempuan			
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
00-04	194.508	6,99	180.108	6,58	374.616	6,79
05-09	267.030	9,60	247.795	9,05	514.825	9,33
10-14	279.707	10,05	260.358	9,51	540.065	9,79
15-19	274.763	9,87	259.114	9,47	533.877	9,67
20-24	253.545	9,11	239.971	8,77	493.516	8,94
25-29	210.791	7,58	198.584	7,26	409.375	7,42
30-34	213.078	7,66	203.576	7,44	416.654	7,55
35-39	210.466	7,56	200.631	7,33	411.097	7,45
40-44	185.372	6,66	184.520	6,74	369.892	6,70
45-49	162.262	5,83	165.029	6,03	327.291	5,93
50-54	139.589	5,02	148.793	5,44	288.382	5,23
55-59	121.762	4,38	131.745	4,81	253.507	4,59
60-64	105.786	3,80	115.679	4,23	221.465	4,01
65-69	72.346	2,60	75.574	2,76	147.920	2,68
70-74	36.809	1,32	47.338	1,73	84.147	1,52
> 75	54.762	1,97	77.854	2,84	132.616	2,40
Jumlah	**2.782.576**	**100,00**	**2.736.669**	**100,00**	**5.519.245**	**100,00**

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2018 (diolah)

Penduduk berusia kurang dari 15 tahun cukup besar pula yaitu seperempat penduduk Provinsi Sumatera Barat berjumlah 1.429.506 jiwa (25,90 persen). Hal ini harus menjadi perhatian karena 5 tahun mendatang kelompok ini akan menjadi entry tenaga kerja baru, yang memerlukan skill dan kualitas SDM yang memadai baik keterampilan maupun etos kerja dan

kepribadian. Untuk memperoleh hal tersebut, diperlukan asupan gizi yang cukup, pendidikan yang memadai serta lingkungan pergaulan yang positif, baik di rumah maupun di masyarakat sehingga ketika mereka memasuki pasar kerja, mampu bersaing memperoleh peluang kerja yang tersedia. Disisi lain diharapkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat harus mampu pula menciptakan lapangan pekerjaan yang dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi.

Jika dicermati lebih lanjut, ternyata 374.616 jiwa(6,79 persen) penduduk Provinsi Sumatera Barat kondisi per 31 Desember 2018 merupakan balita. Kondisi ini juga menuntut perhatian Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam penanganan penduduk balita terutama dari segi kesehatan dan investasi bidang pendidikan.

a) Umur Median (*Median Age*)

Kegunaan dari umur median adalah untuk mengukur tingkat pemusatan penduduk pada kelompok-kelompok umur tertentu.

Berdasarkan umur median ini, penduduk di suatu daerah dikategorikan :

- Penduduk muda, jika umur median kurang dari 20 tahun.
- Penduduk intermediate, jika umur median antara 20-30 tahun.
- Penduduk tua, jika umur median lebih dari 30 tahun.

Tabel 5.
Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2018

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk	Kumulatif (fx)	% Kumulatif
00-04	374.616	374.616	6,79
05-09	514.825	889.441	16,12
10-14	540.065	1.429.506	25,90
15-19	533.877	1.963.383	35,57
20-24	493.516	2.456.899	44,52
25-29	409.375	2.866.274	51,93
30-34	416.654	3.282.928	59,48
35-39	411.097	3.694.025	66,93
40-44	369.892	4.063.917	73,63
45-49	327.291	4.391.208	79,56
50-54	288.382	4.679.590	84,79
55-59	253.507	4.933.097	89,38
60-64	221.465	5.154.562	93,39
65-69	147.920	5.302.482	96,07
70-74	84.147	5.386.629	97,60
> 75	132.616	5.519.245	100,00
JUMLAH	5.519.245		

Sumber : DKB Semester II 2018 (diolah)

Berdasarkan Tabel 5, dapat dihitung umur median (*median age*) di Provinsi Sumatera Barat yaitu sebagai berikut :

$$\text{Umur Median (Md)} = I_{Md} + \left(\frac{\frac{N}{2} - f_x}{f_{Md}} \times i \right)$$

$$\text{Umur Median (Md)} = 25 + \left(\frac{2.759.623 - 2.456.899}{409.375} \times 5 \right)$$

Umur Median (Md) = 25 + 3,70

Umur Median (Md) **= 28,70 tahun**

Keterangan :

I_{Md} = Batas bawah kelompok umur yang mengandung N/2

N = Jumlah penduduk total
f_x = Jumlah penduduk kumulatif sampai dengan kelompokumur yang mengandung N/2
f_{Md} = Jumlah penduduk pada kelompok umur dimana terdapat nilai N/2
i = Kelas interval umur

Dengan demikian, umur median penduduk Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2018 adalah 28,70 tahun, yang berarti setengah penduduk Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2018 berusia dibawah 28,70 tahun dan setengahnya lagi berusia lebih tua dari 28,70 tahun. Umur median ini terletak diantara 20-30 tahun. Dengan kata lain, penduduk Provinsi Sumatera Barat dikategorikan sebagai penduduk *intermediate* yaitu transisi dari muda (*young population*) ke penduduk tua (*old population*).

b) Rasio Jenis Kelamin (*Sex Ratio*)

Rasio Jenis Kelamin (RJK), biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan.

Besar kecilnya rasio jenis kelamin ini dipengaruhi oleh :

- Rasio jenis kelamin waktu lahir (*sex ratio at birth*), biasanya perbandingan antara bayi laki-laki dan perempuan pada waktu lahir berkisar antara 103-105 bayi laki-laki per 100 bayi perempuan.
- Pola mortalitas antara penduduk laki-laki dan perempuan.
- Pola migrasi antara penduduk laki-laki dan perempuan.

Informasi tentang rasio jenis kelamin dapat disajikan menurut kelompok umur maupun wilayah dalam bentuk

tabel maupun grafik. Informasi ini dapat berguna untuk perencanaan pembangunan berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil. Selain itu, informasi rasio jenis kelamin juga penting diketahui oleh para politisi, terutama untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam parlemen.

Rasio jenis kelamin berdasarkan wilayah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2018 dan rasio jenis kelamin berdasarkan kelompok umur Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2018 tersaji pada Tabel 6 dan Tabel 7.

Dari kedua tabel tersebut nampak bahwa Rasio Jenis Kelamin (RJK) atau *Sex Ratio* di Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2018 adalah 101,68 yang berarti bahwa dari setiap 100 penduduk perempuan terdapat 101-102 orang penduduk laki-laki. Namun demikian, jika dilihat dari kelompok umur menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan cendrung lebih besar berada pada kelompok umur 45 tahun ke atas. Hal ini diduga disebabkan penduduk laki-laki lebih banyak yang bermigrasi dibandingkan dengan penduduk perempuannya. Sedangkan jika dilihat pada kelompok umur 0-4 tahun sebesar 108,00 yang artinya terdapat 108 balita berjenis kelamin laki-laki dari 100 balita perempuan. Secara biologis jumlah kelahiran bayi laki-laki pada umumnya lebih besar dibanding dengan kelahiran bayi perempuan, namun bayi laki-laki lebih rentan terhadap kematian dibanding bayi perempuan. Rasio jenis kelamin pada kelompok umur diatas 60 tahun juga menunjukkan

penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Ini menunjukkan bahwa teori yang mengatakan bahwa umur harapan hidup perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki adalah benar, karena secara biologis umur harapan hidup perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki.

Tabel 6.
Rasio Jenis Kelamin Menurut Wilayah Provinsi Sumatera Barat
Per 31 Desember 2018

No	Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin (Jiwa)		Total (Jiwa)	Sex Ratio
		Laki-Laki	Perempuan		
1	Kabupaten Pesisir Selatan	257.040	251.651	508.691	102,14
2	Kabupaten Solok	193.310	190.781	384.091	101,33
3	Kabupaten Sijunjung	120.283	116.627	236.910	103,13
4	Kabupaten Tanah Datar	186.052	184.941	370.993	100,60
5	Kabupaten Padang Pariaman	213.647	214.272	427.919	99,71
6	Kabupaten Agam	266.512	262.107	528.619	101,68
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	189.915	190.258	380.173	99,82
8	Kabupaten Pasaman	161.047	157.332	318.379	102,36
9	Kabupaten Kep. Mentawai	45.563	41.954	87.517	108,60
10	Kabupaten Dharmasraya	107.968	104.685	212.653	103,14
11	Kabupaten Solok Selatan	92.343	88.562	180.905	104,27
12	Kabupaten Pasaman Barat	219.221	212.354	431.575	103,23
13	Kota Padang	452.674	448.248	900.922	100,99
14	Kota Solok	37.072	36.542	73.614	101,45
15	Kota Sawahlunto	33.362	33.015	66.377	101,05
16	Kota Padang Panjang	29.124	28.643	57.767	101,68
17	Kota Bukittinggi	60.975	60.615	121.590	100,59
18	Kota Payakumbuh	69.539	68.253	137.792	101,88
19	Kota Pariaman	46.929	45.829	92.758	102,40
	Sumatera Barat	**2.782.576**	**2.736.669**	**5.519.245**	**101,68**

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2018 (diolah)

Tabel 7.
Rasio Jenis Kelamin Menurut Kelompok Umur
Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2018

Kelompok Umur	Jenis Kelamin (Jiwa)		Total (Jiwa)	Sex Ratio
	Laki-Laki	Perempuan		
00-04	194.508	180.108	374.616	108,00
05-09	267.030	247.795	514.825	107,76
10-14	279.707	260.358	540.065	107,43
15-19	274.763	259.114	533.877	106,04
20-24	253.545	239.971	493.516	105,66
25-29	210.791	198.584	409.375	106,15
30-34	213.078	203.576	416.654	104,67
35-39	210.466	200.631	411.097	104,90
40-44	185.372	184.520	369.892	100,46
45-49	162.262	165.029	327.291	98,32
50-54	139.589	148.793	288.382	93,81
55-59	121.762	131.745	253.507	92,42
60-64	105.786	115.679	221.465	91,45
65-69	72.346	75.574	147.920	95,73
70-74	36.809	47.338	84.147	77,76
> 75	54.762	77.854	132.616	70,34
Jumlah	**2.782.576**	**2.736.669**	**5.519.245**	**101,68**

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2018 (diolah)

c) Piramida Penduduk

Piramida penduduk menunjukkan komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin yang disajikan secara grafik. Sumbu horizontal (dasar piramida penduduk) menunjukkan jumlah penduduk dapat menggunakan jumlah absolut atau persentase. Sumbu vertikal menunjukkan umur, baik menurut kelompok umur satu tahunan maupun lima tahunan. Dasar piramida dimulai dengan kelompok umur termuda dan dilanjutkan ke atas untuk kelompok umur yang lebih tua dan biasanya puncak

piramida untuk kelompok umur yang lebih tua sering dibuat dengan sistem umur terbuka (75+) dan bagian kiri piramida digunakan untuk mewakili penduduk laki-laki serta bagian kanan untuk penduduk perempuan.

Piramida penduduk merupakan refleksi struktur umur penduduk menurut jenis kelamin dimana bentuknya ditentukan oleh kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas), dan perpindahan penduduk (mobilitas).

Piramida penduduk Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2018 dapat dilihat pada Gambar 2 di bawah ini :

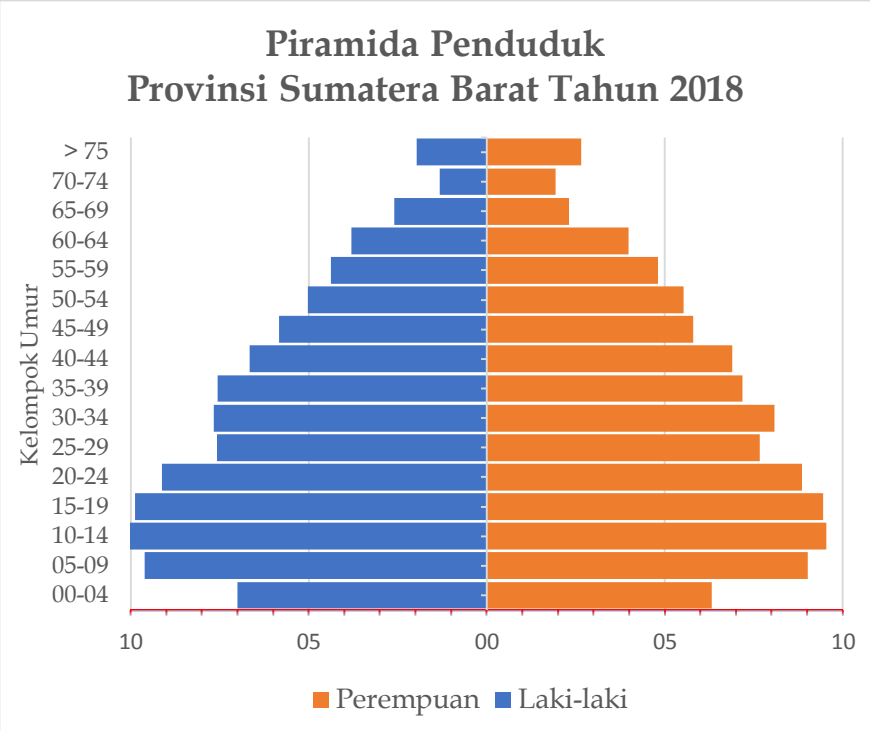

Gambar 2.Piramida Penduduk Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018

Menurut bentuknya, piramida penduduk Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2018 dinamakan "Piramida penduduk dengan bentuk "kendi". Piramida bentuk ini biasa terdapat pada derah/negara yang mengalami

penurunan tingkat kelahiran secara drastis dengan tingkat kematian bayi yang semakin menurun.

Sedangkan berdasarkan cirinya, Piramida Penduduk Sumatera Barat per 31 Desember 2018 dinamakan Konstriktif (*Constrictive*), dimana bagian dasar piramida kecil dan sebagian besar penduduk masih berada dalam kelompok umur muda.

Piramida penduduk ini dapat digunakan untuk membuat perencanaan pembangunan dengan memperhatikan umur dan jenis kelamin secara cepat dan juga berguna untuk evaluasi data kependudukan yang dikumpulkan. Piramida yang disajikan dari periode-periode yang lain dapat menunjukkan perkembangan dan kecenderungan penduduk di masa lalu, saat ini dan masa yang akan datang. Dengan melihat gambar piramida penduduk, kita dapat mengetahui struktur umur penduduk dan implikasinya terhadap tuntutan penyediaan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kebutuhan dasar penduduk (baik balita, remaja, dewasa, laki-laki, perempuan dan lansia) sekaligus melihat potensi tenaga kerja serta membayangkan kebutuhan akan tambahan kesempatan kerja yang harus diciptakan.

Berdasarkan Piramida Penduduk Sumatera Barat per 31 Desember 2018, dapat dilihat bahwa struktur umur penduduk Sumatera Barat saat ini didominasi oleh penduduk usia muda, terutama penduduk pada usia 10-14 tahun, sehingga penyediaan pelayanan pendidikan agar dapat lebih ditingkatkan. Komposisi ini juga menunjukkan

bahwa kedepan nanti, penduduk Sumatera Barat sedang mengarah pada struktur penduduk usia produktif sehingga perlu disiapkan ketersediaan atas tambahan kesempatan kerja yang harus diciptakan.

Pada piramida ini juga terlihat bahwa jumlah penduduk kelompok umur 0-4 tahun yang terletak pada dasar piramida mulai mengecil. Ini berarti angka kelahiran mulai menurun. Demikian juga dengan jumlah penduduk 5-9 tahun masih terlihat lebar, berarti lima tahun ke depan dibutuhkan fasilitas pendidikan dasar dan menengah yang cukup untuk menampung penduduk kelompok ini.

Penduduk lansia (65 tahun ke atas), menunjukkan proporsi yang masih kecil yaitu 6,61 persen kondisi per 31 Desember 2018. Namun dimasa depan proporsi penduduk lansia akan terus merambat naik, karena pergeseran umur penduduk serta usia harapan hidup yang semakin meningkat. Pertambahan jumlah penduduk lansia ini harus mulai diantisipasi dari sekarang, karena kelompok ini akan terus membesar di masa depan, sehingga diperlukan kebijakan seperti ketenagakerjaan, kesehatan, pelayanan lansia serta kebutuhan sosial dasar lainnya.

d) Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*)

Rasio ketergantungan menunjukkan beban yang harus ditanggung oleh penduduk produktif (15-64 tahun) terhadap penduduk tidak produktif (<15 tahun dan 65 tahun ke atas). Semakin tinggi persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai

hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Penduduk muda berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Demikian pula penduduk berusia 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Rasio ketergantungan ini merupakan indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu daerah.

Rasio ketergantungan atau rasio beban tanggungan Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2018 dapat dilihat pada Tabel 8, di bawah ini :

Tabel 8.
Rasio Ketergantungan Menurut Kelompok Umur
Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2018

Kelompok Umur	Jenis Kelamin (Jiwa)		Total (Jiwa)	% Total	Dependency Ratio
	Laki-Laki	Perempuan			
0-14 tahun (Umur Muda)	741.245	688.261	1.429.506	25,90	**38,38**
15-64 tahun (Umur Produktif)	1.877.414	1.847.642	3.725.056	67,49	**100,00**
> 65 tahun (Umur Tua)	163.917	200.766	364.683	6,61	**9,79**
Jumlah	**2.782.576**	**2.736.669**	**5.519.245**	**100,00**	

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2018 (diolah)

Dari tabel 8 di atas diketahui bahwa rasio ketergantungan total Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2018 adalah sebesar 48,17 persen, artinya setiap 100 orang penduduk usia produktif (usia kerja) mempunyai beban tanggungan sebanyak 48 sampai 49 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Rasio ketergantungan sebesar 48,17 persen ini terdiri dari rasio penduduk muda sebesar 38,38 persen dan rasio penduduk tua sebesar 9,79 persen.

Kondisi ini menjadi tantangan bagi pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan kesempatan kerja, kualitas penduduk dan tetap mempertahankan laju pertumbuhan penduduk yang rendah.

3) ***Rasio Kepadatan Penduduk (Population Density Ratio)***

Kepadatan penduduk merupakan kondisi yang mengalami perubahan dari tahun ke tahun karena perubahan jumlah penduduk di satu wilayah/area, baik secara alami maupun karena perpindahan penduduk dari daerah satu ke daerah lainnya. Indikator kepadatan penduduk berguna untuk melihat kerapatan jumlah penduduk dalam satu satuan keruangan.

Menurut Undang-Undang Nomor 56/PRP/1960, ada 4 (empat) klasifikasi kepadatan penduduk yaitu tidak padat, dengan tingkat kepadatan 1-50 jiwa per kilometer persegi, kurang padat dengan tingkat kepadatan 51-250 jiwa per kilometer persegi, cukup padat dengan tingkat kepadatan 251-400 jiwa per kilometer persegi dan sangat padat dengan tingkat kepadatan lebih besar dari 401 jiwa/kilometer persegi.

Berdasarkan ketentuan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Provinsi Sumatera Barat tergolong provinsi yang kurang padat,

hal ini dapat dilihat pada Tabel 9 dibawah ini yang memperlihatkan rasio kepadatan penduduk di Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2018. Dengan luas 42.125 kilometer persegi, Provinsi Sumatera Barat didiami oleh penduduk sebesar 5.519.245 jiwa atau dengan kepadatan sebesar 131,02 jiwa per kilometer persegi pada tahun 2018. Dengan kata lain rata-rata setiap kilometer persegi Provinsi Sumatera Barat didiami sebanyak 131 sampai dengan 132 jiwa.

Tabel 9.
Rasio Kepadatan Penduduk Provinsi Sumatera Barat
Per 31 Desember 2018

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (km^2)	Kepadatan (Jiwa/km^2)
1	Kabupaten Pesisir Selatan	508.691	6.106	83,31
2	Kabupaten Solok	384.091	3.247	118,29
3	Kabupaten Sijunjung	236.910	3.068	77,22
4	Kabupaten Tanah Datar	370.993	1.315	282,12
5	Kabupaten Padang Pariaman	427.919	1.354	316,04
6	Kabupaten Agam	528.619	2.238	236,20
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	380.173	3.324	114,37
8	Kabupaten Pasaman	318.379	3.936	80,89
9	Kabupaten Kepulauan Mentawai	87.517	5.998	14,59
10	Kabupaten Dharmasraya	212.653	3.018	70,46
11	Kabupaten Solok Selatan	180.905	3.612	50,08
12	Kabupaten Pasaman Barat	431.575	3.738	115,46
13	Kota Padang	900.922	686	1.313,30
14	Kota Solok	73.614	61	1.206,79
15	Kota Sawahlunto	66.377	239	277,73
16	Kota Padang Panjang	57.767	21	2.750,81
17	Kota Bukittinggi	121.590	24	5.066,25
18	Kota Payakumbuh	137.792	75	1.837,23
19	Kota Pariaman	92.758	65	1.427,05
	Sumatera Barat	**5.519.245**	**42.125**	**131,02**

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2018 (diolah)

Dari Tabel 9 juga terlihat bahwa rasio kepadatan penduduk tertinggi di Provinsi Sumatera Barat berada di Kota Bukittinggi dengan luas wilayah hanya 24 kilometer persegi didiami oleh penduduk sebanyak 121.590 jiwa dan rasio kepadatan penduduk terendah berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan luas wilayah 5.998 kilometer persegi didiami oleh penduduk hanya sebanyak 87.517 jiwa.

4) ***Angka Pertumbuhan Penduduk***

Indikator laju pertumbuhan penduduk berguna untuk melihat kecenderungan dan memproyeksikan jumlah penduduk di masa depan.

Angka pertumbuhan penduduk Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 disajikan pada Tabel 10, dimana dapat dilihat angka pertumbuhan penduduk Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2017 ke tahun 2018 termasuk rendah, karena hanya bertambah sebesar 0,15 persen. Angka pertumbuhan penduduk ini dihitung berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) hasil pembersihan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri yang telah diintegrasikan dengan data hasil perekaman KTP elektronik. Pertumbuhan Penduduk yang rendah ini sangat menguntungkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, karena apabila pertumbuhan penduduk tidak terkendali, maka implikasi dari hal tersebut adalah munculnya berbagai masalah sosial ekonomi seperti kemiskinan, pertumbuhan daerah kumuh, kriminalitas dan lain sebagainya. Angka pertumbuhan penduduk diatas dipengaruhi oleh masih terdapatnya data ganda antar Kabupaten/Kota se-Indonesia yang terdeteksi oleh Tim Konsolidasi Data Direktorat Jenderal

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri sehingga banyak data ganda yang harus dihapus dari database kependudukan Kabupaten/Kota.

Tabel 10.
Pertumbuhan Penduduk Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2018

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)		Pertumbuhan Penduduk (%)
		Tahun 2017	Tahun 2018	
1	Kabupaten Pesisir Selatan	519.522	508.691	- 2,11
2	Kabupaten Solok	377.292	384.091	1,79
3	Kabupaten Sijunjung	234.915	236.910	0,85
4	Kabupaten Tanah Datar	367.754	370.993	0,88
5	Kabupaten Padang Pariaman	464.560	427.919	- 8,22
6	Kabupaten Agam	526.841	528.619	0,34
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	375.478	380.173	1,24
8	Kabupaten Pasaman	316.620	318.379	0,55
9	Kabupaten Kep. Mentawai	85.669	87.517	2,13
10	Kabupaten Dharmasraya	207.883	212.653	2,27
11	Kabupaten Solok Selatan	178.687	180.905	1,23
12	Kabupaten Pasaman Barat	429.904	431.575	0,39
13	Kota Padang	887.675	900.922	1,48
14	Kota Solok	71.723	73.614	2,60
15	Kota Sawahlunto	65.042	66.377	2,03
16	Kota Padang Panjang	56.562	57.767	2,11
17	Kota Bukittinggi	119.183	121.590	2,00
18	Kota Payakumbuh	135.209	137.792	1,89
19	Kota Pariaman	90.727	92.758	2,21
	Sumatera Barat	**5.511.246**	**5.519.245**	**0,15**

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2017 dan Semester II 2018 (diolah)

Dari Tabel 10 diatas dapat dilihat bahwa 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Padang Pariaman mengalami pertumbuhan penduduk yang minus (negatif), yang disebabkan karena adanya kegiatan pemutakhiran data yang dilakukan oleh masing-masing Kabupaten/Kota tahun 2018. Bahkan untuk Kabupaten Padang Pariaman terjadi

pengurangan penduduk yang sangat signifikan karena adanya kegiatan pemutakhiran data ini, yang dilakukan dengan cara memisahkan data-data penduduk yang tidak pernah mengalami pergerakan disebabkan karena penduduk tidak pernah datang ke pusat pelayanan sehingga tidak terjadi proses update data melalui perbaikan Kartu Keluarga, penerbitan KTP-el, penerbitan Akte Kelahiran dan sebagainya sebanyak 33.499 NIK. Penduduk tersebut juga tidak ditemukan pada saat pencocokan dan penelitian data pemilih oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman melalui petugas Pantarlih. Data tersebut diasumsikan sebagai data yang tidak valid yang terjadi pada saat pendataan korban gempa 2009, dimana masyarakat mendapatkan bantuan gempa berdasarkan daftar hasil pendataan dari petugas pendataan korban gempa yang tidak berdasarkan NIK. Hal ini menyebabkan terjadinya data ganda serta data yang penduduknya tidak menetap di Kabupaten Padang Pariaman (pemilik rumah berada di rantau) sehingga perlu dilakukan penyisihan (pemisahan) data dimaksud guna meningkatkan kualitas data kependudukan Kabupaten Padang Pariaman. Namun proses penyisihan data ini tidak menghilangkan data dimaksud dan apabila terjadi pengajuan pelayanan administrasi kependudukan oleh yang bersangkutan, dapat dikembalikan dengan melalui proses pendaftaran penduduk dan perekaman data biometrik KTP-el.

b. Komposisi Penduduk Menurut Karakteristik Sosial

1) Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

Bagian ini menggambarkan jumlah dan proporsi penduduk berdasarkan jenjang pendidikan terakhir yang ditamatkan di

suatu provinsi pada waktu tertentu yang disajikan berdasarkan jenis kelamin dalam bentuk tabel.

Informasi tentang jumlah penduduk menurut pendidikan ini menunjukkan karakteristik penduduk berdasarkan jenjang pendidikan dan gambaran pencapaian pembangunan pendidikan di suatu Kabupaten/Kota.

Tingkat pendidikan merupakan salah satu ukuran untuk kualitas penduduk. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan semakin baik kualitas SDM di wilayah tersebut. Namun ukuran ini masih harus ditambah dengan etos kerja dan keterampilan baik *hard skill* maupun *soft skill*. Beberapa pelaku usaha menyatakan bahwa yang dibutuhkan tidak saja keterampilan tetapi juga kepribadian, karena keterampilan bisa ditingkatkan melalui pelatihan-pelatihan.

Tamat sekolah didefinisikan sebagai jenjang pendidikan yang telah berhasil diselesaikan oleh seseorang dengan dibuktikan adanya ijazah atau surat tanda tamat belajar. Tetapi jika menggunakan ukuran menurut jenjang tertinggi merupakan jenjang atau kelas tertinggi yang pernah ditempuh oleh seseorang maka tentunya hasilnya akan berbeda dengan definisi di atas. Namun demikian, dalam struktur database, ketepatan pelaporan atau kejujuran masyarakat juga sangat menentukan dalam pengklasifikasian distribusi penduduk menurut tingkat pendidikan ini. Oleh sebab itu sangat diharapkan sekali masyarakat agar melaporkan data-data yang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya sehingga database yang terbentuk menjadi akurat dan berkualitas serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Tabel distribusi penduduk menurut pendidikan yang ditamatkan dan jenis kelamin Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2018 dapat dilihat pada Tabel 11 berikut ini :

Tabel 11.
Distribusi Penduduk Menurut Pendidikan Yang Ditamatkan
Dan Jenis Kelamin Provinsi Sumatera Barat
Per 31 Desember 2018

Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin (Jiwa)				Total (Jiwa)	
	Laki-laki		Perempuan			
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Tidak/Belum Sekolah	620.974	22,32	585.772	21,40	1.206.746	21,86
Belum Tamat SD/ Sederajat	478.783	17,21	447.475	16,35	926.258	16,78
Tamat SD/Sederajat	542.230	19,49	546.862	19,98	1.089.092	19,73
SLTP/Sederajat	412.914	14,84	380.868	13,92	793.782	14,38
SLTA/Sederajat	573.919	20,63	538.599	19,68	1.112.518	20,16
Diploma I/II	10.476	0,38	28.229	1,03	38.705	0,70
Akademi/Diploma III/ Sarmud	30.900	1,11	55.332	2,02	86.232	1,56
Diploma IV/Strata I	102.480	3,68	145.090	5,30	247.570	4,49
Strata II	9.040	0,32	7.952	0,29	16.992	0,31
Strata III	860	0,03	490	0,02	1.350	0,02
Jumlah	**2.782.576**	**100,00**	**2.736.669**	**100,00**	**5.519.245**	**100,00**

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2018 (diolah)

Dari Tabel 11 terlihat bahwa penduduk Provinsi Sumatera Barat kondisi per 31 Desember 2018 sebesar 20,16 persen berpendidikan SLTA/sederajat. Persentase penduduk perempuan yang berpendidikan SLTA sedikit lebih rendah dibandingkan dengan penduduk laki-laki yang berpendidikan SLTA. Hal ini mencerminkan bahwa partisipasi penduduk perempuan untuk bersekolah lebih rendah dibandingkan penduduk laki-laki. Permintaan pasar tenaga kerja yang

mensyaratkan minimal pendidikan SLTA, menyebabkan penduduk berusaha untuk mencapai jenjang pendidikan tersebut untuk bisa masuk ke pasar kerja non pertanian. Sedangkan persentase penduduk yang tamat SLTP untuk perempuan lebih rendah dibandingkan dengan persentase penduduk laki-laki. Pada jenjang pendidikan dasar, persentase penduduk yang tamat SD untuk penduduk perempuan juga lebih rendah dibandingkan dengan persentase penduduk laki-laki. Untuk tingkat pendidikan yang lebih tinggi, persentase penduduk perempuan yang tamat Diploma I/II, Akademi/Diploma III/Sarjana Muda, dan Diploma IV/Strata I lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Hanya untuk tingkat pendidikan Strata II dan Strata III, jumlah penduduk laki-laki yang menamatkannya lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk perempuan.

Ini menunjukkan bahwa kesetaraan jender dalam mengenyam pendidikan telah berkembang dengan baik di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional, dimana diharapkan tidak terjadi lagi kesenjangan pendidikan antara penduduk laki-laki dengan perempuan. Jika penduduk perempuan mempunyai pendidikan yang tinggi tentunya ketergantungan terhadap laki-laki bisa sedikit ditekan dan tentunya keinginan untuk bertahan hidup akan semakin tinggi bagi penduduk perempuan.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat perlu memperhatikan kondisi diatas mengingat bahwa era globalisasi sebentar lagi akan berlangsung dan persaingan untuk memperoleh pekerjaan semakin ketat dimana warga negara asing pun bisa mencari

pekerjaan ke Indonesia. Peningkatan pendidikan *vocasional*, akses ke pendidikan terutama untuk penduduk miskin, perlu dilakukan mengingat bahwa sebagian besar peluang kerja membutuhkan tenaga terdidik yang memiliki keterampilan khusus.

2) *Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Kepercayaan*

Bagian ini menggambarkan jumlah dan proporsi penduduk berdasarkan agama di suatu provinsi pada waktu tertentu yang disajikan per Kabupaten/Kota dalam bentuk tabel maupun gambar. Dari tabel dan gambar tersebut akan diketahui karakteristik penduduk berdasarkan pemeluk agama (Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, Khonghucu, dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa).

Informasi tentang jumlah penduduk berdasarkan agama ini diperlukan untuk merencanakan suatu program kegiatan yang berkaitan dengan kerukunan antar umat beragama. Dari Tabel 12 dapat dilihat bahwa penduduk Provinsi Sumatera Barat pada umumnya memeluk agama Islam sebanyak 97,65 persen, disusul kemudian pemeluk agama Kristen 1,45 persen, Katholik 0,83 persen. Sedangkan penganut agama Hindu hanya 95 orang (0 persen), Budha 3.659 orang (0,07 persen), Konghucu hanya 8 orang (0 persen), dan Kepercayaan sebanyak 272 orang (0 persen).

Jika dikaitkan dengan wilayah Kabupaten/Kota, sebagaimana terlihat pada Tabel 13, maka agama Islam mendominasi di 18 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Hanya Kabupaten Kepulauan Mentawai yang didominasi oleh agama Kristen dan Katholik.

Agama kedua terbesar setelah Islam yang tersebar disetiap Kabupaten/Kota adalah agama Kristen. Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kota Padang merupakan wilayah dengan agama Kristen dan Katholik terbesar yaitu 42.944 jiwa penganut Kristen di Kabupaten Kepulauan Mentawai dan 13.767 jiwa di Kota Padang. Penganut Katholik sebanyak 25.558 jiwa di Kabupaten Kepulauan Mentawai dan 12.661 jiwa di Kota Padang. Selain itu, Kota Padang juga merupakan wilayah dengan penganut agama Hindu dan Budha terbesar di seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat.

Distribusi penduduk menurut agama dan jenis kelamin Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2018 dan distribusi penduduk menurut agama dan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2018 dapat dilihat pada Tabel 12 dan Tabel 13 berikut ini :

Tabel 12.
Distribusi Penduduk Menurut Agama dan Jenis Kelamin
Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2018

Agama	Jenis Kelamin (Jiwa)				Total (Jiwa)	
	Laki-Laki		Perempuan			
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Islam	2.715.583	97,59	2.673.731	97,70	5.389.314	97,65
Kristen	41.498	1,49	38.340	1,40	79.838	1,45
Katholik	23.400	0,84	22.659	0,83	46.059	0,83
Hindu	49	0,00	46	0,00	95	0,00
Budha	1.899	0,07	1.760	0,06	3.659	0,07
Konghucu	4	0,00	4	0,00	8	0,00
Kepercayaan	143	0,01	129	0,00	272	0,00
Jumlah	**2.782.576**	**100,00**	**2.736.669**	**100,00**	**5.519.245**	**100,00**

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2018 (diolah)

No	Kabupaten/Kota	Agama (Jiwa)														Total (Jiwa)	
		Islam		Kristen		Katholik		Hindu		Budha		Konghucu		Kepercayaan			
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Kabupaten Pesisir Selatan	507.742	9,42	742	0,93	200	0,43	7	7,37	0	0,00	0	0,00	0	0,00	508.691	9,22
2	Kabupaten Solok	383.750	7,12	303	0,38	34	0,07	4	4,21	0	0,00	0	0,00	0	0,00	384.091	6,96
3	Kabupaten Sijunjung	235.729	4,37	898	1,12	273	0,59	5	5,26	2	0,05	0	0,00	3	1,10	236.910	4,29
4	Kabupaten Tanah Datar	370.527	6,88	349	0,44	101	0,22	0	0,00	16	0,44	0	0,00	0	0,00	370.993	6,72
5	Kabupaten Padang Pariaman	426.174	7,91	1.299	1,63	439	0,95	4	4,21	3	0,08	0	0,00	0	0,00	427.919	7,75
6	Kabupaten Agam	524.464	9,73	3.793	4,75	339	0,74	12	12,63	11	0,30	0	0,00	0	0,00	528.619	9,58
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	379.470	7,04	461	0,58	240	0,52	0	0,00	2	0,05	0	0,00	0	0,00	380.173	6,89
8	Kabupaten Pasaman	316.960	5,88	1.269	1,59	149	0,32	1	1,05	0	0,00	0	0,00	0	0,00	318.379	5,77
9	Kabupaten Kep. Mentawai	18.858	0,35	42.944	53,79	25.558	55,49	0	0,00	0	0,00	0	0,00	157	57,72	87.517	1,59
10	Kabupaten Dharmasraya	210.054	3,90	2.119	2,65	438	0,95	0	0,00	2	0,05	0	0,00	40	14,71	212.653	3,85
11	Kabupaten Solok Selatan	179.634	3,33	1.108	1,39	152	0,33	6	6,32	3	0,08	0	0,00	2	0,74	180.905	3,28
12	Kabupaten Pasaman Barat	421.970	7,83	6.778	8,49	2.799	6,08	0	0,00	3	0,08	0	0,00	25	9,19	431.575	7,82
13	Kota Padang	871.163	16,16	13.767	17,24	12.661	27,49	49	51,58	3.238	88,49	7	87,50	37	13,60	900.922	16,32
14	Kota Solok	72.840	1,35	497	0,62	268	0,58	1	1,05	8	0,22	0	0,00	0	0,00	73.614	1,33
15	Kota Sawahlunto	65.968	1,22	293	0,37	116	0,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	66.377	1,20
16	Kota Padang Panjang	56.935	1,06	392	0,49	381	0,83	0	0,00	58	1,59	1	12,50	0	0,00	57.767	1,05
17	Kota Bukittinggi	118.441	2,20	1.856	2,32	1.111	2,41	5	5,26	174	4,76	0	0,00	3	1,10	121.590	2,20
18	Kota Payakumbuh	136.196	2,53	775	0,97	681	1,48	1	1,05	139	3,80	0	0,00	0	0,00	137.792	2,50
19	Kota Pariaman	92.439	1,72	195	0,24	119	0,26	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	1,84	92.758	1,68
	Sumatera Barat	**5.389.314**	**100,00**	**79.838**	**100,00**	**46.059**	**100,00**	**95**	**100,00**	**3.659**	**100,00**	**8**	**100,00**	**272**	**100,00**	**5.519.245**	**100,00**

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2018 (diolah)

Tabel 13. Distribusi Penduduk menurut Agama dan Kabupaten/Kota, Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2018

3) *Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kecacatan*

Bagian ini menggambarkan jumlah dan proporsi penduduk berdasarkan jenis kecacatan (tuna netra, tuna rungu, tuna grahita, dan lain-lain) yang disajikan dalam bentuk tabel.

Data ini sangat diperlukan dalam melakukan perencanaan pelayanan yang akan diberikan kepada penduduk dengan kategori khusus.

Indikator ini menguraikan jumlah dan proporsi penyandang cacat dirinci menurut jenis kelamin dan kelompok umur. Masing-masing disajikan dalam bentuk tabel menurut Kabupaten/Kota.

Distribusi penduduk Provinsi Sumatera Barat menurut jenis kecacatan dan jenis kelamin per 31 Desember 2018 disajikan pada Tabel 14, sedangkan distribusi penduduk Provinsi Sumatera Barat menurut jenis kecacatan dan Kabupaten/Kota per 31 Desember 2018 dapat dilihat pada Tabel 15.

Tabel 14.
Distribusi Penduduk Menurut Jenis Kecacatan dan Jenis Kelamin
Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2018

No	Jenis Kecacatan	Jenis Kelamin (Jiwa)				Total (Jiwa)	
		Laki-Laki		Perempuan			
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Cacat Fisik	682	24,25	471	23,68	1.153	24,02
2	Cacat Netra/Buta	288	10,24	207	10,41	495	10,31
3	Cacat Rungu/Wicara	478	17,00	454	22,83	932	19,41
4	Cacat Mental/Jiwa	818	29,09	455	22,88	1.273	26,52
5	Cacat Fisik dan Mental	317	11,27	234	11,76	551	11,48
6	Cacat Lainnya	229	8,14	168	8,45	397	8,27
	Jumlah	2.812	100,00	1.989	100,00	4.801	100,00

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2018 (diolah)

Dari Tabel 14 di atas diketahui bahwa penyandang cacat di Provinsi Sumatera Barat sebanyak 4.801 jiwa dengan jenis kecacatan yang paling banyak dialami adalah cacat mental/jiwa sebanyak 1.273 jiwa (26,52 persen) dengan persentase tertinggi pada laki-laki sebanyak 818 jiwa (29,09 persen).

Bila dilihat pada Tabel 15, dapat diketahui bahwa hampir semua jenis kecacatan, jumlah terbesarnya berada di Kota Padang dan Kabupaten Tanah Datar, hanya cacat netra (buta) yang berada di Kabupaten Pasaman, sedangkan jumlah terkecil berada di Kota Payakumbuh. Hal ini menuntut perhatian yang serius dari Pemerintah Kota Padang dan Kabupaten Tanah Datar untuk dapat memperhatikan dan menyiapkan sarana dan prasarana penunjang bagi penduduk penyandang cacat (disabilitas) ini, khususnya untuk pelayanan publik di berbagai sektor agar seluruh penduduk disabilitas ini mendapatkan prioritas pelayanan. Selanjutnya, pemerintah Kota Padang dan Kabupaten Tanah Datar juga harus menyediakan Rumah Sakit khusus bagi penyandang cacat ini agar seluruh penyandang cacat bisa mendapatkan pelayanan yang optimal.

No	Kabupaten/Kota	Jenis Kecacatan (Jiwa)												Total (Jiwa)	
		Cacat Fisik		Cacat Netra/Buta		Cacat Rungu/Wicara		Cacat Mental/Jiwa		Cacat Fisik & Mental		Cacat Lainnya			
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Kabupaten Pesisir Selatan	50	4,34	17	3,43	38	4,08	48	3,77	12	2,18	15	3,78	180	3,75
2	Kabupaten Solok	67	5,81	24	4,85	41	4,40	55	4,32	39	7,08	14	3,53	240	5,00
3	Kabupaten Sijunjung	77	6,68	47	9,49	82	8,80	50	3,93	44	7,99	30	7,56	330	6,87
4	Kabupaten Tanah Datar	192	16,65	55	11,11	127	13,63	255	20,03	90	16,33	33	8,31	752	15,66
5	Kabupaten Padang Pariaman	48	4,16	20	4,04	29	3,11	76	5,97	20	3,63	5	1,26	198	4,12
6	Kabupaten Agam	131	11,36	36	7,27	52	5,58	143	11,23	44	7,99	18	4,53	424	8,83
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	16	1,39	10	2,02	24	2,58	36	2,83	7	1,27	13	3,27	106	2,21
8	Kabupaten Pasaman	127	11,01	86	17,37	127	13,63	152	11,94	70	12,70	18	4,53	580	12,08
9	Kabupaten Kep. Mentawai	18	1,56	7	1,41	9	0,97	12	0,94	6	1,09	7	1,76	59	1,23
10	Kabupaten Dharmasraya	14	1,21	10	2,02	22	2,36	13	1,02	14	2,54	8	2,02	81	1,69
11	Kabupaten Solok Selatan	26	2,25	11	2,22	25	2,68	14	1,10	18	3,27	3	0,76	97	2,02
12	Kabupaten Pasaman Barat	48	4,16	28	5,66	33	3,54	64	5,03	24	4,36	24	6,05	221	4,60
13	Kota Padang	174	15,09	63	12,73	191	20,49	174	13,67	76	13,79	134	33,75	812	16,91
14	Kota Solok	32	2,78	15	3,03	35	3,76	35	2,75	14	2,54	10	2,52	141	2,94
15	Kota Sawahlunto	45	3,90	13	2,63	47	5,04	58	4,56	31	5,63	35	8,82	229	4,77
16	Kota Padang Panjang	21	1,82	9	1,82	14	1,50	13	1,02	5	0,91	6	1,51	68	1,42
17	Kota Bukittinggi	11	0,95	16	3,23	6	0,64	18	1,41	4	0,73	11	2,77	66	1,37
18	Kota Payakumbuh	7	0,61	1	0,20	3	0,32	10	0,79	3	0,54	1	0,25	25	0,52
19	Kota Pariaman	49	4,25	27	5,45	27	2,90	47	3,69	30	5,44	12	3,02	192	4,00
	Sumatera Barat	**1.153**	**100,00**	**495**	**100,00**	**932**	**100,00**	**1.273**	**100,00**	**551**	**100,00**	**397**	**100,00**	**4.801**	**100,00**

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2018 (diolah)

Tabel 15. Distribusi Penduduk Menurut Jenis Kecacatan dan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2018

4) *Penduduk Menurut Status Kawin*

Bagian ini menggambarkan jumlah dan proporsi penduduk menurut status kawin di suatu daerah pada waktu tertentu yang disajikan per wilayah dalam bentuk tabel. Status kawin ini meliputi belum kawin, kawin dan cerai.

Dalam hal ini, konsep perkawinan difokuskan pada keadaan dimana seorang laki-laki dan perempuan hidup bersama dalam jangka waktu yang lama secara sah (de jure) maupun tanpa pengesahan perkawinan (de facto).

Indikator perkawinan berguna bagi penentu kebijakan dalam mengembangkan program-program pembangunan keluarga dan upaya-upaya peningkatan kualitas keluarga dan perencanaan keluarga berencana/pembangunan keluarga.

Distribusi penduduk Provinsi Sumatera Barat menurut status kawin dan jenis kelamin per 31 Desember 2018 dapat dilihat pada Tabel 16 berikut ini :

Tabel 16.
Distribusi Penduduk Menurut Status Kawin dan Jenis Kelamin
Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2018

Status Kawin	Jenis Kelamin (Jiwa)				Total (Jiwa)	
	Laki-Laki		Perempuan			
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Belum Kawin	1.531.710	55,05	1.248.073	45,61	2.779.783	50,37
Kawin	1.205.393	43,32	1.239.102	45,28	2.444.495	44,29
Cerai Hidup	16.616	0,60	47.454	1,73	64.070	1,16
Cerai Mati	28.857	1,04	202.040	7,38	230.897	4,18
Jumlah	**2.782.576**	**100,00**	**2.736.669**	**100,00**	**5.519.245**	**100,00**

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2018 (diolah)

No	Kabupaten/Kota	Status Kawin (Jiwa)								Total (Jiwa)	
		Belum Kawin		Kawin		Cerai Hidup		Cerai Mati			
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Kabupaten Pesisir Selatan	254.450	9,15	228.677	9,35	6.701	10,46	18.863	8,17	508.691	9,22
2	Kabupaten Solok	193.963	6,98	170.427	6,97	3.050	4,76	16.651	7,21	384.091	6,96
3	Kabupaten Sijunjung	114.717	4,13	111.019	4,54	2.108	3,29	9.066	3,93	236.910	4,29
4	Kabupaten Tanah Datar	177.501	6,39	168.006	6,87	5.110	7,98	20.376	8,82	370.993	6,72
5	Kabupaten Padang Pariaman	229.460	8,25	171.728	7,03	6.027	9,41	20.704	8,97	427.919	7,75
6	Kabupaten Agam	269.267	9,69	222.670	9,11	7.507	11,72	29.175	12,64	528.619	9,58
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	178.567	6,42	181.540	7,43	3.662	5,72	16.404	7,10	380.173	6,89
8	Kabupaten Pasaman	166.451	5,99	135.191	5,53	2.988	4,66	13.749	5,95	318.379	5,77
9	Kabupaten Kep. Mentawai	46.708	1,68	38.132	1,56	476	0,74	2.201	0,95	87.517	1,59
10	Kabupaten Dharmasraya	99.289	3,57	105.559	4,32	1.584	2,47	6.221	2,69	212.653	3,85
11	Kabupaten Solok Selatan	91.282	3,28	81.735	3,34	1.958	3,06	5.930	2,57	180.905	3,28
12	Kabupaten Pasaman Barat	229.379	8,25	182.998	7,49	4.120	6,43	15.078	6,53	431.575	7,82
13	Kota Padang	450.692	16,21	406.184	16,62	10.789	16,84	33.257	14,40	900.922	16,32
14	Kota Solok	37.714	1,36	32.307	1,32	1.011	1,58	2.582	1,12	73.614	1,33
15	Kota Sawahlunto	31.745	1,14	30.128	1,23	993	1,55	3.511	1,52	66.377	1,20
16	Kota Padang Panjang	30.136	1,08	24.401	1,00	964	1,50	2.266	0,98	57.767	1,05
17	Kota Bukittinggi	62.008	2,23	53.379	2,18	1.658	2,59	4.545	1,97	121.590	2,20
18	Kota Payakumbuh	66.929	2,41	63.260	2,59	1.983	3,10	5.620	2,43	137.792	2,50
19	Kota Pariaman	49.525	1,78	37.154	1,52	1.381	2,16	4.698	2,03	92.758	1,68
	Sumatera Barat	**2.779.783**	**100,00**	**2.444.495**	**100,00**	**64.070**	**100,00**	**230.897**	**100,00**	**5.519.245**	**100,00**

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester II 2018 (diolah)

Tabel 17. Distribusi Penduduk Menurut Status Kawin dan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2018

Tabel 16 menunjukkan bahwa penduduk Provinsi Sumatera Barat didominasi oleh penduduk berstatus belum kawin per 31 Desember 2018 berjumlah 2.779.783 jiwa (50,37 persen). Hal ini terlihat, baik untuk penduduk laki-laki maupun perempuan. Sementara itu, proporsi penduduk laki-laki yang berstatus kawin hampir sama dengan perempuan. Sedangkan, penduduk laki-laki berstatus belum kawin lebih tinggi dibandingkan perempuan, karena biasanya laki-laki masih meneruskan pendidikan atau baru mulai bekerja, sehingga menunda perkawinan. Begitu juga laki-laki yang dikonstruksikan sebagai kepala keluarga yang harus membiayai kebutuhan keluarga, mempunyai keinginan mapan secara ekonomi sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Proporsi penduduk dengan status cerai hidup dan cerai mati lebih tinggi pada perempuan dibandingkan laki-laki. Hal ini disebabkan laki-laki yang bercerai baik karena perceraian maupun karena ditinggal meninggal istri lebih cepat melakukan perkawinan kembali dibandingkan perempuan. Perempuan lebih banyak pertimbangan untuk menikah kembali terutama apabila perempuan tersebut mandiri secara ekonomi. Proporsi penduduk berstatus cerai hidup lebih besar pada perempuan daripada laki-laki. Kemandirian perempuan secara ekonomi serta peningkatan kesadaran tentang hak-hak perempuan dalam rumah tangga, seringkali menjadi penyebab keberanian perempuan menggugat cerai. Banyaknya proporsi belum kawin diduga disebabkan oleh besarnya jumlah penduduk yang berada pada umur sekolah ditambah dengan mereka yang berstatus bekerja.

Jika diklasifikasikan berdasarkan Kabupaten/Kota, pada Tabel 17 dapat dilihat bahwa Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk berstatus kawin dengan persentase tertinggi ada pada Kota Padang dengan jumlah 406.184 jiwa (16,62 persen), diikuti Kabupaten Pesisir Selatan dengan jumlah 228,677 jiwa (9,35 persen), sedangkan Kabupaten/Kota dengan persentase terendah ada pada Kota Padang Panjang dengan jumlah 24.401 jiwa (1,00 persen), diikuti Kota Sawahlunto dengan jumlah 30.128 jiwa (1,23 persen).

Sedangkan untuk Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk cerai hidup dan cerai mati dengan persentase tertinggi juga ada pada Kota Padang dengan jumlah masing-masing 10.789 jiwa (16,84 persen) untuk cerai hidup dan sebanyak 33.257 (14,40 persen) untuk cerai mati.

a) *Angka Perkawinan Kasar*

Angka perkawinan kasar merupakan indikator perkawinan yang sangat sederhana tanpa memperhitungkan umur dan jenis kelamin, tetapi bagi daerah-daerah yang belum atau tidak ada pencatatan perkawinan dan jumlah penduduk menurut umur, maka indikator ini sangat berguna terutama dalam mengembangkan pelayanan-pelayanan yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian maupun program-program pelayanan keluarga.

Angka perkawinan kasar Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 18, berikut ini :

Tabel 18.
Angka Perkawinan Kasar
Provinsi Sumatera Barat Per Tahun 2018

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)		Angka Perkawinan Kasar
		Pada Pertengahan Tahun	Jumlah Perkawinan	
1	Kabupaten Pesisir Selatan	514.107	4.351	8,46
2	Kabupaten Solok	380.692	3.751	9,85
3	Kabupaten Sijunjung	235.913	1.818	7,71
4	Kabupaten Tanah Datar	369.374	3.471	9,40
5	Kabupaten Padang Pariaman	446.240	4.292	9,62
6	Kabupaten Agam	527.730	4.662	8,83
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	377.826	3.355	8,88
8	Kabupaten Pasaman	317.500	2.533	7,98
9	Kabupaten Kep. Mentawai	86.593	124	1,43
10	Kabupaten Dharmasraya	210.268	1.467	6,98
11	Kabupaten Solok Selatan	179.796	1.299	7,22
12	Kabupaten Pasaman Barat	430.740	3.645	8,46
13	Kota Padang	894.299	6.631	7,41
14	Kota Solok	72.669	539	7,42
15	Kota Sawahlunto	65.710	509	7,75
16	Kota Padang Panjang	57.165	436	7,63
17	Kota Bukittinggi	120.387	793	6,59
18	Kota Payakumbuh	136.501	1.152	8,44
19	Kota Pariaman	91.743	839	9,15
	Sumatera Barat	**5.515.246**	**45.667**	**8,28**

Sumber : DKB II 2017, DKB II 2018, dan Kanwil Kementerian Agama Prov. Sumbar (diolah)

Dari Tabel 18 dapat dilihat angka perkawinan kasar Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar 8,28, artinya bahwa di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2018 dari 1.000 penduduk terdapat 8 – 9 orang yang berstatus kawin atau sebanyak 8 – 9 kali terjadi peristiwa perkawinan.

b) *Angka Perkawinan Umum*

Angka Perkawinan Umum lebih cermat dibandingkan dengan Angka Perkawinan Kasar karena dalam perhitungan ini hanya memasukan penduduk yang beresiko kawin saja yaitu penduduk yang berumur 15 tahun keatas sebagai

faktor penyebut. Sementara untuk penduduk berusia dibawah 15 tahun tidak diikutsertakan sebagai penyebut karena dianggap belum terpapar terhadap peristiwa perkawinan.

Angka perkawinan umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 tersaji dalam Tabel 19 berikut ini :

Tabel 19.
Angka Perkawinan Umum
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)		Angka Perkawinan Umum
		Usia 15 tahun keatas	Jumlah Perkawinan	
1	Kabupaten Pesisir Selatan	375.541	4.351	11,59
2	Kabupaten Solok	283.385	3.751	13,24
3	Kabupaten Sijunjung	174.187	1.818	10,44
4	Kabupaten Tanah Datar	288.051	3.471	12,05
5	Kabupaten Padang Pariaman	311.780	4.292	13,77
6	Kabupaten Agam	403.826	4.662	11,54
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	286.723	3.355	11,70
8	Kabupaten Pasaman	234.431	2.533	10,80
9	Kabupaten Kep. Mentawai	61.383	124	2,02
10	Kabupaten Dharmasraya	152.132	1.467	9,64
11	Kabupaten Solok Selatan	133.466	1.299	9,73
12	Kabupaten Pasaman Barat	309.121	3.645	11,79
13	Kota Padang	669.156	6.631	9,91
14	Kota Solok	53.190	539	10,13
15	Kota Sawahlunto	49.459	509	10,29
16	Kota Padang Panjang	42.117	436	10,35
17	Kota Bukittinggi	89.387	793	8,87
18	Kota Payakumbuh	102.785	1.152	11,21
19	Kota Pariaman	69.619	839	12,05
	Sumatera Barat	**4.089.739**	**45.667**	**11,17**

Sumber : DKB II Tahun 2018 dan Kanwil Kementerian Agama Prov. Sumbar (diolah)

Dari Tabel 19 tersebut dapat dilihat angka perkawinan umum Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar 11,17, artinya bahwa di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2018 dari 1.000 penduduk berusia 15 tahun keatas terdapat 11 - 12

orang yang berstatus kawin atau sebanyak 11 – 12 kali terjadi peristiwa perkawinan.

c) *Angka Perceraian Kasar (Divorce)*

Berakhirnya suatu perkawinan selain membawa implikasi demografi juga mempunyai implikasi sosiologi. Implikasi demografi adalah mempengaruhi fertilitas dalam arti mengurangi fertilitas, sedangkan implikasi sosiologi lebih kepada persepsi masyarakat tentang status cerai terutama bagi perempuan.

Angka perceraian kasar berguna untuk mengetahui gambaran sosiologis suatu daerah yang berkaita dengan tingkat perceraian, yang merupakan indikator perceraian (cerai hidup) yang sangat sederhana tanpa memperhitungkan umur dan jenis kelamin.

Angka perceraian kasar Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 20, yaitu sebesar 1,36, yang artinya bahwa di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2018 dari 1.000 penduduk terjadi peristiwa perceraian sebanyak 1-2 kali.

Data jumlah perceraian tersebut diperoleh dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumater Barat yang tersaji berdasarkan Pengadilan Agama yang ada di masing-masing Kabupaten/Kota sehingga data yang tersaji adalah jumlah perceraian untuk penduduk muslim yang ada di wilayah masing-masing Pengadilan Agama tersebut berada. Dari tabel juga terlihat bahwa angka perceraian terbesar berada di Pengadilan Agama Bukittinggi, Kota Bukittinggi

sebesar 5,42 dan yang terendah berada di Pengadilan Agama Painan, Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 0,57.

Tabel 20.
Angka Perceraian Kasar
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018

No	Pengadilan Agama	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)		Angka Perceraian Kasar
			Pada Pertengahan Tahun	Jumlah Perceraian	
1	Painan	Kabupaten Pesisir Selatan	514.107	291	0,57
2	Solok	Kabupaten Solok Kota Solok	380.692 72.669	320	0,71
3	Sijunjung	Kabupaten Sijunjung	235.913	366	1,55
4	Batusangkar	Kabupaten Tanah Datar	369.374	539	1,46
5	Pariaman	Kabupaten Padang Pariaman Kota Pariaman	446.240 91.743	709	1,32
6	Maninjau Lubuk Basung	Kabupaten Agam	527.730	421	0,80
7	50 Kota	Kabupaten Lima Puluh Kota	377.826	428	1,13
8	Lubuk Sikaping	Kabupaten Pasaman	317.500	271	0,85
9	Koto Baru Pulau Punjung	Kabupaten Dharmasraya	210.268	484	2,30
10	Muaro Labuh	Kabupaten Solok Selatan	179.796	250	1,39
11	Talu	Kabupaten Pasaman Barat	430.740	445	1,03
12	Padang	Kota Padang Kabupaten Kep. Mentawai	894.299 86.593	1.232	1,26
13	Sawahlunto	Kota Sawahlunto	65.710	240	3,65
14	Padang Panjang	Kota Padang Panjang	57.165	287	5,02
15	Bukittinggi	Kota Bukittinggi	120.387	651	5,41
16	Payakumbuh	Kota Payakumbuh	136.501	559	4,10
	Sumatera Barat		**5.515.246**	**7.493**	**1,36**

Sumber : DKB II 2017, DKB II 2018, dan Kanwil Kementerian Agama Prov. Sumbar (diolah)

d) *Angka Perceraian Umum*

Angka perceraian umum lebih cermat dibandingkan dengan Angka Perceraian Kasar, karena menunjukkan penduduk berstatus cerai hidup terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun keatas (penduduk yang terkena resiko perceraian) pada suatu tahun tertentu.

Angka perceraian umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 21 dibawah ini :

Tabel 21.
Angka Perceraian Umum
Provinsi Sumatera Barat Per Tahun 2018

No	Pengadilan Agama	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)		Angka Perceraian Kasar
			Usia 15 tahun keatas	Jumlah Perceraian	
1	Painan	Kabupaten Pesisir Selatan	375.541	291	0,77
2	Solok	Kabupaten Solok Kota Solok	283.385 53.190	320	0,95
3	Sijunjung	Kabupaten Sijunjung	174.187	366	2,10
4	Batusangkar	Kabupaten Tanah Datar	288.051	539	1,87
5	Pariaman	Kabupaten Padang Pariaman Kota Pariaman	311.780 69.619	709	1,86
6	Maninjau Lubuk Basung	Kabupaten Agam	403.826	421	1,04
7	50 Kota	Kabupaten Lima Puluh Kota	286.723	428	1,49
8	Lubuk Sikaping	Kabupaten Pasaman	234.431	271	1,16
9	Koto Baru Pulau Punjung	Kabupaten Dharmasraya	152.132	484	3,18
10	Muaro Labuh	Kabupaten Solok Selatan	133.466	250	1,87
11	Talu	Kabupaten Pasaman Barat	309.121	445	1,44
12	Padang	Kota Padang Kabupaten Kep. Mentawai	669.156 61.383	1.232	1,69
13	Sawahlunto	Kota Sawahlunto	49.459	240	4,85
14	Padang Panjang	Kota Padang Panjang	42.117	287	6,81
15	Bukittinggi	Kota Bukittinggi	89.387	651	7,28
16	Payakumbuh	Kota Payakumbuh	102.785	559	5,44
	Sumatera Barat		**4.089.739**	**7.493**	**1,83**

Sumber : DKB II 2017, DKB II 2018, dan Kanwil Kementerian Agama Prov. Sumbar (diolah)

Dari Tabel 21 tersebut dapat dilihat bahwa angka perceraian umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 adalah sebesar 1,83 yang berarti bahwa di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2018 dari 1.000 penduduk berusia 15 tahun keatas terjadi peristiwa perceraian sebanyak 1-2 kali. Dari tabel juga dapat dilihat bahwa angka perceraian umum tertinggi berada di Pengadilan Agama Bukittinggi, Kota Bukittingi

sebesar 7,28 dan terendah berada di Pengadilan Agama Painan, Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 0,77.

Sama halnya dengan data perceraian untuk angka perceraian kasar, data perceraian untuk menghitung angka perkawinan umum ini juga diperoleh dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat yang tersaji berdasarkan Pengadilan Agama yang ada di masing-masing Kabupaten/Kota.

c. Keluarga

Informasi tentang jumlah keluarga dan komposisi anggota keluarga, diperlukan dalam perencanaan maupun implementasi kebijakan pemenuhan pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, kebutuhan pangan, pengentasan kemiskinan, dan sebagainya.

Keluarga didefiniskan sebagai sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang masih mempunyai hubungan kekerabatan/ hubungan darah karena perkawinan, kelahiran, adopsi dan sebagainya. Keluarga dapat dibagi menjadi 2 tipe yaitu :

- Keluarga inti (*nuclear family*), yaitu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak kandung, anak angkat maupun adopsi yang belum kawin, atau ayah dengan anak-anak yang belum kawin atau ibu dengan anak-anak yang belum kawin.
- Keluarga luas (*extended family*), adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, anak-anak baik yang sudah kawin atau belum, cucu, orang tua, mertua maupun kerabat-kerabat yang menjadi tanggungan kepala keluarga.

Beberapa indikator yang diperlukan untuk menggambarkan kondisi keluarga antara lain :

1) ***Jumlah Keluarga dan Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga***

Banyaknya jumlah anggota keluarga dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi lingkungan dan kesejahteraan dalam satu keluarga, dimana diasumsikan semakin kecil jumlah anggota keluarga biasanya akan semakin baik tingkat kesejahteraannya.

Rata-rata jumlah anggota keluarga biasanya digunakan untuk melihat perubahan paradigma dari keluarga luas menjadi keluarga kecil.

Pada Tabel 22 dapat dilihat bahwa jumlah keluarga di Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2018 sebanyak 1.505.004 keluarga yang tersebar di 19 Kabupaten/Kota. Kota Padang sebagai Ibukota Provinsi Sumatera Barat memiliki jumlah keluarga terbesar yaitu 247.105 keluarga kemudian disusul oleh Kabupaten Agam sebanyak 142.784 keluarga, Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 136.632 keluarga, dan Kabupaten Padang Pariaman sebanyak 112.789 keluarga. Sedangkan jumlah keluarga terkecil berada di Kota Padang Panjang yaitu 15.725 keluarga.

Rata-rata jumlah anggota keluarga di Provinsi Sumatera Barat sebanyak 3,67 per keluarga. Ini menunjukkan bahwa keluarga di Provinsi Sumatera Barat lebih banyak merupakan keluarga inti dengan jumlah anggota keluarga sebanyak 3-4 orang. Bila diperhatikan menurut Kabupaten/Kota, rata-rata jumlah anggota keluarga di setiap Kabupaten/Kota juga terdiri dari 3-4 orang per keluarga.

Informasi tentang rata-rata jumlah anggota keluarga ini dapat digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan program keluarga berencana di wilayah Provinsi Sumatera Barat dan dapat digunakan pemerintah provinsi dalam merencanakan kebutuhan perumahan, seperti untuk menentukan ukuran rumah dengan berbagai tipe agar dapat memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat yang beranggota 3-4 orang.

Tabel 22.
Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga
Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2018

No	Kabupaten/Kota	Penduduk (Jiwa)		KK (Jiwa)		Rata-rata Jiwa/KK
		Jumlah	%	Jumlah	%	
1	Kabupaten Pesisir Selatan	508.691	9,22	136.632	9,08	3,72
2	Kabupaten Solok	384.091	6,96	103.505	6,88	3,71
3	Kabupaten Sijunjung	236.910	4,29	64.233	4,27	3,69
4	Kabupaten Tanah Datar	370.993	6,72	106.273	7,06	3,49
5	Kabupaten Padang Pariaman	427.919	7,75	112.789	7,49	3,79
6	Kabupaten Agam	528.619	9,58	142.784	9,49	3,70
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	380.173	6,89	114.495	7,61	3,32
8	Kabupaten Pasaman	318.379	5,77	84.408	5,61	3,77
9	Kabupaten Kep. Mentawai	87.517	1,59	23.157	1,54	3,78
10	Kabupaten Dharmasraya	212.653	3,85	60.211	4,00	3,53
11	Kabupaten Solok Selatan	180.905	3,28	48.171	3,20	3,76
12	Kabupaten Pasaman Barat	431.575	7,82	109.747	7,29	3,93
13	Kota Padang	900.922	16,32	247.105	16,42	3,65
14	Kota Solok	73.614	1,33	19.726	1,31	3,73
15	Kota Sawahlunto	66.377	1,20	19.394	1,29	3,42
16	Kota Padang Panjang	57.767	1,05	15.725	1,04	3,67
17	Kota Bukittinggi	121.590	2,20	33.432	2,22	3,64
18	Kota Payakumbuh	137.792	2,50	39.352	2,61	3,50
19	Kota Pariaman	92.758	1,68	23.865	1,59	3,89
	Sumatera Barat	**5.519.245**	**100,00**	**1.505.004**	**100,00**	**3,67**

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2018 (diolah)

2) *Status Hubungan Dengan Kepala Keluarga (SHDK)*

Hubungan dengan kepala keluarga digunakan untuk melihat banyaknya kepala keluarga menurut jenis kelamin, pola pengaturan tinggal bersama (*living arrangement*) dan pola pengasuhan anak dalam keluarga tersebut. Setiap anggota dalam keluarga mempunyai status hubungan dengan kepala keluarga seperti suami, istri, anak, menantu, cucu, keponakan, orang tua, dan mertua, termasuk adanya orang lain yang tinggal bersama seperti pembantu rumah tangga.

Tabel distribusi anggota keluarga berdasarkan status hubungan dengan kepala keluarga Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2018 dapat dilihat pada Tabel 23 di bawah ini :

Tabel 23.
Distribusi Anggota Keluarga Berdasarkan Status Hubungan Dengan Kepala Keluarga Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2018

No	Status Hubungan Dalam Keluarga	Laki-Laki (Jiwa)		Perempuan (Jiwa)		Total	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
01	Kepala Keluarga	1.246.097	44,78	258.907	9,46	1.505.004	27,27
02	Suami	166	0,01	0	0,00	166	0,00
03	Istri	0	0,00	1.174.244	42,91	1.174.244	21,28
04	Anak	1.455.099	52,29	1.204.937	44,03	2.660.036	48,20
05	Menantu	421	0,02	180	0,01	601	0,01
06	Cucu	17.631	0,63	14.530	0,53	32.161	0,58
07	Orang Tua	1.739	0,06	14.440	0,53	16.179	0,29
08	Mertua	4.119	0,15	33.018	1,21	37.137	0,67
09	Famili Lain	49.478	1,78	30.434	1,11	79.912	1,45
10	Pembantu	57	0,00	132	0,00	189	0,00
11	Lainnya	7.769	0,28	5.847	0,21	13.616	0,25
	TOTAL	2.782.576	100,00	2.736.669	100,00	5.519.245	100,00

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2018 (diolah)

Dari Tabel 23 dapat kita ketahui bahwa status hubungan keluarga dengan kepala keluarga yang terbesar adalah anak sebanyak 2.660.036 jiwa (48,20 persen). Dari Tabel 23 juga terlihat

bahwa terdapat jumlah Kepala Keluarga yang berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 258.907 jiwa (9,46 persen). Ini terjadi karena adanya perceraian baik cerai mati maupun cerai hidup yang akhirnya terpaksa menjadikan perempuan sebagai kepala keluarga.

3) ***Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Umur***

Informasi tentang kelompok umur dari kepala keluarga dan anggota keluarga penting diketahui terutama untuk melakukan analisis kondisi demografi keluarga serta perencanaan kebijakan dasar seperti pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, kemiskinan, dan lain-lain.

Tabel kepala keluarga menurut umur dan jenis kelamin Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2018 dapat dilihat pada Tabel 24 di bawah, dimana terlihat bahwa kepala keluarga terbesar jumlahnya berada pada kelompok umur 35-39 tahun yaitu sebanyak 190.672 jiwa (12,67 persen) dimana jumlah kepala keluarga laki-laki terbesar juga berada pada kelompok umur 35-39 tahun sebanyak 177.162 jiwa (14,22 persen) dan kepala keluarga perempuan terbesar berada pada kelompok umur 60-64 tahun sebanyak 36.974 jiwa (14,28 persen). Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kesempatan hidup perempuan lebih besar bila dibandingkan dengan laki-laki, dimana mulai pada kelompok umur 45-49, jumlah kepala keluarga perempuan mengalami peningkatan, sedangkan jumlah kepala keluarga laki-laki justru mengalami hal sebaliknya dengan mengalami penurunan. Untuk itu perlu dipersiapkan perempuan-perempuan dengan ketrampilan-ketrampilan yang dapat menunjang kehidupannya dari sisi

sosial, ekonomi, dan psikologi, kelak bila sudah tidak memiliki suami lagi, baik yang disebabkan karena cerai hidup maupun cerai mati.

Tabel 24.
Kepala Keluarga Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2018

No	Kelompok Umur	Laki-Laki (Jiwa)		Perempuan (Jiwa)		Total	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	00-04	2	0,00	0	0,00	2	0,00
2	05-09	2	0,00	0	0,00	2	0,00
3	10-14	3	0,00	5	0,00	8	0,00
4	15-19	719	0,06	525	0,20	1.244	0,08
5	20-24	15.710	1,26	3.558	1,37	19.268	1,28
6	25-29	70.296	5,64	6.974	2,69	77.270	5,13
7	30-34	145.002	11,64	10.473	4,05	155.475	10,33
8	35-39	177.162	14,22	13.510	5,22	190.672	12,67
9	40-44	170.503	13,68	17.313	6,69	187.816	12,48
10	45-49	154.500	12,40	21.577	8,33	176.077	11,70
11	50-54	134.868	10,82	27.175	10,50	162.043	10,77
12	55-59	118.324	9,50	31.968	12,35	150.292	9,99
13	60-64	103.221	8,28	36.974	14,28	140.195	9,32
14	65-69	70.292	5,64	30.467	11,77	100.759	6,69
15	70-74	35.368	2,84	21.965	8,48	57.333	3,81
16	> 75	50.125	4,02	36.423	14,07	86.548	5,75
	Total	**1.246.097**	**100,00**	**258.907**	**100,00**	**1.505.004**	**100,00**

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2018 (diolah)

4) *Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin*

Masyarakat Indonesia cenderung menganggap bahwa laki-laki adalah penanggung jawab ekonomi keluarga sekaligus sebagai kepala keluarga. Namun dalam kenyataannya tidak sedikit perempuan yang menjadi kepala keluarga karena pasangan meninggal, cerai atau sebab-sebab yang lain.

Karakteristik kepala keluarga menurut jenis kelamin dapat menunjukkan seberapa banyak perempuan yang menjadi kepala keluarga, bagaimana kecenderungannya di masa depan dan

bagaimana gambaran sosial ekonomi keluarga yang dikepalai oleh seorang perempuan.

Penambahan persentase kepala keluarga perempuan tersebut dapat juga menggambarkan tingkat perceraian (baik cerai hidup maupun cerai mati) yang terjadi dan juga dapat menggambarkan salah satu tren gaya hidup modern.

Tabel kepala keluarga menurut jenis kelamin dan wilayah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2018 disajikan dalam Tabel 25 berikut ini :

Tabel 25.
Kepala Keluarga Menurut Jenis Kelamin dan Wilayah
Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2018

No	Kabupaten/Kota	Laki-Laki (Jiwa)		Perempuan (Jiwa)		Total	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Kabupaten Pesisir Selatan	114.831	9,22	21.801	8,42	136.632	9,08
2	Kabupaten Solok	86.436	6,94	17.069	6,59	103.505	6,88
3	Kabupaten Sijunjung	56.407	4,53	7.826	3,02	64.233	4,27
4	Kabupaten Tanah Datar	86.290	6,92	19.983	7,72	106.273	7,06
5	Kabupaten Padang Pariaman	85.843	6,89	26.946	10,41	112.789	7,49
6	Kabupaten Agam	115.011	9,23	27.773	10,73	142.784	9,49
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	88.467	7,10	26.028	10,05	114.495	7,61
8	Kabupaten Pasaman	70.410	5,65	13.998	5,41	84.408	5,61
9	Kabupaten Kep. Mentawai	20.140	1,62	3.017	1,17	23.157	1,54
10	Kabupaten Dharmasraya	53.699	4,31	6.512	2,52	60.211	4,00
11	Kabupaten Solok Selatan	41.868	3,36	6.303	2,43	48.171	3,20
12	Kabupaten Pasaman Barat	93.558	7,51	16.189	6,25	109.747	7,29
13	Kota Padang	208.359	16,72	38.746	14,97	247.105	16,42
14	Kota Solok	16.679	1,34	3.047	1,18	19.726	1,31
15	Kota Sawahlunto	15.840	1,27	3.554	1,37	19.394	1,29
16	Kota Padang Panjang	12.772	1,02	2.953	1,14	15.725	1,04
17	Kota Bukittinggi	27.703	2,22	5.729	2,21	33.432	2,22
18	Kota Payakumbuh	32.899	2,64	6.453	2,49	39.352	2,61
19	Kota Pariaman	18.885	1,52	4.980	1,92	23.865	1,59
	Sumatera Barat	**1.246.097**	**100,00**	**258.907**	**100,00**	**1.505.004**	**100,00**

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2018 (diolah)

Dari Tabel 25 tersebut terlihat bahwa mayoritas kepala keluarga di Provinsi Sumatera Barat adalah laki-laki yaitu sebanyak

1.246.097 jiwa, sedangkan perempuan yang menjadi kepala keluarga sebanyak 258.907 jiwa atau dengan perbandingan 5 : 1, yang artinya dari 5 kepala keluarga laki-laki terdapat 1 kepala keluarga perempuan. Hal yang sama juga terlihat pada di seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat, dimana kepala keluarga laki-laki lebih banyak bila dibandingkan dengan kepala keluarga perempuan dengan perbandingan terbesar berada di Kabupaten Dharmasraya, yaitu 8 : 1, dan selanjutnya perbandingan terbesar juga terlihat di Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Kepulauan Mentawai, dan Kabupaten Solok Selatan, yaitu 7 : 1 dan yang terendah adalah Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Lima Puluh Kota dengan perbandingan 3 : 1. Dari Tabel 25 juga dapat dilihat bahwa jumlah kepala keluarga laki-laki terbesar berada di Kota Padang sebanyak 208.359 jiwa (16,72 persen), sedangkan untuk kepala keluarga perempuan terbesar juga berada di Kota Padang yaitu sebanyak 38.746 jiwa (14,97 persen).

5) ***Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Status Kawin***

Dalam konsep demografi kepala keluarga merupakan seseorang baik laki-laki maupun perempuan, berstatus menikah maupun tidak, yang mempunyai peran, fungsi, dan tanggung jawab sebagai kepala keluarga baik secara ekonomi, sosial, maupun psikologi.

Karakteristik kepala keluarga berdasarkan status kawin dapat digunakan untuk melihat jumlah keluarga yang dikepalai oleh lajang maupun mereka yang berstatus cerai baik hidup maupun mati.

Tabel kepala keluarga berdasarkan status kawin dan jenis kelamin Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2018 dapat dilihat pada Tabel 26 di bawah ini :

Tabel 26.
Kepala Keluarga Menurut Status Kawin dan Jenis Kelamin
Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2018

No	Status Kawin	Laki-Laki (Jiwa)		Perempuan (Jiwa)		Total	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Belum Kawin	19.337	1,55	10.383	4,01	29.720	1,97
2	Kawin	1.192.219	95,68	52.026	20,09	1.244.245	82,67
3	Cerai Hidup	11.806	0,95	40.445	15,62	52.251	3,47
4	Cerai Mati	22.735	1,82	156.053	60,27	178.788	11,88
	Total	**1.246.097**	**100,00**	**258.907**	**100,00**	**1.505.004**	**100,00**

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2018 (diolah)

Dari tabel terlihat bahwa kepala keluarga berstatus kawin yaitu sebesar 1.244.245 jiwa (82,67 persen), dan pada umumnya laki-laki yaitu sebanyak 1.192.219 jiwa (95,68 persen). Kepala keluarga yang berstatus belum kawin hanya 29.720 jiwa (1,97 persen) saja. Meskipun demikian perlu dikaji kembali apakah mereka yang berstatus lajang ini memiliki anggota keluarga atau dia hidup sendirian. Kepala keluarga yang berstatus cerai baik cerai hidup maupun cerai mati, persentase perempuan jauh lebih besar dibandingkan laki-laki yaitu masing-masing 77,41 persen cerai hidup dan 87,28 persen berstatus cerai mati. Kebiasaan kawin ulang yang cepat dilakukan oleh laki-laki, menyebabkan perbedaan persentase tersebut. Selain itu, perempuan yang berstatus cerai baik hidup maupun mati, mempunyai pertimbangan untuk melakukan kawin ulang terutama apabila mereka telah memiliki anak-anak yang biasanya menjadi tanggung jawab perempuan. Meskipun pada

saat ini kecenderungan tersebut sudah mulai menurun tetapi kondisi ini masih terjadi. Faktor yang lain adalah mereka yang cerai mati, terjadi pada kelompok umur yang lebih tua, yang menyebabkan perempuan enggan untuk menikah kembali.

Dalam administrasi kependudukan, perempuan berstatus kawin yang menjadi kepala keluarga juga diberikan kepada mereka yang berstatus istri kedua, ketiga maupun keempat. Oleh sebab itu proporsi perempuan kepala keluarga yang cukup besar (17,20 persen), diduga termasuk mereka yang menjadi kepala keluarga ini adalah menjadi isteri kedua, ketiga, dan seterusnya. Disamping itu, terlihat pula adanya kepala keluarga yang berstatus belum kawin (lajang) sebanyak 1,97 persen. Proporsi kepala keluarga laki-laki yang belum kawin lebih tinggi daripada kepala keluarga perempuan. Biasanya kepala keluarga yang berstatus belum kawin merupakan anggota keluarga yang menggantikan orang tua yang meninggal, atau kepala keluarga tersebut hidup sendirian.

Ada kecendrungan yang terjadi, jika seorang perempuan mengalami peristiwa perceraian baik cerai hidup maupun kematian, maka ketika dia melakukan perkawinan berikutnya, sering kali mereka tidak melaporkan perkawinannya. Ini terjadi karena kebanyakan mereka melakukan perkawinan siri baik dengan laki-laki yang sudah berstatus duda (tapi tidak cerai secara resmi) maupun dengan laki-laki yang masih berstatus suami perempuan lain, sehingga yang bersangkutan agak sungkan melaporkan perkawinan yang mereka alami. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah khususnya Kementerian Agama agar selalu mensosialisasikan tentang pentingnya

pernikahan dilakukan secara resmi melalui Kantor Urusan Agama (KUA) atau bagi yang telah melakukan pernikahan yang sah secara agama namun tidak memiliki buku nikah, dapat mengajukan permohonan untuk dilakukan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama sehingga perkawinannya tercatat secara hukum negara dan diakui oleh negara, dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut terlindungi haknya secara hukum.

6) ***Karakteristik Kepala Keluarga Menurut Pendidikan***

Pendidikan yang dicapai merupakan salah satu indikator kualitas hidup manusia serta menunjukan status sosial dan status kesejahteraan seseorang. Semakin tinggi pendidikan yang dicapai oleh seorang kepala keluarga diharapkan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan keluarga itu.

Untuk itu jenjang pendidikan yang dicapai oleh kepala keluarga dapat digunakan untuk melihat gambaran kualitas sosial maupun ekonomi keluarga.

Tabel karakteristik kepala keluarga menurut pendidikan dan jenis kelamin Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2018 dapat dilihat pada Tabel 27 yang menunjukan bahwa tingkat pendidikan kepala keluarga yang terbesar adalah tamat SD/sederajat sebanyak 458.960 jiwa (30,50 persen), kemudian diikuti dengan pendidikan SLTA/sederajat sebanyak 433.475 jiwa (28,80 persen), dan SLTP/sederajat sebanyak 271.036 jiwa (18,01 persen). Proporsi kepala keluarga yang berpendidikan D1/D2/D3 hanya sebesar 2,76 persen dan S1/S2/S3 sebesar 6,80 persen, dan masih adanya kepala keluarga yang tidak sekolah dan belum tamat SD persentasenya mencapai 13,14 persen. Gambaran diatas menunjukkan bahwa sebagian besar kepala

keluarga masih berpendidikan SD ke bawah. Hal ini sesuai dengan kondisi pendidikan secara nasional, yang harus memperoleh perhatian serius dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Proses globalisasi yang sebentar lagi berlangsung, bonus demografi yang juga sedang berlangsung, harus dimanfaatkan untuk meningkatkan tingkat pendidikan penduduk Provinsi Sumatera Barat agar mempunyai daya saing global. Apabila dilihat dari tingkat pendidikan ini, maka kepala keluarga yang mempunyai pendidikan rendah diduga mempunyai pendapatan yang rendah, sehingga diduga mereka tidak mampu memberikan pendidikan yang tinggi bagi anggota keluarganya. Biasanya kepala keluarga yang berpendidikan rendah akan bekerja di sektor informal.

Tabel 27.
Kepala Keluarga Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin
Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2018

No	Pendidikan	Laki-Laki (Jiwa)		Perempuan (Jiwa)		Total	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Tidak/Belum Sekolah	38.374	3,08	16.885	6,52	55.259	3,67
2	Belum Tamat SD/Sederajat	104.382	8,38	38.131	14,73	142.513	9,47
3	Tamat SD/Sederajat	357.982	28,73	100.978	39,00	458.960	30,50
4	SLTP/Sederajat	234.630	18,83	36.406	14,06	271.036	18,01
5	SLTA/Sederajat	384.782	30,88	48.693	18,81	433.475	28,80
6	Diploma I/II	8.887	0,71	3.257	1,26	12.144	0,81
7	Akademi/Diploma III/Sarmud	24.988	2,01	4.338	1,68	29.326	1,95
8	Diploma IV/Strata I	82.745	6,64	9.447	3,65	92.192	6,13
9	Strata II	8.499	0,68	682	0,26	9.181	0,61
10	Strata III	828	0,07	90	0,03	918	0,06
	Total	**1.246.097**	**100,00**	**258.907**	**100,00**	**1.505.004**	**100,00**

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2018 (diolah)

Jika dikaitkan dengan jenis kelamin, nampak bahwa lebih separuh (60,25 persen) kepala keluarga perempuan yang tidak

bersekolah, belum tamat SD, dan tamat SD. Hal ini lebih tinggi dibandingkan dengan kepala keluarga laki-laki maka dugaan keluarga yang dikepalai perempuan akan mempunyai status ekonomi yang lebih rendah dibandingkan yang dikepalai laki-laki mendekati kenyataan.

Melihat status pendidikan, umur dan jenis kelamin, nampak bahwa kepala keluarga perempuan berada pada umur yang relatif lebih tua dan berpendidikan rendah dibandingkan dengan kepala keluarga laki-laki.

7) ***Karakteristik Kepala Keluarga Menurut Status Bekerja***

Status ekonomi keluarga dapat dilihat dari kegiatan ekonomi kepala keluarga maupun anggota keluarga serta besar sumbangan mereka terhadap ekonomi keluarga. Oleh sebab itu, informasi mengenai kepala keluarga menurut status pekerjaan perlu diketahui untuk perencanaan pelayanan kebutuhan dasar penduduk. Tabel distribusi kepala keluarga menurut status bekerja dan jenis kelamin Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2018 dapat dilihat pada Tabel 28 di bawah ini :

Tabel 28.
Distribusi Kepala Keluarga Menurut Status Bekerja dan Jenis Kelamin
Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2018

No	Status Bekerja	Laki-Laki (Jiwa)		Perempuan (Jiwa)		Total	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Bekerja	1.200.475	96,34	71.488	27,61	1.271.963	84,52
2	Belum/Tidak Bekerja	15.045	1,21	8.701	3,36	23.746	1,58
3	Pelajar/mahasiswa	3.684	0,30	2.672	1,03	6.356	0,42
4	Pensiunan	26.697	2,14	7.458	2,88	34.155	2,27
5	Mengurus Rumah Tangga	196	0,02	168.588	65,12	168.784	11,21
	Total	**1.246.097**	**100,00**	**258.907**	**100,00**	**1.505.004**	**100,00**

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2018 (diolah)

Proporsi kepala keluarga laki-laki yang bekerja lebih besar dibandingkan kepala keluarga perempuan. Hal ini

menunjukkan bahwa peran dan fungsi laki-laki adalah penanggung jawab ekonomi keluarga sehingga lebih banyak yang harus terjun ke pasar kerja, sementara perempuan biasanya hanya berfungsi sebagai ibu rumah tangga yang bertanggung jawab atas terselenggaranya keluarga yang bersangkutan. Meskipun demikian, perempuan pada masa kini mulai ikut terjun ke pasar kerja.

Proporsi kepala keluarga laki-laki yang mengurus rumah tangga hanya sebesar 0,02 persen sedangkan kepala keluarga perempuan yakni sebesar 65,12 persen. Untuk kepala keluarga yang belum/tidak bekerja per kondisi 31 Desember 2018 sebanyak 23.746 jiwa (1,58 persen), dimana proporsi kepala keluarga laki-laki lebih sedikit dibandingkan dengan kepala keluarga perempuan. Ini perlu menjadi perhatian serius oleh pemerintah daerah khususnya dalam penyediaan lapangan pekerjaan industri rumah tangga bagi ibu-ibu yang menjadi kepala keluarga. Disamping itu terdapat pula kepala keluarga yang sudah pensiun sebesar 2,27 persen dengan proporsi jumlah pensiunan kepala keluarga laki-laki lebih besar dari pensiunan kepala keluarga perempuan. Hal ini juga harus menjadi perhatian serius pemerintah khususnya instansi terkait dalam hal penyediaan program-program yang memperhatikan para manula yang sudah tidak produktif lagi.

Disamping itu, dari Tabel 28 juga terlihat bahwa terdapat 6.356 jiwa (0,42 persen) kepala keluarga yang mempunyai pekerjaan sebagai pelajar/mahasiswa. Walau data ini perlu ditelisik lagi kebenarannya, namun demikian, bukan tidak mungkin ada kepala keluarga yang memang masih usia sekolah, dikarenakan

orang tuanya sudah meninggal atau karena alasan permasalahan sosial masyarakat lainnya sehingga yang bersangkutan terpaksa menanggung beban keluarga dalam melanjutkan kehidupannya. Bagi mereka itu mungkin perlu perhatian dari Dinas Pendidikan khususnya dalam hal menjamin ketersediaan kesempatan menempuh pendidikan bagi mereka sehingga mereka bisa mandiri dan bisa mencapai cita-cita untuk masa depan yang lebih baik.

d. Kelahiran (Fertilitas)

Kelahiran merupakan salah satu komponen pertumbuhan penduduk yang bersifat menambah jumlah penduduk. Banyaknya kelahiran membawa konsekuensi pada pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang bayi, dari pemenuhan gizi, perawatan kesehatan ibu dan anak, dan pada gilirannya membutuhkan fasilitas pendidikan termasuk pemenuhan kesempatan kerja.

Tingkat kelahiran dimasa lalu akan mempengaruhi tinggi rendahnya jumlah kelahiran dimasa kini, sehingga pengetahuan tentang fertilitas beserta indikator-indikatornya, termasuk keluarga berencana sangat berguna bagi para penentu kebijakan maupun perencana dalam menyusun program-program pembangunan sosial terutama terkait dengan upaya peningkatan kesejahteraan ibu, anak dan pembangunan keluarga.

Indikator yang biasa digunakan untuk menghitung kelahiran (fertilitas) adalah :

1) *Jumlah Kelahiran*

Informasi tentang jumlah kelahiran bermanfaat untuk perencanaan pembangunan berbagai fasilitas yang dibutuhkan khususnya pengembangan fasilitas kesehatan ibu dan anak, baik untuk masa kini maupun untuk masa yang akan datang. Selain itu, data tentang jumlah kelahiran hidup merupakan dasar untuk perhitungan berbagai indikator fertilitas lainnya.

Jumlah Kelahiran Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 tersaji pada Tabel 29 di bawah ini :

Tabel 29.
Jumlah Kelahiran Hidup
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kelahiran Hidup (Jiwa)		
		Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Kabupaten Pesisir Selatan	4.439	4.239	8.678
2	Kabupaten Solok	3.922	3.710	7.632
3	Kabupaten Sijunjung	2.310	2.110	4.420
4	Kabupaten Tanah Datar	2.512	2.282	4.794
5	Kabupaten Padang Pariaman	3.934	3.746	7.680
6	Kabupaten Agam	3.747	3.540	7.287
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	3.301	3.054	6.355
8	Kabupaten Pasaman	2.772	2.567	5.339
9	Kabupaten Kep. Mentawai	753	753	1.506
10	Kabupaten Dharmasraya	1.818	2.093	3.911
11	Kabupaten Solok Selatan	1.529	1.620	3.149
12	Kabupaten Pasaman Barat	4.255	3.902	8.157
13	Kota Padang	8.075	8.207	16.282
14	Kota Solok	727	626	1.353
15	Kota Sawahlunto	542	459	1.001
16	Kota Padang Panjang	538	524	1.062
17	Kota Bukittinggi	1.261	1.222	2.483
18	Kota Payakumbuh	1.435	1.346	2.781
19	Kota Pariaman	866	774	1.640
	SUMATERA BARAT	**48.736**	**46.774**	**95.510**

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat (diolah)

Dari Tabel 29 tersebut dapat dilihat bahwa banyaknya kelahiran hidup di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2018 adalah sebanyak 95.510 jiwa dengan proporsi laki-laki sebanyak 48.736 jiwa dan perempuan 46.774 jiwa. Bila dilihat dari proporsi tersebut jumlah kelahiran hidup yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak bila dibandingkan perempuan.

Dari Tabel 29 juga dapat dilihat kelahiran hidup terbesar berada di Kota Padang sebesar 16.282 kelahiran, yang memang Kota Padang adalah Kota yang memiliki jumlah penduduk terbesar di Sumatera Barat. Sedangkan kelahiran hidup terendah berada di Kota Sawahlunto yaitu sebesar 1.001 kelahiran.

2) ***Angka Kelahiran Kasar (Crude Birth Rate/CBR)***

Angka kelahiran kasar merupakan ukuran yang paling mudah dihitung tetapi masih kasar karena tidak memperhitungkan jumlah penduduk yang beresiko melahirkan (laki-laki, anak-anak, dan orang tua). Angka kelahiran kasar (CBR) ini berguna untuk mengetahui tingkat kelahiran yang terjadi di suatu daerah tertentu pada tahun tertentu.

Angka kelahiran kasar (*Crude Birth Rate/CBR*) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 30 yaitu sebesar 17,32, yang artinya bahwa dari 1.000 penduduk Sumatera Barat pada pertengahan tahun 2018 terjadi 17-18 kelahiran hidup. Secara Kabupaten/Kota, dari Tabel 30 juga dapat dilihat CBR terbesar berada di Kota Bukittinggi yaitu sebesar 20,63, yang merupakan Kota dengan tingkat kepadatan penduduk terbesar di Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan CBR yang terendah berada di Kabupaten Tanah Datar yaitu sebesar 12,98.

Tabel 30.
Angka Kelahiran Kasar (*Crude Birth Rate/CBR*)
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)		Crude Birth Rate (CBR)
		Pada Pertengahan Tahun	Jumlah Kelahiran	
1	Kabupaten Pesisir Selatan	514.107	8.678	16,88
2	Kabupaten Solok	380.692	7.632	20,05
3	Kabupaten Sijunjung	235.913	4.420	18,74
4	Kabupaten Tanah Datar	369.374	4.794	12,98
5	Kabupaten Padang Pariaman	446.240	7.680	17,21
6	Kabupaten Agam	527.730	7.287	13,81
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	377.826	6.355	16,82
8	Kabupaten Pasaman	317.500	5.339	16,82
9	Kabupaten Kep. Mentawai	86.593	1.506	17,39
10	Kabupaten Dharmasraya	210.268	3.911	18,60
11	Kabupaten Solok Selatan	179.796	3.149	17,51
12	Kabupaten Pasaman Barat	430.740	8.157	18,94
13	Kota Padang	894.299	16.282	18,21
14	Kota Solok	72.669	1.353	18,62
15	Kota Sawahlunto	65.710	1.001	15,23
16	Kota Padang Panjang	57.165	1.062	18,58
17	Kota Bukittinggi	120.387	2.483	20,63
18	Kota Payakumbuh	136.501	2.781	20,37
19	Kota Pariaman	91.743	1.640	17,88
	Sumatera Barat	**5.515.246**	**95.510**	**17,32**

Sumber : DKB II 2017, DKB II 2018, dan Dinas Kesehatan Prov. Sumbar (diolah)

3) *Angka Kematian Kasar (Crude Death Rate/CDR)*

Angka kematian kasar merupakan indikator sederhana yang tidak memperhitungkan pengaruh umur penduduk dan jenis kelamin. Angka kematian kasar (*Crude Death Rate/CDR*) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 tersaji pada Tabel 31, dimana data jumlah kematian merupakan data pelayanan yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat yang diperoleh dari pelaporan kematian yang dilakukan oleh penduduk yang berada di masing-masing Kabupaten/Kota.

Tabel 31.
Angka Kematian Kasar (*Crude Death Rate/CDR*)
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)		Crude Death Rate (CDR)
		Pada Pertengahan Tahun	Jumlah Kematian	
1	Kabupaten Pesisir Selatan	514.107	3.482	6,77
2	Kabupaten Solok	380.692	383	1,01
3	Kabupaten Sijunjung	235.913	873	3,70
4	Kabupaten Tanah Datar	369.374	7.410	20,06
5	Kabupaten Padang Pariaman	446.240	1.964	4,40
6	Kabupaten Agam	527.730	4.378	8,30
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	377.826	186	0,49
8	Kabupaten Pasaman	317.500	2.894	9,11
9	Kabupaten Kep. Mentawai	86.593	190	2,19
10	Kabupaten Dharmasraya	210.268	174	0,83
11	Kabupaten Solok Selatan	179.796	1.356	7,54
12	Kabupaten Pasaman Barat	430.740	4.947	11,48
13	Kota Padang	894.299	1.021	1,14
14	Kota Solok	72.669	1.011	13,91
15	Kota Sawahlunto	65.710	388	5,90
16	Kota Padang Panjang	57.165	279	4,88
17	Kota Bukittinggi	120.387	1.647	13,68
18	Kota Payakumbuh	136.501	1.444	10,58
19	Kota Pariaman	91.743	1.918	20,91
	Sumatera Barat	**5.515.246**	**35.945**	**6,52**

Sumber : DKB II 2017, DKB II 2018, dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat (diolah)

Dari Tabel 31 dapat diketahui bahwa angka kematian kasar (*Crude Death Rate/CDR*) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 adalah sebesar 9,44 yang artinya bahwa dari 1.000 penduduk Sumatera Barat pada pertengahan tahun 2018 terjadi 6-7 kematian.

2. Kualitas Penduduk

a. Kesehatan

1) *Rasio Anak dan Perempuan (Child Women Ratio/CWR)*

Rasio anak dan perempuan ini digunakan untuk melihat tingkat fertilitas pada suatu wilayah dan rasio ini berguna sebagai indikator fertilitas penduduk.

Rasio anak dan perempuan (*Child Women Ratio/CWR*) Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2018 dapat dilihat pada Tabel 32 di bawah ini :

Tabel 32.
Rasio Anak dan Perempuan (*Child Women Ratio/CWR*)
Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2018

No	Kabupaten/Kota	Penduduk Perempuan Usia 15-49 Tahun	Penduduk Usia 0-4 Tahun	Rasio Anak dan Perempuan (CWR)
1	Kabupaten Pesisir Selatan	134.683	33.969	25,22
2	Kabupaten Solok	101.073	25.636	25,36
3	Kabupaten Sijunjung	63.187	16.418	25,98
4	Kabupaten Tanah Datar	92.281	19.994	21,67
5	Kabupaten Padang Pariaman	107.248	28.048	26,15
6	Kabupaten Agam	132.519	30.909	23,32
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	98.156	23.109	23,54
8	Kabupaten Pasaman	84.859	20.561	24,23
9	Kabupaten Kep. Mentawai	23.300	5.762	24,73
10	Kabupaten Dharmasraya	58.479	16.801	28,73
11	Kabupaten Solok Selatan	49.949	12.558	25,14
12	Kabupaten Pasaman Barat	118.975	31.583	26,55
13	Kota Padang	241.069	67.948	28,19
14	Kota Solok	19.943	6.093	30,55
15	Kota Sawahlunto	17.154	5.022	29,28
16	Kota Padang Panjang	15.334	4.641	30,27
17	Kota Bukittinggi	32.565	9.089	27,91
18	Kota Payakumbuh	36.296	9.858	27,16
19	Kota Pariaman	24.355	6.617	27,17
	Sumatera Barat	**1.451.425**	**374.616**	**25,81**

Sumber : Data Kependudukan Bersih (DKB) Semester II Tahun 2018 (diolah)

Dari Tabel 32 tersebut menunjukkan angka CWR Provinsi Sumatera Barat sebesar 25,81 persen artinya bahwa pada tahun 2018 per 31 Desember 2018 terdapat 25 sampai dengan 26 anak dibawah 5 tahun (0-4 tahun) dari setiap 100 perempuan usia 15-49 tahun.

Bila diklasifikasikan berdasarkan Kabupaten/Kota, persentase *Child Woman Ratio (CWR)* terbesar berada pada Kota Solok yaitu sebesar 30,55 persen, selanjutnya adalah Kota Padang Panjang dengan *Child Woman Ratio (CWR)* sebesar 30,27 persen, sedangkan untuk persentase *Child Woman Ratio (CWR)* terkecil berada pada Kabupaten Tanah Datar, yaitu sebesar 21,67 persen.

2) *Kematian (Mortalitas)*

Tinggi rendahnya tingkat kematian (mortalitas) penduduk di suatu daerah akan mempengaruhi pertumbuhan penduduk, tetapi juga merupakan cerminan dari tinggi rendahnya tingkat kesehatan penduduk di daerah tersebut. Sehingga indikator kematian penting dalam merencanakan berbagai kebijakan di bidang kesehatan maupun untuk mengevaluasi program kegiatan pembangunan yang telah dilakukan.

Tingkat kematian dipengaruhi oleh : faktor sosial ekonomi, pekerjaan, tempat tinggal, pendidikan, umur, jenis kelamin, dan lain-lain. Kematian juga dapat dilihat dari penyebab kematian, seperti akibat penyakit menular atau penyakit degeneratif, kecelakaan maupun penyebab yang lain.

Kematian dewasa umumnya disebabkan karena penyakit menular, penyakit degeneratif, kecelakaan atau gaya hidup yang beresiko terhadap kematian. Kematian bayi dan balita umumnya disebabkan oleh penyakit sistem pernapasan bagian atas (ISPA)

dan diare, yang merupakan penyakit karena infeksi kuman. Faktor gizi buruk juga menyebabkan anak-anak rentan terhadap penyakit menular, sehingga mudah terinfeksi dan menyebabkan tingginya kematian bayi dan balita di suatu daerah.

Indikator kematian yang biasa digunakan untuk mengukur kualitas hidup/kesehatan di suatu daerah adalah :

a) *Angka Kematian Bayi (Infant Mortality Rate/IMR/AKB)*

Kematian bayi didefinisikan sebagai jumlah kematian bayi berusia di bawah 1 tahun pada 1.000 kelahiran hidup dalam tahun tertentu. Banyak faktor yang dikaitkan dengan kematian bayi. Secara garis besar, dari sisi penyebabnya, kematian bayi ada dua macam yaitu endogen dan eksogen.

Kematian *bayi endogen* atau yang umum disebut dengan *kematian neonatal*, adalah kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama setelah dilahirkan, dan umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir, yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan.

Kematian bayi eksogen atau post-neonatal, adalah kematian bayi yang terjadi setelah usia satu bulan sampai menjelang usia satu tahun yang disebabkan oleh faktor-faktor yang terkait dengan pengaruh lingkungan luar

Angka kematian bayi digunakan sebagai indikator yang menggambarkan kemajuan pembangunan yang dapat menggambarkan tingkat pelayanan kesehatan ibu dan anak. Untuk Provinsi Sumatera Barat, AKB/IMR tahun 2018 dapat dilihat dari Tabel 33 di bawah ini :

Tabel 33.
Angka Kematian Bayi (*Infant Mortality Rate*)
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018

No	Kabupaten/Kota	Kelahiran Hidup		Kematian Bayi		AKB/IMR
		Jumlah (Jiwa)	%	Jumlah (Jiwa)	%	
1	Kabupaten Pesisir Selatan	8.678	9,09	94	12,19	10,83
2	Kabupaten Solok	7.632	7,99	63	8,17	8,25
3	Kabupaten Sijunjung	4.420	4,63	70	9,08	15,84
4	Kabupaten Tanah Datar	4.794	5,02	37	4,80	7,72
5	Kabupaten Padang Pariaman	7.680	8,04	18	2,33	2,34
6	Kabupaten Agam	7.287	7,63	70	9,08	9,61
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	6.355	6,65	61	7,91	9,60
8	Kabupaten Pasaman	5.339	5,59	36	4,67	6,74
9	Kabupaten Kep. Mentawai	1.506	1,58	6	0,78	3,98
10	Kabupaten Dharmasraya	3.911	4,09	14	1,82	3,58
11	Kabupaten Solok Selatan	3.149	3,30	58	7,52	18,42
12	Kabupaten Pasaman Barat	8.157	8,54	74	9,60	9,07
13	Kota Padang	16.282	17,05	91	11,80	5,59
14	Kota Solok	1.353	1,42	8	1,04	5,91
15	Kota Sawahlunto	1.001	1,05	15	1,95	14,99
16	Kota Padang Panjang	1.062	1,11	13	1,69	12,24
17	Kota Bukittinggi	2.483	2,60	2	0,26	0,81
18	Kota Payakumbuh	2.781	2,91	16	2,08	5,75
19	Kota Pariaman	1.640	1,72	25	3,24	15,24
	Sumatera Barat	**95.510**	**100,00**	**771**	**100,00**	**8,07**

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat (diolah)

Dari Tabel 33 terlihat bahwa selama tahun 2018, dari 1.000 kelahiran hidup di Provinsi Sumatera Barat, terjadi kematian bayi sebanyak 8 orang. Kematian bayi terbanyak terdapat di Kabupaten Kabupaten Solok Selatan yaitu 18-19 kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup.

Angka kematian bayi ini cukup tinggi, dan faktor yang menyebabkannya adalah rendahnya tingkat pengetahuan, pemahaman, kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap perawatan kehamilan sesuai standar, rendahnya tingkat pendidikan dan status ekonomi masyarakat terhadap perawatan kehamilan sesuai yang dianjurkan,

kurangnya partisipasi keluarga, masyarakat dan lintas program dalam program kesehatan ibu dan anak, belum optimalnya pelayanan kesehatan terhadap ibu, bayi dan balita serta kurangnya kualitas pelayanan kesehatan terhadap ibu, bayi dan balita.

b) *Angka Kematian Neonatal (Neo-Natal Death Rate/NNDR)*

Kematian neonatal atau kematian bayi endogen pada umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa sejak lahir atau selama kehamilan.

Angka kematian neonatal Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 34 berikut ini :

Tabel 34.
Angka Kematian Neonatal (*Neo-Natal Death Rate/NNDR*)
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018

No	Kabupaten/Kota	Kelahiran Hidup		Kematian Neonatal		AK Neonatal
		Jumlah (Jiwa)	%	Jumlah (Jiwa)	%	
1	Kabupaten Pesisir Selatan	8.678	9,09	82	14,83	9,45
2	Kabupaten Solok	7.632	7,99	40	7,23	5,24
3	Kabupaten Sijunjung	4.420	4,63	30	5,42	6,79
4	Kabupaten Tanah Datar	4.794	5,02	31	5,61	6,47
5	Kabupaten Padang Pariaman	7.680	8,04	15	2,71	1,95
6	Kabupaten Agam	7.287	7,63	49	8,86	6,72
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	6.355	6,65	42	7,59	6,61
8	Kabupaten Pasaman	5.339	5,59	26	4,70	4,87
9	Kabupaten Kepulauan Mentawai	1.506	1,58	3	0,54	1,99
10	Kabupaten Dharmasraya	3.911	4,09	9	1,63	2,30
11	Kabupaten Solok Selatan	3.149	3,30	41	7,41	13,02
12	Kabupaten Pasaman Barat	8.157	8,54	57	10,31	6,99
13	Kota Padang	16.282	17,05	69	12,48	4,24
14	Kota Solok	1.353	1,42	5	0,90	3,70
15	Kota Sawahlunto	1.001	1,05	9	1,63	8,99
16	Kota Padang Panjang	1.062	1,11	8	1,45	7,53
17	Kota Bukittinggi	2.483	2,60	2	0,36	0,81
18	Kota Payakumbuh	2.781	2,91	12	2,17	4,31
19	Kota Pariaman	1.640	1,72	23	4,16	14,02
	Sumatera Barat	**95.510**	**100,00**	**553**	**100,00**	**5,79**

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat (diolah)

Dari Tabel 34 dapat dilihat bahwa dari 1.000 kelahiran hidup di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2018, terjadi kematian bayi neonatal sebanyak 5-6 bayi. Kematian bayi neonatal terbanyak terdapat di Kota Pariaman yaitu sebanyak 14 kematian bayi dari 1.000 kelahiran hidup.

Kematian bayi neonatal ini disebabkan oleh beberapa penyebab diantaranya berat badan lahir rendah (BBLR), asfiksia (kegagalan nafas secara spontan dan teratur pada saat lahir atau beberapa saat setelah lahir, TN (gangguan pernafasan pada bayi baru lahir yang berlangsung singkat), sepsis (infeksi darah yang terjadi pada bayi yang baru lahir), kelainan bawaan, dan penyebab lainnya.

c) *Angka Kematian Post Neo-Natal (Post Neo-Natal Death Rate/PNNDR)*

Kematian post neo-natal (*post neo-natal death rate/PNNDR*) adalah kematian yang terjadi pada bayi yang berumur 1 bulan sampai dengan kurang dari 1 tahun per 1.000 kelahiran hidup selama 1 tahun.

Angka Kematian Post Neo-Natal Provinsi Sumatera Barat untuk tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 35, dimana dari 1.000 kelahiran hidup di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2018, terjadi kematian bayi post neo-natal sebanyak 2-3 bayi dengan kematian bayi post neo-natal terbesar berada di Kota Sawahlunto yaitu sebanyak 5-6 bayi dan yang terendah adalah Kota Bukittinggi, dimana tidak terdapat kematian bayi post neo-natal pada tahun 2018 ini.

Adapun penyebab kematian bayi post neo-natal ini adalah karena beberapa penyakit seperti pneumonia (paru-paru

basah), diare, kelainan saraf, tetanus malaria, dan penyakit lainnya.

Tabel 35.
Angka Kematian Post Neonatal (*Post Neo-Natal Death Rate/PNNDR*)
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018

No	Kabupaten/Kota	Kelahiran Hidup		Kematian Post Neonatal		AK Post Neonatal
		Jumlah (Jiwa)	%	Jumlah (Jiwa)	%	
1	Kabupaten Pesisir Selatan	8.678	9,09	12	5,50	1,38
2	Kabupaten Solok	7.632	7,99	23	10,55	3,01
3	Kabupaten Sijunjung	4.420	4,63	40	18,35	9,05
4	Kabupaten Tanah Datar	4.794	5,02	6	2,75	1,25
5	Kabupaten Padang Pariaman	7.680	8,04	3	1,38	0,39
6	Kabupaten Agam	7.287	7,63	21	9,63	2,88
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	6.355	6,65	19	8,72	2,99
8	Kabupaten Pasaman	5.339	5,59	10	4,59	1,87
9	Kabupaten Kepulauan Mentawai	1.506	1,58	3	1,38	1,99
10	Kabupaten Dharmasraya	3.911	4,09	5	2,29	1,28
11	Kabupaten Solok Selatan	3.149	3,30	17	7,80	5,40
12	Kabupaten Pasaman Barat	8.157	8,54	17	7,80	2,08
13	Kota Padang	16.282	17,05	22	10,09	1,35
14	Kota Solok	1.353	1,42	3	1,38	2,22
15	Kota Sawahlunto	1.001	1,05	6	2,75	5,99
16	Kota Padang Panjang	1.062	1,11	5	2,29	4,71
17	Kota Bukittinggi	2.483	2,60	0	0,00	0,00
18	Kota Payakumbuh	2.781	2,91	4	1,83	1,44
19	Kota Pariaman	1.640	1,72	2	0,92	1,22
	Sumatera Barat	**95.510**	**100,00**	**218**	**100,00**	**2,28**

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat (diolah)

d) *Angka Kematian Anak*

Yang dimaksud dengan anak adalah penduduk yang berusia 1 sampai menjelang 5 tahun. Angka kematian anak mencerminkan kondisi kesehatan lingkungan yang langsung mempengaruhi tingkat kesehatan anak. Angka kematian anak juga dipengaruhi oleh tingkat kecukupan gizi, tingginya prevalensi penyakit menular pada anak, atau kecelakaan yang terjadi di dalam/di sekitar rumah.

Angka kematian anak Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 36 berikut ini :

Tabel 36.
Angka Kematian Anak
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018

No	Kabupaten/Kota	Penduduk Usia 1-4 Tahun pada Pertengahan Tahun		Kematian Anak		AK Anak
		Jumlah (Jiwa)	%	Jumlah (Jiwa)	%	
1	Kabupaten Pesisir Selatan	29.349	9,05	18	14,88	0,61
2	Kabupaten Solok	21.437	6,61	10	8,26	0,47
3	Kabupaten Sijunjung	13.871	4,28	11	9,09	0,79
4	Kabupaten Tanah Datar	17.429	5,38	8	6,61	0,46
5	Kabupaten Padang Pariaman	25.166	7,76	3	2,48	0,12
6	Kabupaten Agam	27.718	8,55	7	5,79	0,25
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	20.148	6,21	11	9,09	0,55
8	Kabupaten Pasaman	18.543	5,72	9	7,44	0,49
9	Kabupaten Kepulauan Mentawai	4.907	1,51	0	0,00	0,00
10	Kabupaten Dharmasraya	14.380	4,44	1	0,83	0,07
11	Kabupaten Solok Selatan	10.697	3,30	3	2,48	0,28
12	Kabupaten Pasaman Barat	26.547	8,19	10	8,26	0,38
13	Kota Padang	57.917	17,86	14	11,57	0,24
14	Kota Solok	5.290	1,63	3	2,48	0,57
15	Kota Sawahlunto	4.304	1,33	6	4,96	1,39
16	Kota Padang Panjang	3.995	1,23	4	3,31	1,00
17	Kota Bukittinggi	7.915	2,44	1	0,83	0,13
18	Kota Payakumbuh	8.894	2,74	0	0,00	0,00
19	Kota Pariaman	5.713	1,76	2	1,65	0,35
	Sumatera Barat	**324.216**	**100,00**	**121**	**100,00**	**0,37**

Sumber : DKB II Tahun 2017, DKB II Tahun 2018, dan Dinas Kesehatan Prov. Sumbar (diolah)

Dari Tabel 36 di atas terlihat bahwa angka kematian anak di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2018 adalah 0,37 yang berarti dari 1.000 anak di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2017, terdapat 0-1 kematian anak, dimana angka kematian anak tertinggi terdapat di Kota Sawahlunto yaitu sebesar 1,39 (1-2) kematian anak dari 1.000 anak.

Kematian anak ini diantaranya disebabkan oleh penyakit seperti diare, pneumonia, demam berdarah dan lainnya.

Oleh karena itu faktor kesehatan lingkungan sangat perlu diperhatikan untuk mendukung kesehatan anak, karena pada usia ini anak sedang aktif-aktifnya melakukan eksplorasi terhadap berbagai hal yang ingin diketahuinya.

e) Angka Kematian Balita

Balita atau bawah lima tahun adalah semua anak termasuk bayi baru lahir berumur 0 tahun sampai dengan menjelang tepat 5 tahun (0-4 tahun).

Angka kematian Balita Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 37 dibawah ini :

Tabel 37.
Angka Kematian Balita
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018

No	Kabupaten/Kota	Penduduk Usia < 5 tahun pada Pertengahan Tahun		Kematian Balita		AK Balita
		Jumlah (Jiwa)	%	Jumlah (Jiwa)	%	
1	Kabupaten Pesisir Selatan	31.443	8,82	112	12,56	3,56
2	Kabupaten Solok	22.861	6,41	73	8,18	3,19
3	Kabupaten Sijunjung	15.542	4,36	81	9,08	5,21
4	Kabupaten Tanah Datar	19.387	5,44	45	5,04	2,32
5	Kabupaten Padang Pariaman	27.824	7,81	21	2,35	0,75
6	Kabupaten Agam	30.677	8,61	77	8,63	2,51
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	22.151	6,21	72	8,07	3,25
8	Kabupaten Pasaman	20.176	5,66	45	5,04	2,23
9	Kabupaten Kepulauan Mentawai	5.277	1,48	6	0,67	1,14
10	Kabupaten Dharmasraya	15.571	4,37	15	1,68	0,96
11	Kabupaten Solok Selatan	11.746	3,30	61	6,84	5,19
12	Kabupaten Pasaman Barat	28.411	7,97	84	9,42	2,96
13	Kota Padang	64.061	17,97	105	11,77	1,64
14	Kota Solok	6.010	1,69	11	1,23	1,83
15	Kota Sawahlunto	4.980	1,40	21	2,35	4,22
16	Kota Padang Panjang	4.616	1,30	17	1,91	3,68
17	Kota Bukittinggi	8.996	2,52	3	0,34	0,33
18	Kota Payakumbuh	10.071	2,83	16	1,79	1,59
19	Kota Pariaman	6.626	1,86	27	3,03	4,07
	Sumatera Barat	**356.422**	**100,00**	**892**	**100,00**	**2,50**

Sumber : DKB II Tahun 2017, DKB II Tahun 2018, dan Dinas Kesehatan Prov. Sumbar (diolah)

Dari Tabel 37 tersebut dapat diketahui angka kematian balita Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 adalah sebesar 2,50, ini berarti bahwa dari 1.000 balita di Provinsi Sumatera Barat pada pertengahan tahun 2018, terjadi kematian balita sebanyak 2-3 balita, dimana angka kematian balita tertinggi terdapat di Kabupaten Sijunjung yaitu sebesar 5,21 atau 5-6 kematian balita dari 1.000 balita yang ada.

Penyebab kematian balita ini selain karena factor yang dibawa anak sejak lahir yang diperoleh dari orang tuanya, pengaruh lingkungan luar, seperti tingkat kecukupan gizi, tingginya prevelensi penyakit menular pada anak, atau kecelakaan yang terjadi di dalam atau disekitar rumah.

f) *Angka Kematian Ibu (Maternity Mortality Rate/MMR)*

Kematian ibu ini disebabkan karena faktor kehamilan atau komplikasi kehamilan dan kelahiran atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain.

Informasi mengenai tingginya MMR/AKI akan bermanfaat untuk pengembangan program peningkatan kesehatan reproduksi, terutama pelayanan kehamilan dan menjadikan kehamilan yang aman dan bebas resiko tinggi, program peningkatan jumlah kelahiran yang dibantu oleh tenaga kesehatan, penyiapan sistem rujukan dalam penanganan komplikasi kehamilan, penyiapan keluarga dan suami siaga dalam menyongsong kelahiran.

Angka kematian ibu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 38 berikut ini :

Tabel 38.
Angka Kematian Ibu (*Maternal Mortality Rate/MMR*)
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kelahiran Hidup	Jumlah Kematian Ibu Maternal (Jiwa)				AKI
			Hamil	Bersalin	Nifas	Jumlah	
1	Kabupaten Pesisir Selatan	8.678	0	0	0	0	0,00
2	Kabupaten Solok	7.632	1	1	8	10	131,03
3	Kabupaten Sijunjung	4.420	1	3	1	5	113,12
4	Kabupaten Tanah Datar	4.794	3	1	7	11	229,45
5	Kabupaten Padang Pariaman	7.680	0	2	0	2	26,04
6	Kabupaten Agam	7.287	5	1	6	12	164,68
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	6.355	1	0	1	2	31,47
8	Kabupaten Pasaman	5.339	0	8	1	9	168,57
9	Kabupaten Kep. Mentawai	1.506	1	2	2	5	332,01
10	Kabupaten Dharmasraya	3.911	0	1	3	4	102,28
11	Kabupaten Solok Selatan	3.149	2	4	2	8	254,05
12	Kabupaten Pasaman Barat	8.157	10	3	0	13	159,37
13	Kota Padang	16.282	2	5	10	17	104,41
14	Kota Solok	1.353	0	0	0	0	0,00
15	Kota Sawahlunto	1.001	0	0	0	0	0,00
16	Kota Padang Panjang	1.062	0	0	0	0	0,00
17	Kota Bukittinggi	2.483	1	1	0	2	80,55
18	Kota Payakumbuh	2.781	0	0	1	1	35,96
19	Kota Pariaman	1.640	0	0	0	0	0,00
	Sumatera Barat	**95.510**	**27**	**32**	**42**	**101**	**105,75**

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat (dioalah)

Dari Tabel 38 terlihat bahwa di Provinsi Sumatera Barat dari 100.000 kelahiran hidup pada pertengahan tahun 2018 terjadi 105-106 kematian ibu saat hamil, bersalin, maupun pasca bersalin. Kematian ibu terbesar terjadi di Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu sebanyak 332 kematian ibu dari 100.000 kelahiran hidup.

Adapun penyebab kematian ibu ini adalah karena perdarahan, HDK (hipertensi dalam kehamilan), infeksi, gangguan peredaran darah, gangguan metabolisme, dan lainnya.

b. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas penduduk baik di daerah maupun nasional. Untuk mengukur tingkat kualitas pendidikan suatu daerah, dibutuhkan beberapa data. Database kependudukan dapat memberikan beberapa yang berhubungan dengan informasi perkembangan pendidikan maupun untuk menghitung beberapa indikator untuk mengukur tingkat pencapaian pendidikan di suatu daerah. Data jumlah penduduk menurut usia sekolah SD, SLTP, dan SLTA Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2018 dapat dilihat pada Tabel 39 berikut ini :

Tabel 39.
Jumlah Penduduk Menurut Usia Sekolah
Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2018

Usia Pendidikan	JENIS KELAMIN (JIWA)				Total (Jiwa)	
	Laki-Laki		Perempuan			
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Usia SD (7-12 Tahun)	330.427	49,73	307.041	49,48	637.468	49,61
Usia SLTP (13-15 Tahun)	170.599	25,67	159.062	25,63	329.661	25,66
Usia SLTA (16-18 Tahun)	163.432	24,60	154.415	24,88	317.847	24,74
Total	**664.458**	**100,00**	**620.518**	**100,00**	**1.284.976**	**100,00**

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2018 (diolah)

1) *Angka Partisipasi Kasar (APK)*

Partisipasi sekolah merupakan salah satu ukuran yang digunakan dalam menilai keberhasilan program wajib belajar.

Angka partisipasi sekolah mengukur daya serap sektor pendidikan terhadap penduduk usia sekolah, dimana angka ini memperhitungkan adanya perubahan umur penduduk terutama penduduk umur muda.

Dalam hal ini meningkatnya presentase jumlah murid bukan berarti partisipasi sekolah juga meningkat, karena ukuran

perubahan jumlah murid sekolah tidak langsung berpengaruh terhadap partisipasi sekolah.

APK menunjukan tingkat partisipasi penduduk secara umum dimasing-masing tingkat atau jenjang pendidikan. Angka partisipasi kasar (APK)/*gross enrollment ratio (GER)* Provinsi Sumatera Barat untuk Tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 40 berikut ini :

Tabel 40.
Angka Partisipasi Kasar (APK)/*Gross Enrollment Ratio (GER)*
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018

Jenjang Pendidikan (Level of Education)	Siswa/Mahasiswa (Pupils/Student)	Penduduk (*) (Population)	APK (GER)
SD/Primary School	661.940	637.468	103,84
a. SD	632.955		
b. SLB	4.439		
c. MI	21.827		
d. Paket A	2.445		
e. ULA	274		
SLTP/Junior SS	314.620	329.661	95,44
a. SMP	214.303		
b. SLB	4.373		
c. MTs	87.942		
d. Paket B	7.152		
e. Wustha	850		
SLTA/Senior SS	276.137	317.847	86,88
a. SMA	146.226		
b. SLB	637		
c. MA	30.469		
d. SMK	88.233		
e. Paket C	10.125		
f. Ulya	447		

Sumber : DKB II Tahun 2018, Kemendikbud dan Kemenag (diolah)

Dari Tabel 40 tersebut dapat diketahui bahwa APK Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 untuk jenjang pendidikan SD adalah sebesar 103,84 persen, ini berarti pada jenjang pendidikan SD ini banyak anak-anak usia diatas 12 tahun tetapi masih sekolah di

tingkat SD/sederajat atau sebaliknya adanya siswa yang lebih muda dari usia standar (7-12 tahun) yang masuk jenjang pendidikan SD. Hal ini menunjukan bahwa siswa tersebut masuk sekolah pada usia yang lebih muda. Sementara untuk jenjang pendidikan SLTP dan SLTA APK masih berada di bawah 100 persen yang berarti jumlah murid usia berapapun yang bersekolah pada jenjang SLTP dan SLTA masih lebih sedikit bila dibandingkan dengan jumlah penduduk pada usia SLTP dan SLTA.

2) *Angka Partisipasi Murni (APM)*

Angka Partisipasi Murni ini dapat menunjukan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah pada tingkat pendidikan tertentu. Seperti halnya APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Namun APM merupakan merupakan indikator daya serap yang lebih baik dibandingkan APK, karena melihat atau menunjukan partisipasi penduduk pada kelompok usia standar pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar kelompok umurnya.

Angka Partisipasi Murni (APM)/*Net Enrollment Ratio (NER)* Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 41, dimana APM Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2018 untuk jenjang pendidikan SD/Sederajat adalah 91,16 persen, artinya bahwa dari 100 penduduk usia 7-12 tahun 91 orang bersekolah dibangku SD/Sederajat. APM penduduk usia 13-15 tahun yang duduk dibangku SLTP/Sederajat sebesar 70,21 persen, sedangkan APM penduduk usia 16-18 tahun yang duduk dibangku SLTA/Sederajat sebesar 70,66 persen. Selisih antara

APK dan APM menunjukan proporsi murid yang tinggal kelas, lambat masuk sekolah atau terlalu cepat sekolah.

Tabel 41.
Angka Partisipasi Murni (APM)/*Net Enrollment Ratio (NER)*
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018

Jenjang Pendidikan (Level of Education)	Siswa/Mahasiswa (Pupils/Student)	Penduduk (*) (Population)	APK (NER)
SD/Primary School	581.113	637.468	91,16
a. SD	561.229		
b. SLB	35		
c. MI	19.428		
d. Paket A	249		
e. ULA	172		
SLTP/Junior SS	231.465	329.661	70,21
a. SMP	167.892		
b. SLB	0		
c. MTs	61.886		
d. Paket B	1.129		
e. Wustha	558		
SLTA/Senior SS	224.581	317.847	70,66
a. SMA	122.476		
b. SLB	14		
c. MA	22.263		
d. SMK	77.744		
e. Paket C	1.816		
f. Ulya	268		

Sumber : DKB II Tahun 2018, Kemendikbud dan Kemenag (diolah)

3) *Angka Putus Sekolah (APS)*

Angka Putus Sekolah yang disajikan hanya berdasarkan data murid putus sekolah yang ada untuk jenjang pendidikan SD (SD), untuk jenjang pendidikan SLTP (SMP), serta jenjang pendidikan SLTA (SMA dan SMK) yang berasal dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.

Angka Putus Sekolah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 tersebut dapat dilihat pada Tabel 42 berikut ini :

Tabel 42.
Angka Putus Sekolah
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018

Jenjang Pendidikan	Jumlah Murid	Jumlah Murid Putus Sekolah	Angka Putus Sekolah (APS)
SD	661.940	347	0,05
SLTP	314.620	136	0,04
SLTA	276.137	2.602	0,94

Sumber : DKB II Tahun 2018, Kemendikbud, Kemenag, dan Dinas Pendidikan Prov. Sumbar (diolah)

Dari Tabel 42 tersebut dapat diketahui bahwa angka putus sekolah terbesar adalah untuk jenjang pendidikan SLTA. Beberapa penyebab murid putus sekolah diantaranya adalah karena kurangnya motivasi atau keinginan dari dalam diri anak itu sendiri untuk bersekolah. Selain itu faktor kondisi ekonomi keluarga juga menjadi penyebab lain seorang muruid putus sekolah. Tidak dipungkiri, meskipun sudah ada dana yang dialokasikan pemerintah dalam hal pendidikan pada saat ini, tidak lantas menjadikan pendidikan di Sumatera Barat menjadi gratis sepenuhnya, karena masih ada biaya lainnya yang diperlukan untuk mencapai pendidikan tersebut, seperti biaya transportasi, biaya untuk membeli seragam dan perlengkapan sekolah, dan lainnya. Dengan kondisi tersebut, bagi orang tua dengan kondisi ekonomi yang rendah akan terbebani, karena penghasilan orang tua hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja, sehingga keberlangsungan pendidikan anak akan terhambat.

Untuk itu, pemerintah Provinsi Sumatera Barat harus lebih berperan aktif untuk membantu anak-anak yang memiliki kondisi ekonomi orang tua yang terbatas agar mereka tetap

dapat melanjutkan sekolah paling tidak sampai lulus jenjang pendidikan SLTA agar mereka bisa memiliki bekal ilmu dan keahlian untuk terjun ke dunia kerja sehingga dapat membantu perekonomian keluarga.

c. Ekonomi

Indonesia telah meratifikasi ketentuan Pasal 2 ayat (1) ILO Convention No. 138 concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 yang menetapkan bahwa batas usia minimum untuk diperbolehkan bekerja yang diberlakukan di wilayah Republik Indonesia adalah 15 (lima belas) tahun.

Ketentuan ini telah diaplikasikan dalam penyusunan statistik terkait ketenagakerjaan sehingga berdasarkan statistik dan indeks pembangunan ketenagakerjaan yang diterbitkan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, Angkatan Kerja didefinisikan sebagai penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

1) Jumlah Tenaga Kerja dan Angkatan Kerja (Bekerja dan Menganggur/Pencari Kerja

a) Jumlah dan Proporsi Tenaga Kerja

Tenaga kerja (*manpower*) adalah seluruh penduduk dalam usia kerja (15 tahun keatas) yang potensial dapat memproduksi barang dan jasa.

Indikator ini berguna sebagai wacana pengambil kebijakan dalam menyusun rencana ketenagakerjaan. Disamping itu

juga untuk mengetahui berapa banyak tenaga kerja (penduduk usia kerja) potensial.

Penghitungan persentase tenaga kerja dilaksanakan dengan membandingkan antara jumlah penduduk usia 15 tahun keatas (usia kerja) dengan jumlah penduduk keseluruhan.

Jumlah dan proporsi tenaga kerja di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 43 di bawah ini, dimana pada tabel tersebut dapat diketahui bahwa persentase tenaga kerja di Provinsi Sumatera Barat kondisi per 31 Desember 2018 adalah sebesar 74,10 persen dari jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 43.
Jumlah dan Proporsi Tenaga Kerja
Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2018

No	Kabupaten/Kota	Usia Kerja (15 Tahun Keatas)	Jumlah Penduduk	Persen Naker
1	Kabupaten Pesisir Selatan	375.541	508.691	73,82
2	Kabupaten Solok	283.385	384.091	73,78
3	Kabupaten Sijunjung	174.187	236.910	73,52
4	Kabupaten Tanah Datar	288.051	370.993	77,64
5	Kabupaten Padang Pariaman	311.780	427.919	72,86
6	Kabupaten Agam	403.826	528.619	76,39
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	286.723	380.173	75,42
8	Kabupaten Pasaman	234.431	318.379	73,63
9	Kabupaten Kep. Mentawai	61.383	87.517	70,14
10	Kabupaten Dharmasraya	152.132	212.653	71,54
11	Kabupaten Solok Selatan	133.466	180.905	73,78
12	Kabupaten Pasaman Barat	309.121	431.575	71,63
13	Kota Padang	669.156	900.922	74,27
14	Kota Solok	53.190	73.614	72,26
15	Kota Sawahlunto	49.459	66.377	74,51
16	Kota Padang Panjang	42.117	57.767	72,91
17	Kota Bukittinggi	89.387	121.590	73,52
18	Kota Payakumbuh	102.785	137.792	74,59
19	Kota Pariaman	69.619	92.758	75,05
	Sumatera Barat	**4.089.739**	**5.519.245**	74,10

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2018 (diolah)

Ini berarti bahwa jumlah tenaga kerja tersebut harus diikuti permintaan tenaga kerja (kesempatan kerja) yang cukup pula, agar tidak akan terjadi pengangguran yang cukup besar. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota harus memikirkan tersedianya kesempatan kerja ini di masing-masing daerahnya.

b) *Jumlah dan Proporsi Angkatan Kerja (Bekerja dan Menganggur)*

Jumlah dan proporsi angkatan kerja (bekerja dan menganggur) ini dapat dilihat pada Tabel 44 berikut ini :

Tabel 44.
Jumlah dan Proporsi Angkatan Kerja
Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2018

No	Kabupaten/Kota	Angkatan Kerja (Jiwa)			Jumlah Tenaga Kerja
		Bekerja	Menganggur	Jumlah Angker	
1	Kabupaten Pesisir Selatan	201.982	12.556	214.538	375.541
2	Kabupaten Solok	164.281	10.346	174.627	283.385
3	Kabupaten Sijunjung	106.061	3.511	109.572	174.187
4	Kabupaten Tanah Datar	166.215	6.665	172.880	288.051
5	Kabupaten Padang Pariaman	173.608	12.874	186.482	311.780
6	Kabupaten Agam	224.716	11.381	236.097	403.826
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	191.453	5.307	196.760	286.723
8	Kabupaten Pasaman	117.914	7.368	125.282	234.431
9	Kabupaten Kep. Mentawai	42.200	980	43.180	61.383
10	Kabupaten Dharmasraya	111.862	4.583	116.445	152.132
11	Kabupaten Solok Selatan	81.240	5.044	86.284	133.466
12	Kabupaten Pasaman Barat	186.402	6.506	192.908	309.121
13	Kota Padang	395.981	40.017	435.998	669.156
14	Kota Solok	29.736	1.888	31.624	53.190
15	Kota Sawahlunto	30.320	1.851	32.171	49.459
16	Kota Padang Panjang	22.999	1.281	24.280	42.117
17	Kota Bukittinggi	59.935	4.616	64.551	89.387
18	Kota Payakumbuh	64.545	2.538	67.083	102.785
19	Kota Pariaman	39.000	2.368	41.368	69.619
	Sumatera Barat	**2.410.450**	**141.680**	**2.552.130**	**4.089.739**

Sumber : DKB Semester II Tahun 2018 dan Dinas Nakertrans Provinsi Sumatera Barat (diolah)

Dari Tabel 44 dapat diketahui bahwa jumlah angkatan kerja Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2018 adalah sebesar 2.552.130 jiwa dengan jumlah angkatan kerja terbanyak berada di Kota Padang yaitu sebesar 435.998 jiwa dan angkatan kerja terkecil berada di Kota Padang Panjang sebanyak 24.280 jiwa. Untuk penduduk bekerja dan menganggur, jumlah terbanyak juga berada di Kota Padang yaitu masing-masing sebesar 395.981 dan 40.017 jiwa. Sementara itu untuk jumlah penduduk bekerja terkecil berada di Kota Padang Panjang sebesar 22.999 dan jumlah pengangguran terkecil berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan jumlah hanya sebanyak 980 jiwa.

2) ***Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK)***

Angka partisipasi angkatan kerja menyajikan data yang menggambarkan banyaknya angkatan kerja, yaitu penduduk yang sedang bekerja dan yang mencari pekerjaan dari penduduk usia 15 tahun keatas terhadap penduduk usia 15 tahun keatas.

Indikator ini bermanfaat untuk mengetahui bagian dari tenaga kerja yang benar-benar terlibat atau berusaha terlibat dalam kegiatan produktif yang dapat menghasilkan barang dan jasa dalam jangka waktu tertentu.

Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK) Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2018 dapat dilihat pada Tabel 45 dimana dari hasil perhitungan diperoleh APAK Provinsi Sumatera Barat sebesar 62,40 persen, artinya 62,40 persen penduduk usia 15 tahun keatas tahun yang terlibat atau berusaha terlibat (mencari pekerjaan) dalam kegiatan produktif. Semakin tinggi APAK

berarti semakin banyak penduduk usia kerja yang terlibat atau berusaha terlibat dalam kegiatan produktif.

Dari Tabel 45 terlihat bahwa penduduk yang berumur 15-19 tahun mempunyai APAK paling rendah yaitu sebesar 21,60 persen, sedangkan penduduk yang berumur 45-49 tahun memiliki APAK paling tinggi yaitu sebesar 82,57 persen.

Tabel 45.
Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK)
Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2018

Kelompok Umur (Tahun)	Angkatan Kerja (Jiwa)			Jumlah Bukan Angker	Jumlah Tenaga Kerja	APAK
	Bekerja	Menganggur	Jumlah Angker			
15-19	94.606	20.713	115.319	418.558	533.877	21,60
20-24	228.908	61.293	290.201	203.315	493.516	58,80
25-29	286.043	26.449	312.492	96.883	409.375	76,33
30-34	290.959	12.417	303.376	113.278	416.654	72,81
35-39	285.569	8.028	293.597	117.500	411.097	71,42
40-44	287.556	4.810	292.366	77.526	369.892	79,04
45-49	266.519	3.713	270.232	57.059	327.291	82,57
50-54	230.324	750	231.074	57.308	288.382	80,13
55-59	185.314	1.839	187.153	66.354	253.507	73,83
> 60	254.652	1.668	256.320	329.828	586.148	43,73
Jumlah	**2.410.450**	**141.680**	**2.552.130**	**1.537.609**	**4.089.739**	**62,40**

Sumber : DKB Semester II Tahun 2018 dan Dinas Nakertrans Provinsi Sumatera Barat (diolah)

3) *Jumlah dan Proporsi Penduduk yang Bekerja menurut Jenis Pekerjaan*

Indikator ini menunjukan proporsi penduduk yang bekerja menurut jenis pekerjaan terhadap jumlah penduduk yang bekerja di setiap lapangan pekerjaan.

Proporsi penduduk yang bekerja menurut jenis pekerjaan menunjukan distribusi atau penyebaran penduduk yang bekerja di suatu daerah pada waktu tertentu.

Indikator ini berguna untuk membantu pemerintah daerah dalam memfokuskan kebijakan ketenagakerjaan.

Jumlah dan proporsi penduduk yang bekerja menurut jenis pekerjaan dapat dilihat pada Tabel 46, dimana dapat diketahui bahwa persentase jenis pekerjaan terbanyak yang menjadi sumber pendapatan penduduk Sumatera Barat adalah wiraswasta sebesar 51,46 persen, diikuti oleh jenis pekerjaan pertanian/peternakan sebesar 35,23 persen.

Dari proporsi jenis pekerjaan tersebut, dapat dilihat bahwa penduduk Sumatera Barat memiliki karakteristik tersendiri dalam memilih pekerjaan sebagai sumber pendapatannya yaitu pekerjaan yang membutuhkan keterampilan individu dan tidak banyak bergantung pada orang lain. Kebanyakan pekerjaan seperti ini merupakan pekerjaan dibidang yang menawarkan jasa dan perdagangan. Namun demikian, dengan persentase yang relatif masih cukup besar yaitu lebih dari sepertiga penduduk bekerja yang memiliki jenis pekerjaan di bidang pertanian/peternakan, maka dapat juga dikatakan masyarakat Sumatera Barat masih merupakan bagian dari masyarakat agraris.

Jika dilihat proporsi per wilayah Kabupaten/Kota jenis pekerjaan yang menjadi sumber penghasilan penduduk untuk wilayah Kabupaten lebih banyak didominasi oleh penduduk yang memiliki pekerjaan dibidang pertanian/peternakan, selanjutnya diikuti oleh penduduk yang memiliki jenis pekerjaan wiraswasta, kecuali Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, dan Kabupaten Dharmasraya yang yang telah didominasi oleh penduduk yang

memiliki pekerjaan dibidang wiraswasta. Sementara di tujuh Kota yang ada di Sumatera Barat, penduduknya lebih banyak memiliki jenis pekerjaan sebagai wiraswata dan aparatur/ pejabat negara. Artinya di daerah perkotaan penduduk sudah mulai meninggalkan jenis pekerjaan yang bersifat agraris, kecuali di dua daerah kota yaitu Sawahlunto sebesar 15,93 persen dan Payakumbuh sebesar 15,26 persen penduduknya relatif masih cukup banyak yang memiliki jenis pekerjaan di bidang pertanian/peternakan.

Kode Wilayah	Kabupaten/Kota	Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan																Jumlah
		Aparatur/ Pejabat Negara		Tenaga Pengajar		Wiraswasta		Pertanian/ Peternakan		Nelayan		Agama/ Kepercayaan		Kesehatan		Lainnya		
		Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%	
1301	Kabupaten Pesisir Selatan	9.546	6,41	2.702	1,81	53.105	35,65	73.000	49,00	9.825	6,59	75	0,05	652	0,44	77	0,05	148.982
1302	Kabupaten Solok	7.185	6,03	1.632	1,37	47.062	39,52	62.674	52,63	155	0,13	25	0,02	343	0,29	3	0,00	119.079
1303	Kabupaten Sijunjung	4.877	6,25	1.558	2,00	29.011	37,20	42.068	53,94	30	0,04	42	0,05	382	0,49	29	0,04	77.997
1304	Kabupaten Tanah Datar	8.920	7,15	2.650	2,12	62.206	49,85	50.005	40,07	287	0,23	110	0,09	564	0,45	52	0,04	124.794
1305	Kabupaten Padang Pariaman	7.658	6,42	1.350	1,13	71.702	60,11	36.080	30,25	1.519	1,27	449	0,38	512	0,43	17	0,01	119.287
1306	Kabupaten Agam	11.548	6,67	3.834	2,21	99.096	57,22	56.167	32,43	1.677	0,97	149	0,09	685	0,40	26	0,02	173.182
1307	Kabupaten Lima Puluh Kota	8.022	6,51	1.203	0,98	53.531	43,44	60.040	48,72	50	0,04	51	0,04	324	0,26	12	0,01	123.233
1308	Kabupaten Pasaman	6.122	4,84	1.312	1,04	41.510	32,83	77.006	60,91	32	0,03	30	0,02	405	0,32	3	0,00	126.420
1309	Kabupaten Kep. Mentawai	2.255	8,55	663	2,51	6.320	23,95	14.556	55,17	2.161	8,19	154	0,58	269	1,02	6	0,02	26.384
1310	Kabupaten Dharmasraya	4.291	5,86	1.579	2,16	38.686	52,83	28.075	38,34	16	0,02	26	0,04	534	0,73	14	0,02	73.221
1311	Kabupaten Solok Selatan	4.338	7,56	598	1,04	24.644	42,92	27.433	47,78	18	0,03	18	0,03	331	0,58	38	0,07	57.418
1312	Kabupaten Pasaman Barat	6.746	4,72	3.112	2,18	51.886	36,28	74.995	52,44	5.137	3,59	52	0,04	1.030	0,72	60	0,04	143.018
1371	Kota Padang	46.317	15,98	12.162	4,20	212.595	73,35	10.649	3,67	4.754	1,64	283	0,10	2.975	1,03	95	0,03	289.830
1372	Kota Solok	4.860	19,88	525	2,15	17.014	69,60	1.773	7,25	7	0,03	26	0,11	241	0,99	0	0,00	24.446
1373	Kota Sawahlunto	3.463	15,66	341	1,54	14.588	65,98	3.522	15,93	4	0,02	19	0,09	152	0,69	20	0,09	22.109
1374	Kota Padang Panjang	3.531	17,80	1.076	5,42	13.725	69,17	1.210	6,10	7	0,04	30	0,15	257	1,30	6	0,03	19.842
1375	Kota Bukittinggi	6.153	14,43	1.873	4,39	32.855	77,05	1.096	2,57	18	0,04	58	0,14	584	1,37	6	0,01	42.643
1376	Kota Payakumbuh	7.099	15,20	1.515	3,24	30.590	65,49	7.128	15,26	9	0,02	41	0,09	329	0,70	1	0,00	46.712
1377	Kota Pariaman	4.851	16,90	692	2,41	19.623	68,35	2.126	7,41	1.080	3,76	47	0,16	276	0,96	15	0,05	28.710
	Sumatera Barat	**157.782**	**8,83**	**40.377**	**2,26**	**919.749**	**51,46**	**629.603**	**35,23**	**26.786**	**1,50**	**1.685**	**0,09**	**10.845**	**0,61**	**480**	**0,03**	**1.787.307**

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2018 (diolah)

Tabel 46. Jumlah dan Proporsi Penduduk yang Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2018

4) *Pengangguran Terbuka*

Angka pengangguran terbuka berguna sebagai acuan bagi pemerintah dalam pembukaan lapangan kerja baru. Disamping itu, *trend* indikator ini akan menunjukan keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun.

Tingkat pengangguran terbuka Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2018 dapat dilihat pada Tabel 47 berikut ini :

Tabel 47.
Tingkat Pengangguran Terbuka
Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2018

Kelompok Umur (Tahun)	Angkatan Kerja (Jiwa)			Jumlah Bukan Angker	Jumlah Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka
	Bekerja	Pengangguran	Jumlah Angker			
15-19	94.606	20.713	115.319	418.558	533.877	17,96
20-24	228.908	61.293	290.201	203.315	493.516	21,12
25-29	286.043	26.449	312.492	96.883	409.375	8,46
30-34	290.959	12.417	303.376	113.278	416.654	4,09
35-39	285.569	8.028	293.597	117.500	411.097	2,73
40-44	287.556	4.810	292.366	77.526	369.892	1,65
45-49	266.519	3.713	270.232	57.059	327.291	1,37
50-54	230.324	750	231.074	57.308	288.382	0,32
55-59	185.314	1.839	187.153	66.354	253.507	0,98
> 60	254.652	1.668	256.320	329.828	586.148	0,65
Jumlah	**2.410.450**	**141.680**	**2.552.130**	**1.537.609**	**4.089.739**	**5,55**

Sumber : DKB Semester II Tahun 2018 dan Dinas Nakertrans Provinsi Sumatera Barat (diolah)

Besarnya angka pengangguran terbuka mempunyai implikasi sosial yang luas karena mereka yang tidak bekerja tidak mempunyai pendapatan. Semakin tinggi angka pengangguran terbuka, maka akan semakin besar potensi kerawanan sosial yang ditimbulkan, seperti kriminalitas. Dan sebaliknya apabila angka pengangguran terbuka semakin rendah, maka akan semakin stabil kondisi sosial dalam masyarakat. Pada Tabel 47 terlihat bahwa tingkat pengangguran di Provinsi Sumatera Barat

sebesar 5,55 persen, artinya 5,55 persen penduduk berusia 15 tahun keatas berusaha terlibat di dalam kegiatan produktif. Angka pengangguran terbesar terlihat pada kelompok umur 20-24 tahun yaitu sebesar 21,12 persen, sedangkan yang terkecil adalah pada kelompok umur 50-54 tahun yaitu sebesar 0,32 persen. Hal ini harus menjadi perhatian bagi pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan masing-masing Kabupaten/Kota untuk dapat menciptakan lapangan kerja dan memberikan kesempatan yang lebih luas khususnya bagi penduduk yang baru lulus SLTA atau perguruan tinggi baik lulusan D1/D3/D4/ maupun Sarjana.

d. Sosial

1) Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2108 ini dapat dilihat pada Tabel 48, dimana terdapat 26 (dua puluh enam) jenis penyandang masalah kesejahteraan sosial di Provinsi Sumatera Barat dengan jenis PMKS tertinggi adalah fakir miskin yaitu sebanyak 484.838 jiwa dan jenis PMKS terendah adalah pekerja migran bermasalah sosial sebanyak 12 jiwa.

Bila dibandingkan dengan jumlah penduduk Sumatera Barat per 31 Desember 2018 yang sejumlah 5.519.245 jiwa, maka persentase jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial di Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar 11,12 persen. Untuk itu perlu perhatian yang lebih serius dari pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk mengatasi dan mengurangi jumlah PMKS di tahun-tahun berikutnya.

No	Jenis PMKS	Kabupaten												Kota							Sumatera Barat
		Pessel	Solok	Sijunjung	T.Datar	P.Prmn	Agam	50Kota	Pasaman	Mentawai	Drmsrya	Solsel	Pasbar	Padang	Solok	Swlunto	P.Panjang	B.Tinggi	Pykbmh	Prmn	
1	Anak Balita Terlantar	137	0	306	5	1	93	2	7	37	1	2	0	15	0	20	1	45	16	61	749
2	Anak Terlantar	1.357	1.075	2.427	126	204	623	310	168	46	9	114	295	834	414	53	24	580	62	237	8.958
3	Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	9	43	33	72	49	10	21	11	3	6	4	26	97	6	0	1	4	10	6	411
4	Anak Jalanan	0	0	0	0	0	29	0	1	25	1	0	0	710	11	10	0	25	5	8	825
5	Anak Dengan Kedisabilitasan	506	650	283	554	2.152	440	104	249	97	150	60	388	1.016	37	188	60	134	165	98	7.331
6	Anak Korban Tindak Kekerasan	0	350	16	0	28	11	21	0	0	1	0	26	15	0	0	0	32	2	1	503
7	Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	56	1	0	72	2	12	0	2	0	0	0	26	798	11	6	0	4	3	1	994
8	Lanjut Usia Terlantar	3.118	4.605	9.216	1.600	4.085	3.365	7.539	1.840	3.673	633	1.472	2	1.303	419	676	324	1.908	220	444	46.442
9	Penyandang Disabilitas	1.276	461	1.413	1.697	520	1.983	2.107	696	423	743	438	462	1.865	261	472	183	390	277	459	16.126
10	Tuna Susila	0	2	0	0	3	5	0	0	0	0	0	50	143	1	0	0	5	1	1	211
11	Gelandangan	0	100	0	0	0	20	0	2	0	0	0	0	159	17	0	1	0	1	1	301
12	Pengemis	11	50	6	28	0	32	0	34	0	3	0	31	210	17	1	4	9	15	17	468
13	Pemulung	17	0	2	5	0	37	0	3	2	3	0	25	75	57	22	10	83	62	52	455
14	Kelompok Minoritas	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99	0	0	0	7	3	0	130
15	Bekas Warga Binaan Lapas (BWBLP)	1	0	10	95	25	66	15	155	0	4	0	228	370	79	23	0	15	48	31	1.165
16	Orang Dengan HIV/AIDS	0	4	2	27	18	0	3	2	0	0	0	28	400	0	0	0	36	2	3	525
17	Korban Penyalahgunaan Nepza	5	1	41	39	30	17	25	23	1	1	0	11	390	72	4	3	470	39	18	1.190
18	Korban Trafficking	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	17
19	Korban Tindak Kekerasan	0	36	210	4	28	2	30	1	0	0	0	0	20	0	6	0	0	7	3	347
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	0	0	0	6	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	12
21	Korban Bencana Alam	10	2.948	12	9	146	40	9	12	92	302	4	14.348	64	10	103	0	1	2	200	18.312
22	Korban bencana Sosial	0	0	17	148	23	194	77	0	0	4	50	8	700	0	2	0	0	7	2	1.232
23	Perempuan Rawan Sosial	3.531	3.400	0	2.826	4	1.358	483	1.360	529	814	1.319	400	95	308	481	278	820	491	801	19.298
24	Fakir Miskin	45.288	38.380	21.580	35.377	37.160	43.808	42.636	34.281	17.562	16.969	14.023	43.757	53.000	3.415	11.133	3.403	6.105	9.946	7.015	484.838
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi	25	0	0	232	0	47	16	24	0	42	0	0	33	180	9	1	0	7	26	642
26	Komunitas Adat Terpencil	0	0	0	0	0	0	0	0	2.460	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.478
	Total	55.347	52.106	35.595	42.922	44.478	52.196	53.398	38.872	24.950	19.704	17.486	60.111	62.426	5.315	13.209	4.293	10.673	11.393	9.486	613.960

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat (diolah)

Tabel 48. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2018

2) *Proporsi Penduduk Penyandang Cacat*

Indikator ini menguraikan jumlah dan proporsi penyandang cacat dirinci menurut jenis kelamin dan kelompok umur. Jumlah penduduk penyandang cacat Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2018 dapat dilihat pada Tabel 49, yang menunjukan bahwa dari seluruh penduduk penyandang cacat di Provinsi Sumatera Barat, penduduk penyandang cacat mental/jiwa adalah yang terbanyak yaitu sebesar 1.273 jiwa (26,52 persen), diikuti oleh penyandang cacat fisik sebanyak 1.153 jiwa (24,02 persen), sedangkan yang terkecil adalah penyandang cacat lainnya yaitu sebesar 397 jiwa (8,27 persen).

Tabel 49.
Jumlah Penduduk Penyandang Cacat Menurut Jenis Kelamin
Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2018

No	Jenis Kecacatan	Jenis Kelamin (Jiwa)				Total (Jiwa)	
		Laki-Laki		Perempuan			
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Cacat Fisik	682	24,25	471	23,68	1.153	24,02
2	Cacat Netra/Buta	288	10,24	207	10,41	495	10,31
3	Cacat Rungu/Wicara	478	17,00	454	22,83	932	19,41
4	Cacat Mental/Jiwa	818	29,09	455	22,88	1.273	26,52
5	Cacat Fisik dan Mental	317	11,27	234	11,76	551	11,48
6	Cacat Lainnya	229	8,14	168	8,45	397	8,27
	Jumlah	**2.812**	**100,00**	**1.989**	**100,00**	**4.801**	**100,00**

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2018 (diolah)

Sementara itu, untuk Angka Penyandang Cacat (APC) Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2018 berdasarkan Kabupaten/ Kota dapat dilihat pada Tabel 50, dimana angka penduduk penyandang cacat di Provinsi Sumatera Barat sebesar 0,09 persen, artinya bahwa sebagian kecil penduduk di Provinsi Sumatera Barat yang menyandang cacat. Namun ini tetap harus

menjadi perhatian pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk tetap memberikan pelayanan sosial bagi mereka. Bila diklasifikasikan menurut Kabupaten/Kota, maka angka penyandang cacat terbesar berada di Kota Sawahlunto yaitu sebesar 0,34 persen, diikuti oleh Kota Pariaman sebesar 0,21 persen dan Kota Solok sebesar 0,19 persen. Sedangkan angka penyandang cacat yang terkecil berada di Kota Payakumbuh yang hanya sebesar 0,02 persen diikuti oleh Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar 0,03 persen.

Tabel 50.
Angka Penyandang Cacat Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2018

No	Kabupaten/Kota	Jenis Kecacatan (Jiwa)						Jumlah Penduduk	APC
		Cacat Fisik	Cacat Netra/ Buta	Cacat Rungu/ Wicara	Cacat Mental/ Jiwa	Cacat Fisik & Mental	Cacat Lainnya		
1	Kabupaten Pesisir Selatan	50	17	38	48	12	15	508.691	0,04
2	Kabupaten Solok	67	24	41	55	39	14	384.091	0,06
3	Kabupaten Sijunjung	77	47	82	50	44	30	236.910	0,14
4	Kabupaten Tanah Datar	192	55	127	255	90	33	370.993	0,20
5	Kabupaten Padang Pariaman	48	20	29	76	20	5	427.919	0,05
6	Kabupaten Agam	131	36	52	143	44	18	528.619	0,08
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	16	10	24	36	7	13	380.173	0,03
8	Kabupaten Pasaman	127	86	127	152	70	18	318.379	0,18
9	Kabupaten Kep. Mentawai	18	7	9	12	6	7	87.517	0,07
10	Kabupaten Dharmasraya	14	10	22	13	14	8	212.653	0,04
11	Kabupaten Solok Selatan	26	11	25	14	18	3	180.905	0,05
12	Kabupaten Pasaman Barat	48	28	33	64	24	24	431.575	0,05
13	Kota Padang	174	63	191	174	76	134	900.922	0,09
14	Kota Solok	32	15	35	35	14	10	73.614	0,19
15	Kota Sawahlunto	45	13	47	58	31	35	66.377	0,34
16	Kota Padang Panjang	21	9	14	13	5	6	57.767	0,12
17	Kota Bukittinggi	11	16	6	18	4	11	121.590	0,05
18	Kota Payakumbuh	7	1	3	10	3	1	137.792	0,02
19	Kota Pariaman	49	27	27	47	30	12	92.758	0,21
	Sumatera Barat	**1.153**	**495**	**932**	**1.273**	**551**	**397**	**5.519.245**	**0,09**

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2018 (diolah)

3. Mobilitas Penduduk

Analisis tentang migrasi atau mobilitas penduduk merupakan indikator yang penting bagi terlaksananya pembangunan manusia seutuhnya. Tingkat mobilitas penduduk baik mobilitas permanen maupun non permanen akan tampak nyata pada satuan unit administrasi yang lebih kecil dari Provinsi, sehingga analisis mobilitas akan lebih baik bila dilakukan pada wilayah administrasi setingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan maupun Desa/Kelurahan.

Berkaitan dengan arus migrasi, indikator yang digunakan dalam perhitungannya adalah :

1) Migrasi Masuk (Mi)
2) Migrasi Keluar (Mo)
3) Migrasi Neto (Mn)
4) Migrasi Bruto (Mb)
5) Persentase migrasi dari perdesaan ke perkotaan

Ukuran-ukuran indikator tersebut bermanfaat untuk mengetahui apakah suatu daerah (Kabupaten/Kota) merupakan daerah yang memiliki daya tarik bagi penduduk di wilayah sekitarnya atau wilayah lainnya untuk melakukan migrasi. Sebaliknya juga menunjukan apakah suatu daerah, karena berbagai keterbatasan sumber daya, adanya tekanan atau alasan-alasan tertentu menjadi faktor pendorong bagi penduduk di wilayahnya untuk berpindah ke daerah lain. Angka migrasi biasanya dihitung menurut kelompok umur dan jenis kelamin.

a. Angka Migrasi Masuk (*in-migration/Mi*)

Angka migrasi masuk per Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 51 berikut ini :

Tabel 51.
Angka Migrasi Masuk Per Kabupaten/Kota
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)		Angka Migrasi Masuk
		Pada Pertengahan Tahun	Migrasi Masuk	
1	Kabupaten Pesisir Selatan	514.107	30.184	58,71
2	Kabupaten Solok	380.692	1.616	4,24
3	Kabupaten Sijunjung	235.913	2.464	10,44
4	Kabupaten Tanah Datar	369.374	4.758	12,88
5	Kabupaten Padang Pariaman	446.240	8.973	20,11
6	Kabupaten Agam	527.730	8.394	15,91
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	377.826	5.031	13,32
8	Kabupaten Pasaman	317.500	3.444	10,85
9	Kabupaten Kep. Mentawai	86.593	1.035	11,95
10	Kabupaten Dharmasraya	210.268	3.934	18,71
11	Kabupaten Solok Selatan	179.796	5.049	28,08
12	Kabupaten Pasaman Barat	430.740	4.640	10,77
13	Kota Padang	894.299	5.522	6,17
14	Kota Solok	72.669	1.993	27,43
15	Kota Sawahlunto	65.710	1.341	20,41
16	Kota Padang Panjang	57.165	1.956	34,22
17	Kota Bukittinggi	120.387	3.546	29,46
18	Kota Payakumbuh	136.501	1.803	13,21
19	Kota Pariaman	91.743	2.442	26,62

Sumber : DKB II Tahun 2017, DKB II Tahun 2018, dan Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota (diolah)

Dari tabel dapat diketahui bahwa angka migrasi masuk tertinggi berada di Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 58,71 yang berarti selama tahun 2018 ada sebanyak 58-59 orang penduduk yang masuk ke Kabupaten Pesisir Selatan per 1.000 penduduk yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan. Sementara itu, angka migrasi masuk terendah berada di Kabupaten Solok yaitu hanya sebesar 4,24, ini berarti pada tahun 2018 hanya sebanyak 4-5 orang penduduk yang masuk ke Kabupaten Solok dari 1.000 penduduk yang ada di Kabupaten Solok.

Tingginya angka migrasi masuk ke Kabupaten Pesisir Selatan ini disebabkan karena Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu Kabupaten yang wilayahnya menjadi lokasi transmigrasi. Sementara rendahnya angka migrasi masuk ke Kabupaten Solok disebabkan karena lokasi wilayah Kabupaten Solok berdekatan dengan 3 (tiga) Kota yaitu Kota Padang, Kota Solok dan Kota Sawahlunto sebagaimana dipahami daerah yang berupa Kota memiliki daya tarik bagi penduduk untuk melakukan migrasi baik dalam mencari pekerjaan, melakukan usaha yang bersifat jasa dan perdagangan, dan akses pendidikan yang lebih berkualitas.

b. Angka Migrasi Keluar (*out-migration/Mo*)

Angka migrasi keluar per Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 52, dimana angka migrasi keluar terbesar sebagaimana terlihat pada tabel tersebut terdapat pada Kota Pariaman yaitu sebesar 28,71, dimana ini berarti pada tahun 2018 ada sebanyak 28-29 orang penduduk yang keluar dari Kota Pariaman dari 1.000 penduduk yang ada di Kota Pariaman, sedangkan angka migrasi keluar terkecil berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 4,34, dimana berarti selama tahun 2018 terdapat 4-5 orang penduduk yang keluar (pindah) dari Kabupaten Kepulauan Mentawai dari 1.000 penduduk yang ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Tingginya angka migrasi keluar dari Kota Pariaman ini disebabkan karena lokasi Kota Pariaman yang dekat dengan ibukota Provinsi Sumatera Barat yaitu Kota Padang yang menjadi daya tarik bagi penduduk untuk melakukan migrasi baik untuk mencari pekerjaan maupun untuk mendapatkan akses pendidikan yang lebih

berkualitas. Selain itu, migrasi juga dilakukan keluar Provinsi Sumatera Barat (merantau) ketempat sanak saudara yang telah berhasil (faktor budaya).

Tabel 52.
Angka Migrasi Keluar Per Kabupaten/Kota
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)		Angka Migrasi Keluar
		Pada Pertengahan Tahun	Migrasi Keluar	
1	Kabupaten Pesisir Selatan	514.107	9.008	17,52
2	Kabupaten Solok	380.692	4.181	10,98
3	Kabupaten Sijunjung	235.913	3.373	14,30
4	Kabupaten Tanah Datar	369.374	7.757	21,00
5	Kabupaten Padang Pariaman	446.240	12.714	28,49
6	Kabupaten Agam	527.730	10.428	19,76
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	377.826	5.148	13,63
8	Kabupaten Pasaman	317.500	5.049	15,90
9	Kabupaten Kep. Mentawai	86.593	376	4,34
10	Kabupaten Dharmasraya	210.268	4.277	20,34
11	Kabupaten Solok Selatan	179.796	4.913	27,33
12	Kabupaten Pasaman Barat	430.740	3.336	7,74
13	Kota Padang	894.299	6.278	7,02
14	Kota Solok	72.669	1.905	26,21
15	Kota Sawahlunto	65.710	1.227	18,67
16	Kota Padang Panjang	57.165	1.463	25,59
17	Kota Bukittinggi	120.387	2.994	24,87
18	Kota Payakumbuh	136.501	1.539	11,27
19	Kota Pariaman	91.743	2.634	28,71

Sumber : DKB II Tahun 2017, DKB II Tahun 2018, dan Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota (diolah)

Sementara rendahnya angka migrasi keluar dari Kabupaten Kepulauan Mentawai disebabkan oleh faktor geografis berupa Kabupaten yang terdiri dari kepulauan sehingga penduduknya membutuhkan biaya yang lebih besar untuk melakukan migrasi keluar, karena akses perhubungan dan sarana transportasi yang kurang memadai baik kuantitas dan kualitas. Selain itu tingkat pendidikan yang rendah juga mempengaruhi keputusan untuk

melakukan migrasi keluar, karena akan sulit bersaing untuk mendapatkan pekerjaan di daerah tujuan.

c. Angka Migrasi Neto (*nett-migration/Mn*)

Angka ini merupakan selisih antara migrasi masuk dan migrasi keluar, dimana apabila migrasi masuk lebih besar daripada migrasi keluar maka disebut migrasi neto positif, sedangkan jika migrasi keluar lebih besar daripada migrasi masuk disebut migrasi neto negatif. Angka migrasi neto per Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 53 sebagai berikut :

Tabel 53.
Angka Migrasi Neto Per Kabupaten/Kota
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)			Angka Migrasi Neto	Jenis Migrasi Neto
		Pada Pertengahan Tahun	Migrasi Masuk	Migrasi Keluar		
1	Kabupaten Pesisir Selatan	514.107	30.184	9.008	41,19	Positif
2	Kabupaten Solok	380.692	1.616	4.181	-6,74	Negatif
3	Kabupaten Sijunjung	235.913	2.464	3.373	-3,85	Negatif
4	Kabupaten Tanah Datar	369.374	5.398	7.757	-6,39	Negatif
5	Kabupaten Padang Pariaman	446.240	8.973	12.714	-8,38	Negatif
6	Kabupaten Agam	527.730	8.394	10.428	-3,85	Negatif
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	377.826	5.031	5.148	-0,31	Negatif
8	Kabupaten Pasaman	317.500	3.444	5.049	-5,06	Negatif
9	Kabupaten Kep. Mentawai	86.593	1.035	376	7,61	Positif
10	Kabupaten Dharmasraya	210.268	3.934	4.277	-1,63	Negatif
11	Kabupaten Solok Selatan	179.796	5.049	4.913	0,76	Positif
12	Kabupaten Pasaman Barat	430.740	4.640	3.336	3,03	Positif
13	Kota Padang	894.299	5.522	6.278	-0,85	Negatif
14	Kota Solok	72.669	1.993	1.905	1,21	Positif
15	Kota Sawahlunto	65.710	1.341	1.227	1,73	Positif
16	Kota Padang Panjang	57.165	1.956	1.463	8,62	Positif
17	Kota Bukittinggi	120.387	3.546	2.994	4,59	Positif
18	Kota Payakumbuh	136.501	1.803	1.539	1,93	Positif
19	Kota Pariaman	91.743	2.442	2.634	-2,09	Negatif

Sumber : DKB II Tahun 2017, DKB II Tahun 2018, dan Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota (diolah)

Dari Tabel 53 tersebut dapat diketahui bahwa terdapat 9 (sembilan) Kabupaten/Kota yang memiliki Angka Migrasi Neto Positif, dimana 5 (lima) diantaranya adalah daerah Kota. Sedangkan 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota lainnya memiliki Angka Migrasi Neto Negatif, dimana 8 (delapan) diantaranya adalah daerah Kabupaten. Dari kedua hal ini kembali menunjukan bahwa Kota memiliki daya tarik bagi penduduk untuk melakukan migrasi baik dari sisi kesempatan kerja yang lebih luas maupun kualitas pendidikan yang lebih baik.

d. Transmigrasi

Beberapa tujuan yang melatar belakangi program atau kegiatan transmigrasi antara lain sebagai berikut :

1) Pemerataan dan persebaran penduduk.
2) Peningkatan taraf hidup para transmigran di daerah transmigrasi.
3) Pengolahan sumber daya alam yang selama ini belum tersentuh dan berada di daerah baru atau daerah tujuan transmigrasi.

Data-data terkait transmigrasi selama tahun 2018 dapat dilihat mulai Tabel 54 sampai dengan Tabel 57 berikut yang memperlihatkan data transmigran masuk dan keluar berdasarkan penempatan transmigrasi per Kabupaten/Kota dan data transmigran masuk dan keluar per Kabupaten/Kota, data transmigran berdasarkan jenis transmigrasi per Kabupaten/Kota, dan data transmigran berdasarkan pola transmigrasi per Kabupaten/Kota.

Dari Tabel 54 dapat dilihat bahwa selama tahun 2018 hanya di Kabupaten Sijunjung, tepatnya di Nagari Padang Tarok, Kecamatan Kamang Baru terdapat transmigran masuk menurut daerah asal yaitu sebanyak 192 KK (736 jiwa). Transmigran tersebut diantaranya

berasal dari Provinsi Jawa Tengah sebanyak 120 KK (440 jiwa) dan Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta sebanyak 10 KK (31 jiwa).

Tabel 54.
Data Transmigran Masuk dan Keluar Berdasarkan Penempatan Transmigrasi Per Kabupaten/Kota Tahun 2018

No	Kabupaten/Kota	Penempatan Transmigrasi					
		Menurut Daerah Asal		Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM)		Pola Transmigrasi PIR/PIR BUN dan PIR SUS	
		KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa
1	Kabupaten Pesisir Selatan	-	-	-	-	-	-
2	Kabupaten Solok	-	-	-	-	-	-
3	Kabupaten Sijunjung	192	736	-	-	-	-
4	Kabupaten Tanah Datar	-	-	-	-	-	-
5	Kabupaten Padang Pariaman	-	-	-	-	-	-
6	Kabupaten Agam	-	-	-	-	-	-
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	-	-	-	-	-	-
8	Kabupaten Pasaman	-	-	-	-	-	-
9	Kabupaten Kep. Mentawai	-	-	-	-	-	-
10	Kabupaten Dharmasraya	-	-	-	-	-	-
11	Kabupaten Solok Selatan	-	-	-	-	-	-
12	Kabupaten Pasaman Barat	-	-	-	-	-	-
13	Kota Padang	-	-	-	-	-	-
14	Kota Solok	-	-	-	-	-	-
15	Kota Sawahlunto	-	-	-	-	-	-
16	Kota Padang Panjang	-	-	-	-	-	-
17	Kota Bukittinggi	-	-	-	-	-	-
18	Kota Payakumbuh	-	-	-	-	-	-
19	Kota Pariaman	-	-	-	-	-	-
	Sumatera Barat	**192**	**736**	**-**	**-**	**-**	**-**

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat (diolah)

Sama halnya dengan data pada Tabel 54, pada Tabel 55 juga memperlihatkan jumlah transmigrasi yang masuk ke Provinsi Sumatera Barat ada sebanyak 192 KK (736 jiwa) dan seluruhnya ditempatkan di Kabupaten Sijunjung yaitu di Nagari Padang Tarok, Kecamatan Kamang Baru, sementara untuk transmigrasi keluar selama tahun 2018 tidak ada.

Tabel 55.
Data Transmigran Masuk dan Keluar
Per Kabupaten/Kota Tahun 2018

No	Kabupaten/Kota	Transmigrasi	
		Masuk	Keluar
1	Kabupaten Pesisir Selatan	-	-
2	Kabupaten Solok	-	-
3	Kabupaten Sijunjung	192 KK/736 jiwa	-
4	Kabupaten Tanah Datar	-	-
5	Kabupaten Padang Pariaman	-	-
6	Kabupaten Agam	-	-
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	-	-
8	Kabupaten Pasaman	-	-
9	Kabupaten Kep. Mentawai	-	-
10	Kabupaten Dharmasraya	-	-
11	Kabupaten Solok Selatan	-	-
12	Kabupaten Pasaman Barat	-	-
13	Kota Padang	-	-
14	Kota Solok	-	-
15	Kota Sawahlunto	-	-
16	Kota Padang Panjang	-	-
17	Kota Bukittinggi	-	-
18	Kota Payakumbuh	-	-
19	Kota Pariaman	-	-
	Sumatera Barat	**192 KK/736 jiwa**	**-**

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat (diolah)

Sementara itu, pada Tabel 56 dapat dilihat jumlah transmigran berdasarkan jenis transmigrasi di Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2018 yaitu sebanyak 736 jiwa yang keseluruhnya ditempatkan di Kabupaten Sijunjung, tepatnya di Nagari Padang Tarok, Kecamatan Kamang Baru, dan merupakan transmigran dengan jenis transmigrasi umum, yaitu program transmigrasi yang disponsori dan dibiayai secara keseluruhan oleh pihak Pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigarsi).

Tabel 56.
Transmigran Berdasarkan Jenis Transmigrasi
Per Kabupaten/Kota Tahun 2018

No	Kabupaten/Kota	Jenis Transmigrasi (Jiwa)		
		Swakarsa Berbantuan	Swakarsa Mandiri	Transmigrasi Umum
1	Kabupaten Pesisir Selatan	-	-	-
2	Kabupaten Solok	-	-	-
3	Kabupaten Sijunjung	-	-	736
4	Kabupaten Tanah Datar	-	-	-
5	Kabupaten Padang Pariaman	-	-	-
6	Kabupaten Agam	-	-	-
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	-	-	-
8	Kabupaten Pasaman	-	-	-
9	Kabupaten Kep. Mentawai	-	-	-
10	Kabupaten Dharmasraya	-	-	-
11	Kabupaten Solok Selatan	-	-	-
12	Kabupaten Pasaman Barat	-	-	-
13	Kota Padang	-	-	-
14	Kota Solok	-	-	-
15	Kota Sawahlunto	-	-	-
16	Kota Padang Panjang	-	-	-
17	Kota Bukittinggi	-	-	-
18	Kota Payakumbuh	-	-	-
19	Kota Pariaman	-	-	-
	Sumatera Barat	**-**	**-**	**736**

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat (diolah)

Pada Tabel 57 dapat diketahui jumlah transmigran berdasarkan pola transmigrasi di Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2018 yaitu sebanyak 736 jiwa yang semuanya merupakan transmigran berdasarkan pola transmigrasi pertanian tanaman pangan yang ditempatkan di Nagari Padang Tarok, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung. Tahun 2018 ini merupakan tahun ke-2 penempatan transmigran di daerah ini. Sebelumnya, pada tahun 2016 telah dilakukan penempatan pertama kali transmigran di daerah ini yaitu sebanyak 30 KK (121 jiwa).

Tabel 57.
Transmigran Berdasarkan Pola Transmigrasi
Per Kabupaten/Kota Tahun 2018

No	Kabupaten/Kota	Pola Transmigrasi					
		Pertanian Tanaman Pangan	Perkebunan	Peternakan	Perikanan	Jasa Industri	Hutan Tanaman Industri (HTI)
1	Kabupaten Pesisir Selatan	-	-	-	-	-	-
2	Kabupaten Solok	-	-	-	-	-	-
3	Kabupaten Sijunjung	736	-	-	-	-	-
4	Kabupaten Tanah Datar	-	-	-	-	-	-
5	Kabupaten Padang Pariaman	-	-	-	-	-	-
6	Kabupaten Agam	-	-	-	-	-	-
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	-	-	-	-	-	-
8	Kabupaten Pasaman	-	-	-	-	-	-
9	Kabupaten Kep. Mentawai	-	-	-	-	-	-
10	Kabupaten Dharmasraya	-	-	-	-	-	-
11	Kabupaten Solok Selatan	-	-	-	-	-	-
12	Kabupaten Pasaman Barat	-	-	-	-	-	-
13	Kota Padang	-	-	-	-	-	-
14	Kota Solok	-	-	-	-	-	-
15	Kota Sawahlunto	-	-	-	-	-	-
16	Kota Padang Panjang	-	-	-	-	-	-
17	Kota Bukittinggi	-	-	-	-	-	-
18	Kota Payakumbuh	-	-	-	-	-	-
19	Kota Pariaman	-	-	-	-	-	-
	Sumatera Barat	736	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat (diolah)

4. Kepemilikan Dokumen Kependudukan

a. Kepemilikan Kartu Keluarga

Persentase kepemilikan kartu keluarga berguna untuk mengetahui jumlah keluarga yang ada di Provinsi Sumatera Barat yang telah memiliki Kartu Keluarga.

Kepemilikan Kartu Keluarga Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2018 dapat dilihat pada Tabel 58, dimana persentase kepemilikan kartu keluarga dari jumlah keluarga yang ada di Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 adalah sebesar 86,95 persen

dengan persentase terbesar berada di Kota Bukittinggi yaitu sebesar 95,11 persen, sementara persentase terkecil berada di Kabupaten Padang Pariaman yaitu sebesar 67,35 persen.

Tabel 58.
Kepemilikan Kartu Keluarga Provinsi Sumatera Barat
Per 31 Desember 2018

No	Kabupaten/Kota	Jumlah KK	Kepemilikan KK	%
1	Kabupaten Pesisir Selatan	136.632	115.051	84,21
2	Kabupaten Solok	103.505	90.813	87,74
3	Kabupaten Sijunjung	64.233	60.591	94,33
4	Kabupaten Tanah Datar	106.273	81.479	76,67
5	Kabupaten Padang Pariaman	112.789	75.958	67,35
6	Kabupaten Agam	142.784	129.138	90,44
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	114.495	106.294	92,84
8	Kabupaten Pasaman	84.408	75.684	89,66
9	Kabupaten Kep. Mentawai	23.157	15.704	67,82
10	Kabupaten Dharmasraya	60.211	57.031	94,72
11	Kabupaten Solok Selatan	48.171	39.745	82,51
12	Kabupaten Pasaman Barat	109.747	92.145	83,96
13	Kota Padang	247.105	229.262	92,78
14	Kota Solok	19.726	17.956	91,03
15	Kota Sawahlunto	19.394	17.739	91,47
16	Kota Padang Panjang	15.725	15.137	96,26
17	Kota Bukittinggi	33.432	31.797	95,11
18	Kota Payakumbuh	39.352	34.771	88,36
19	Kota Pariaman	23.865	22.270	93,32
	Sumatera Barat	**1.505.004**	**1.308.565**	**86,95**

Sumber : Data Kependudukan Bersih (DKB) Semester II 2018 (diolah)

b. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)

Persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk eletronik (KTP-el) berguna untuk mengetahui jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat yang telah memiliki KTP-el per 31 Desember 2018 dan dapat dilihat pada Tabel 59 berikut ini :

Tabel 59.
Kepemilikan KTP-el Provinsi Sumatera Barat
Per 31 Desember 2018

No	Kabupaten/Kota	Wajib KTP (Jiwa)	Kepemilikan KTP-el (Jiwa)	%
1	Kabupaten Pesisir Selatan	354.374	301.540	85,09
2	Kabupaten Solok	267.701	240.568	89,86
3	Kabupaten Sijunjung	164.672	149.934	91,05
4	Kabupaten Tanah Datar	274.242	249.976	91,15
5	Kabupaten Padang Pariaman	291.925	277.141	94,94
6	Kabupaten Agam	383.527	341.469	89,03
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	271.946	253.899	93,36
8	Kabupaten Pasaman	221.418	181.520	81,98
9	Kabupaten Kep. Mentawai	57.388	53.593	93,39
10	Kabupaten Dharmasraya	144.297	138.470	95,96
11	Kabupaten Solok Selatan	125.991	101.495	80,56
12	Kabupaten Pasaman Barat	290.885	255.419	87,81
13	Kota Padang	638.479	606.472	94,99
14	Kota Solok	50.352	47.418	94,17
15	Kota Sawahlunto	47.054	45.291	96,25
16	Kota Padang Panjang	39.936	38.151	95,53
17	Kota Bukittinggi	84.845	81.182	95,68
18	Kota Payakumbuh	97.775	92.738	94,85
19	Kota Pariaman	66.051	60.982	92,33
	SUMATERA BARAT	**3.872.858**	**3.517.258**	**90,82**

Sumber : Data Kependudukan Bersih (DKB) Semester II 2018 (diolah)

Dari Tabel 59 tersebut dapat dilihat bahwa kepemilikan KTP-el Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2018 adalah sebesar 90,82 dari total wajib KTP yang ada, dimana kepemilikan KTP-el tertinggi berada di Kota Sawahlunto dengan capaian 96,25 persen dan terendah berada di Kabupaten Solok Selatan dengan capaian baru sebesar 80,56 persen. Dari Tabel 59 juga dapat dilihat bahwa capaian kepemilikan KTP-el untuk Kota secara umum lebih tinggi bila dibandingkan dengan Kabupaten. Hal ini dapat dipahami karena jumlah penduduk dan cakupan wilayah Kota lebih kecil bila dibandingkan Kabupaten. Meskipun seluruh Kabupaten telah melakukan pelayanan keliling jemput bola, namun capaiannya

masih belum bisa melewati capaian yang dimiliki oleh Kota secara umum. Untuk itu, Kabupaten harus bisa meningkatkan lagi inovasi-inovasi pelayanannya agar capaian kepemilikan KTP-el nya dapat mencapai target yang telah ditetapkan, khususnya untuk mengejar target wajib KTP yang ada agar semua wajib KTP memiliki KTP-el.

c. Kepemilikan Akta

1) Kepemilikan Akta Kelahiran

Persentase kepemilikan akta kelahiran berguna untuk mengetahui jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat yang telah memiliki akta kelahiran per 31 Desember 2018 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 60, yaitu hanya sebesar 40,60 persen dari jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat. Pada Tabel 60 juga dapat dilihat bahwa persentase kepemilikan akta kelahiran tertinggi berada di Kota Padang Panjang dengan capaian sebesar 78,07 persen dan yang terendah berada di Kabupaten Pasaman dengan capaian hanya sebesar 30,47 persen. Angka capaian ini masih sangat rendah dan ini menunjukan bahwa masih sangat rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus akta kelahiran, khususnya untuk penduduk yang sudah berusia 18 tahun keatas karena mereka merasa tidak lagi memerlukan dokumen akta kelahiran ini.

Untuk itu, kepemilikan akta kelahiran ini hanya ditargetkan untuk penduduk yang berusia 0-18 tahun, dimana pada tahun 2018 ditargetkan kepemilikan akta kelahiran 0-18 tahun adalah 85 persen dari jumlah penduduk usia 0-18 tahun.

Untuk kepemilikan akta kelahiran 0-18 tahun Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2018 dapat dilihat pada Tabel 61, dimana

persentasenya sudah mencapai 83,71 persen. Untuk kepemilikan akta kelahiran 0-18 tahun ini, capaian tertinggi berada di Kabupaten Pesisir Selatan yaitu sebesar 98,20 persen, sedangkan capaian terendah juga berada di Kabupaten Pasaman, dengan capaian kepemilikan hanya 68,03 persen.

Bagi Kabupaten dengan capaian yang masih jauh dibawah target, akan terus meningkatkan inovasi salah satunya melalui kerja sama dengan sekolah-sekolah dan rumah sakit dengan harapan target kepemilikan akta kelahiran 0-18 tahun dapat tercapai.

Tabel 60.
Kepemilikan Akta Kelahiran Provinsi Sumatera Barat
Per 31 Desember 2018

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepemilikan Akta Kelahiran (Jiwa)	%
1	Kabupaten Pesisir Selatan	508.691	224.621	44,16
2	Kabupaten Solok	384.091	159.211	41,45
3	Kabupaten Sijunjung	236.910	93.160	39,32
4	Kabupaten Tanah Datar	370.993	170.691	46,01
5	Kabupaten Padang Pariaman	427.919	175.791	41,08
6	Kabupaten Agam	528.619	197.993	37,45
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	380.173	152.243	40,05
8	Kabupaten Pasaman	318.379	97.010	30,47
9	Kabupaten Kep. Mentawai	87.517	40.966	46,81
10	Kabupaten Dharmasraya	212.653	69.040	32,47
11	Kabupaten Solok Selatan	180.905	61.295	33,88
12	Kabupaten Pasaman Barat	431.575	176.287	40,85
13	Kota Padang	900.922	328.722	36,49
14	Kota Solok	73.614	40.214	54,63
15	Kota Sawahlunto	66.377	34.705	52,28
16	Kota Padang Panjang	57.767	45.098	78,07
17	Kota Bukittinggi	121.590	76.519	62,93
18	Kota Payakumbuh	137.792	56.431	40,95
19	Kota Pariaman	92.758	41.078	44,29
	Sumatera Barat	**5.519.245**	**2.241.075**	**40,60**

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2018 (diolah)

Tabel 61.
Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun Provinsi Sumatera Barat
Per 31 Desember 2018

No	Kabupaten/Kota	Anak 0-18 Tahun (Jiwa)	Kepemilikan Akta Kelahiran (Jiwa)	%
1	Kabupaten Pesisir Selatan	174.691	171.541	98,20
2	Kabupaten Solok	132.068	113.083	85,62
3	Kabupaten Sijunjung	81.685	72.564	88,83
4	Kabupaten Tanah Datar	111.257	97.378	87,53
5	Kabupaten Padang Pariaman	152.466	120.749	79,20
6	Kabupaten Agam	166.367	136.775	82,21
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	123.339	107.295	86,99
8	Kabupaten Pasaman	110.060	74.871	68,03
9	Kabupaten Kep. Mentawai	33.140	27.882	84,13
10	Kabupaten Dharmasraya	75.202	56.754	75,47
11	Kabupaten Solok Selatan	62.632	46.890	74,87
12	Kabupaten Pasaman Barat	158.562	142.917	90,13
13	Kota Padang	292.362	219.123	74,95
14	Kota Solok	26.125	24.684	94,48
15	Kota Sawahlunto	21.840	20.958	95,96
16	Kota Padang Panjang	20.036	18.857	94,12
17	Kota Bukittinggi	41.214	37.759	91,62
18	Kota Payakumbuh	45.150	40.562	89,84
19	Kota Pariaman	30.541	25.325	82,92
	Sumatera Barat	**1.858.737**	**1.555.967**	**83,71**

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2018 (diolah)

2) *Kepemilikan Akta Perkawinan*

Persentase kepemilikan akta perkawinan berguna untuk mengetahui jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat yang memiliki akta perkawinan per 31 Desember 2018 yang dapat dilihat pada Tabel 62.

Untuk persentase kepemilikan akta perkawinan Provinsi Sumatera Barat ini juga sangat kecil yaitu hanya sebesar 26,35 persen dari jumlah penduduk dengan status kawin. Hal ini disebabkan karena data kepemilikan akta perkawinan ini hanya

diperoleh dari database penduduk yang ada di Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota yang sifatnya adalah berdasarkan laporan dari penduduk yang melakukan perkawinan, karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya mengeluarkan Akta Perkawinan untuk perkawinan non muslim, maka data kepemilikan akta perkawinan muslim hanya bisa didapat apabila penduduk yang bersangkutan melaporkan perkawinannya tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Tabel 62.
Kepemilikan Akta Perkawinan Provinsi Sumatera Barat
Per 31 Desember 2018

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Status Kawin (Jiwa)	Kepemilikan Akta Perkawinan (Jiwa)	%
1	Kabupaten Pesisir Selatan	228.677	6.636	2,90
2	Kabupaten Solok	170.427	75.743	44,44
3	Kabupaten Sijunjung	111.019	67.570	60,86
4	Kabupaten Tanah Datar	168.006	72.123	42,93
5	Kabupaten Padang Pariaman	171.728	54.087	31,50
6	Kabupaten Agam	222.670	48.773	21,90
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	181.540	19.318	10,64
8	Kabupaten Pasaman	135.191	30.764	22,76
9	Kabupaten Kep. Mentawai	38.132	14.985	39,30
10	Kabupaten Dharmasraya	105.559	25.809	24,45
11	Kabupaten Solok Selatan	81.735	12.332	15,09
12	Kabupaten Pasaman Barat	182.998	44.648	24,40
13	Kota Padang	406.184	84.789	20,87
14	Kota Solok	32.307	24.352	75,38
15	Kota Sawahlunto	30.128	24.466	81,21
16	Kota Padang Panjang	24.401	14.157	58,02
17	Kota Bukittinggi	53.379	3.749	7,02
18	Kota Payakumbuh	63.260	7.348	11,62
19	Kota Pariaman	37.154	12.402	33,38
	Sumatera Barat	**2.444.495**	**644.051**	**26,35**

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2018 (diolah)

Dari Tabel 62 juga dapat dilihat bahwa persentase kepemilikan akta perkawinan terbesar berada di Kota Sawahlunto yaitu sebesar 81,21 persen dan terkecil berada di Kabupaten Pesisir Selatan yaitu hanya sebesar 2,90 persen.

3) *Kepemilikan Akta Perceraian*

Persentase kepemilikan akta perceraian berguna untuk mengetahui jumlah penduduk di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki akta perceraian per 31 Desember 2018, dapat dilihat pada Tabel 63 berikut ini :

Tabel 63.
Kepemilikan Akta Perceraian Provinsi Sumatera Barat
Per 31 Desember 2018

NO	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Status Cerai Hidup (Jiwa)	Kepemilikan Akta Perceraian (Jiwa)	%
1	Kabupaten Pesisir Selatan	6.701	61	0,91
2	Kabupaten Solok	3.050	983	32,23
3	Kabupaten Sijunjung	2.108	189	8,97
4	Kabupaten Tanah Datar	5.110	1.398	27,36
5	Kabupaten Padang Pariaman	6.027	515	8,54
6	Kabupaten Agam	7.507	2.306	30,72
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	3.662	659	18,00
8	Kabupaten Pasaman	2.988	240	8,03
9	Kabupaten Kep. Mentawai	476	31	6,51
10	Kabupaten Dharmasraya	1.584	154	9,72
11	Kabupaten Solok Selatan	1.958	292	14,91
12	Kabupaten Pasaman Barat	4.120	646	15,68
13	Kota Padang	10.789	3.346	31,01
14	Kota Solok	1.011	594	58,75
15	Kota Sawahlunto	993	420	42,30
16	Kota Padang Panjang	964	278	28,84
17	Kota Bukittinggi	1.658	240	14,48
18	Kota Payakumbuh	1.983	176	8,88
19	Kota Pariaman	1.381	292	21,14
	Sumatera Barat	**64.070**	**12.820**	**20,01**

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2018 (diolah)

Dari Tabel 63 dapat diketahui bahwa persentase kepemilikan akta perceraian di Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2018 adalah sebesar 20,01 persen dari jumlah perceraian hidup yang ada.

Sama halnya dengan kepemilikan akta perkawinan, untuk kepemilikan akta perceraian ini, data juga diperoleh dari penduduk yang melaporkan perceraiannya. Bila penduduk yang telah bercerai tidak melaporkan perceraiannya, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak akan memiliki data terhadap perceraian tersebut, khususnya untuk perceraian penduduk muslim yang dilakukan di Pengadilan Agama, karena Dinas Dukcapil hanya mengeluarkan Akta Perceraian untuk penduduk non muslim. Untuk itu perlu adanya kesadaran masyarakat untuk melaporkan setiap peristiwa perceraian yang terjadi sehingga bisa dilakukan pencatatan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di masing-masing Kabupaten/Kota.

4) Kepemilikan Akta Kematian

Persentase kepemilikan akta kematian berguna untuk mengetahui jumlah penduduk yang memiliki akta kematian di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 64 dimana besarnya persentase kepemilikan akta kematian tersebut adalah sebesar 82,47 persen dari jumlah penduduk mati (meninggal) pada tahun 2018. Dari 19 (sembilan belas) Kabupaten/Kota, 10 (sepuluh) diantaranya memiliki persentase kepemilikan akta kematian sebesar 100 persen, sedangkan persentase kepemilikan terendah berada di Kabupaten Sijunjung yaitu hanya sebesar 12,60 persen. Untuk

data kepemilikan akta kematian ini, sama halnya dengan kepemilikan akta perkawinan dan akta perceraian hanya berasal dari penduduk yang melaporkan peristiwa (kejadian) kematian saja, sehingga terlihat bahwa kesadaran penduduk untuk melaporkan dan membuat akta kematian masih sangat kurang sekali. Mereka hanya melaporkan peristiwa kematian disaat perlu untuk membuat akta kematian saja seperti untuk mengurus pensiun.

Tabel 64.
Kepemilikan Akta Kematian Provinsi Sumatera Barat
Per 31 Desember 2018

NO	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Meninggal (Jiwa)	Kepemilikan Akta Kematian (Jiwa)	%
1	Kabupaten Pesisir Selatan	3.482	2.719	78,09
2	Kabupaten Solok	383	383	100,00
3	Kabupaten Sijunjung	873	110	12,60
4	Kabupaten Tanah Datar	7.410	6.692	90,31
5	Kabupaten Padang Pariaman	1.964	1.964	100,00
6	Kabupaten Agam	4.378	4.378	100,00
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	186	186	100,00
8	Kabupaten Pasaman	2.894	1.777	61,40
9	Kabupaten Kep. Mentawai	190	112	58,95
10	Kabupaten Dharmasraya	174	174	100,00
11	Kabupaten Solok Selatan	1.356	393	28,98
12	Kabupaten Pasaman Barat	4.947	4.947	100,00
13	Kota Padang	1.021	384	37,61
14	Kota Solok	1.011	224	22,16
15	Kota Sawahlunto	388	388	100,00
16	Kota Padang Panjang	279	279	100,00
17	Kota Bukittinggi	1.647	1.647	100,00
18	Kota Payakumbuh	1.444	1.444	100,00
19	Kota Pariaman	1.918	1.442	75,18
	Sumatera Barat	**52.076**	**29.506**	**82,47**

Sumber : Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota (diolah)

BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Data kependudukan dapat memberikan gambaran mengenai status data kependudukan yang ada saat ini di Provinsi Sumatera Barat, termasuk kesenjangan pembangunan. Dari gambaran tersebut dapat memberikan sejumlah rekomendasi untuk menyusun kebijakan daerah, penelitian, dan sebagai dasar bagi pendataan yang lain yang berkaitan dengan kependudukan. Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 ini agar dapat digunakan oleh instansi pemerintah/swasta maupun pihak-pihak lain yang membutuhkan. Dalam buku ini telah disajikan data kependudukan berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2018 yang telah diolah, data perkembangan kependudukan dari Kabupaten/Kota khususnya untuk data yang terkait migrasi penduduk (pindah dan datang) dan data terkait kematian dan kepemilikan akta kematian, serta data pendukung dari lintas sektor, Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/Instansi teknis terkait yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat.

Selanjutnya untuk mengetahui lebih lanjut tentang kondisi ke depan tentang penduduk dan permasalahannya, maka Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Sumatera Barat ini akan disajikan secara berkala. Data yang valid dan akurat juga saangat tergantung pada karakter dan perilaku masyarakat sendiri, sehingga diharapkan masyarakat yang melakukan registrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi Sumatera Barat dapat memberikan dan

mengisi biodatanya dengan benar dan lengkap serta tidak terlambat melakukan registrasi dan melaporkan apabila terjadi peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pindah dan datang.

B. SARAN

Demikian yang dapat kami susun dan sajikan dalam buku Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018. Kami menyadari, Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 ini masih jauh dari sempurna. Kami berharap kritikan dan saran yang membangun, baik dari pengguna data maupun pemerhati masalah kependudukan, demi sempurnanya penyusunan Buku Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Sumatera Barat di kesempatan-kesempatan yang akan datang. Semoga buku Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 ini berguna bagi kita semua, khususnya pengambil kebijakan dalam pembangunan yang berwawasan kependudukan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Sumatera Barat. Diambil dari : https://id.wikipedia.org/wiki/Sumatera-Barat.

2. Potensi Ekonomi Sumatera Barat. Diambil dari : www.sumbarprov.go.id/details/news/305.

3. Sektor Pertambangan. Diambil dari : www.sumbarprov.go.id/details/news/2700.

4. Daftar Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat. Diambil dari : https://www.ilmupengetahuanumum.com/kabupaten-dan-kota-di-provinsi-sumatera-barat/

5. Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sumatera Barat Periode Februari 2019. Diambil dari : www.bi.go.id/id/publikasi/kajian-ekonomi-regional/sumbar/Pages/KEKR-Provinsi-Sumatera-Barat-Periode-Februari-2019.aspx.

6. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) yang dating ke Sumatera Barat pada Desember 2018 mencapai 4.801 orang. Diambil dari : https://sumbar.bps.go.id/pressrelease/2019/02/01/698/jumlah-kunjungan-wisatawan-mancanegara--wisman--yang-datang-ke-sumatera-barat-pada-desember-2018-mencapai-4-801-orang.html.